

Kata Pengantar

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 ini berhasil disusun dengan baik. Dokumen ini disusun setelah melalui beberapa tahap/proses penyusunan yang harus dilalui. Pada tahap awal, telah dibuat kesepakatan/komitmen, diikuti dengan penggalan data (primer dan sekunder), dan pelaksanaan musyawarah perencanaan (musren) RPJPD pertama dan kedua.

Tim Penyusun telah mencoba mengakomodir berbagai sumbang saran, masukan dan kritikan yang disampaikan para pihak selama proses penyusunan dokumen ini hingga rancangan akhir ini tersusun.

Laporan ini berisi 5 bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi, Analisis, dan Prediksi Kondisi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bab III : Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan
- Bab IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Bab V : Kaedah Implementasi

Kami menghargai semua kritik, sumbang saran dan masukan dari semua pihak yang telah diberikan sehingga dapat diselesaikannya Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 ini. Tim PSE-KP Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi kontribusi seperti yang diharapkan.

Yogyakarta, Januari 2007
Atas Nama
Tim Ahli PSE-KP UGM

Dr. (cand) Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I – 2
1.3. Pengertian dan Kedudukan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I – 2
1.4. Proses Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I – 3
1.5. Kerangka Pikir Penyusunan RPJPD	I – 5
1.6. Landasan Hukum	I – 6
1.7. Sistematika Penulisan	I – 7
BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	II – 1
2.1. Kondisi dan Analisis	II – 1
2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	II – 2
2.1.2. Demografi	II – 18
2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	II – 28
2.1.4. Sosial Budaya	II – 55
2.1.5. Sarana dan Prasarana	II – 79
2.1.6. Pemerintahan	II – 97

BAB III	VISI, MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	III – 1
	3.1. Permasalahan Umum Pembangunan	III – 1
	3.2. Modal Dasar Pembangunan	III – 2
	3.3. Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005–2025)	III – 2
	3.4. Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005–2025)	III – 6
	3.5. Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005–2025)	III – 12
BAB IV	ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	IV – 1
	4.1. Arah Pembangunan Umum	IV – 1
	4.2. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Kawasan	IV – 20
BAB V	KAEDAH IMPLEMENTASI	V – 1

Daftar Bagan

No.	Nama Bagan	Hal
1.1.	Pola Pikir Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I – 4
1.2.	Kerangka Pikir Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I – 5

Daftar Tabel

No.	Nama Tabel	Hal
2.1.	Ketinggian di Atas Permukaan Laut Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2004	II – 3
2.2.	Rekapitulasi Jenis Tanah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 6
2.3.	Jenis Tanah Terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 6
2.4.	Klimatologi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 8
2.5.	Keadaan Cuaca di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 9
2.6.	Penggunaan Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 10
2.7.	Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 11
2.8.	Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003–2004	II – 12
2.9.	Pergeseran Fungsi Hutan Produksi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003–2004	II – 12
2.10.	Perkembangan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002–2004	II – 18
2.11.	Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002–2004	II – 19
2.12.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 20
2.13.	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 21
2.14.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Sejahtera Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 22
2.15.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002–2004 (Juta Rp.)	II – 30
2.16.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002–2005 (Juta Rp.)	II – 31
2.17.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001–2005	II – 32

No.	Nama Tabel	Hal
2.18.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Usaha Atas Dasar Harga Konstan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001–2005	II – 33
2.19.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 34
2.20.	Kuasa Pertambangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 37
2.21.	Proporsi Kuasa Pertambangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 38
2.22.	Perkembangan Produksi Biji Timah dan Logam Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 1999–2004	II – 39
2.23.	Jumlah Produksi Biji Timah dan Logam Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004	II – 39
2.24.	Kelompok Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003	II – 40
2.25.	Penyerapan Tenaga Kerja Masing-Masing Kelompok Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003	II – 41
2.26.	Analisis LQ, Shift-Share dan Tipologi Klassen Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2003–2004	II – 49
2.27.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 57
2.28.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 57
2.29.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 58
2.30.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 58
2.31.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 59
2.32.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 59
2.33.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 60
2.34.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 60
2.35.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 61
2.36.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 61
2.37.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 62

No.	Nama Tabel	Hal
2.38.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 62
2.39.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 63
2.40.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 63
2.41.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 64
2.42.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005	II – 64
2.43.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Penyakit Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 66
2.44.	Jaringan Jalan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005	II – 80
2.45.	Karakteristik Jaringan Jalan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2005	II – 81
2.46.	Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005	II – 82
2.47.	Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005	II – 83
2.48.	Pelabuhan Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Fungsi Eksisting, Tahun 2004	II – 85
2.49.	Lalu Lintas Penumpang dan Barang di Masing-masing Pelabuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003	II – 86
2.50.	Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 87
2.51.	Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara Depati Amir Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 88
2.52.	Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara H. AS. Hanandjoeddin Tj. Pandan–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 89
2.53.	Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara Depati Amir Dan H.AS. Hanandjoeddin–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 90
2.54.	Lalu Lintas Cargo Di Bandara Depati Amir Dan H.AS. Hanandjoeddin Pangkalpinang–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 90
2.55.	Daya Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (KW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 92
2.56.	Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan PLN Cabang Bangka Belitung, Tahun 2003 – 2004	II – 92
2.57.	Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004 (Banyaknya Pelanggan)	II – 93

No.	Nama Tabel	Hal
2.58.	Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004	II – 93
3.4.1	Indikator Misi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	III – 8
3.4.2	Indikator Misi Peningkatan Kualitas SDM	III – 8
3.4.3	Indikator Misi Pemerintahan yang Amanah	III – 11
3.4.4	Indikator Misi Indikator Pemerataan Pembangunan	III – 11
3.4.5	Indikator Misi Pelestarian Lingkungan Hidup	III – 12
3.5.	Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2005-2025)	III – 13

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2005–2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di era reformasi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke 32 yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002. Sebelumnya, wilayah ini tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai sebuah provinsi yang baru dibentuk, tentu saja provinsi ini masih dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan “Bumi Serumpung Sebalai” ini mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu,

antar pelaku maupun antar wilayah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan pembangunan wilayah administratif provinsi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

1.3 PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.3.1. Pengertian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 20 tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyusunan RPJP Daerah ini didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.3.2. Kedudukan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

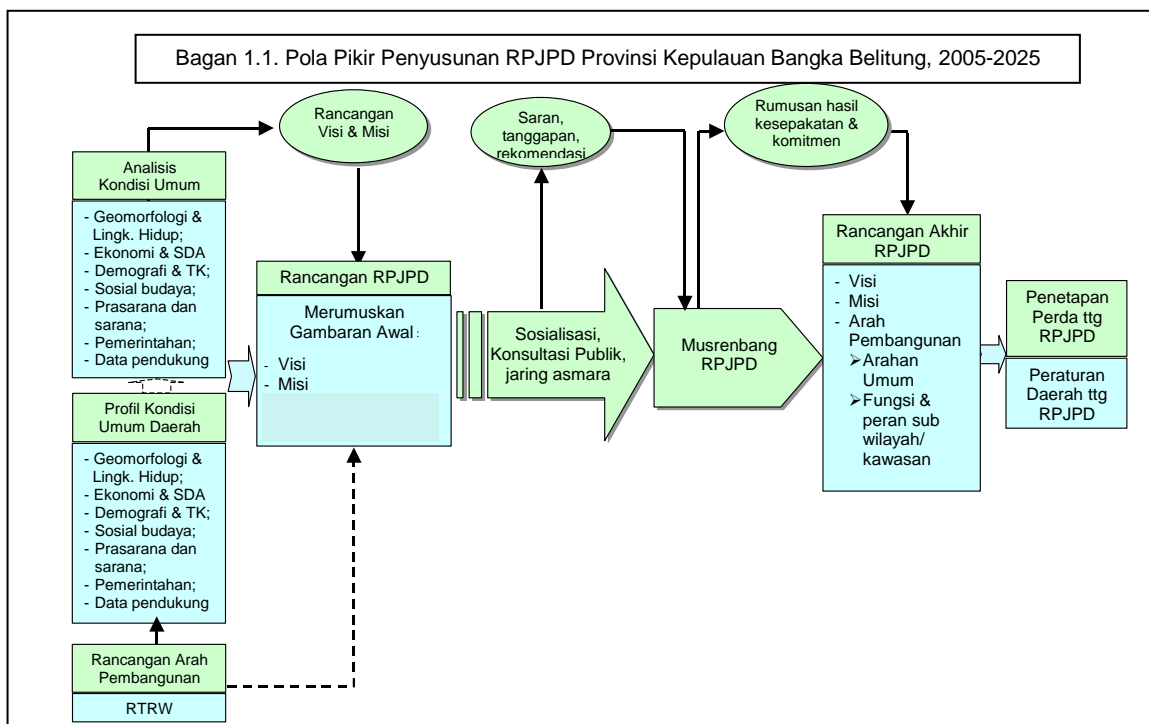
- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dalam jangka panjang (20 tahun), yang merupakan pengejawantahan kehendak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

- (2) RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah Kabupaten dan Kota, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan tujuan dibentuknya pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Undang-undang tentang pembentukan Daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disusun melalui beberapa tahapan. Tahap-tahap yang diperlukan dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005–2025 agar dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

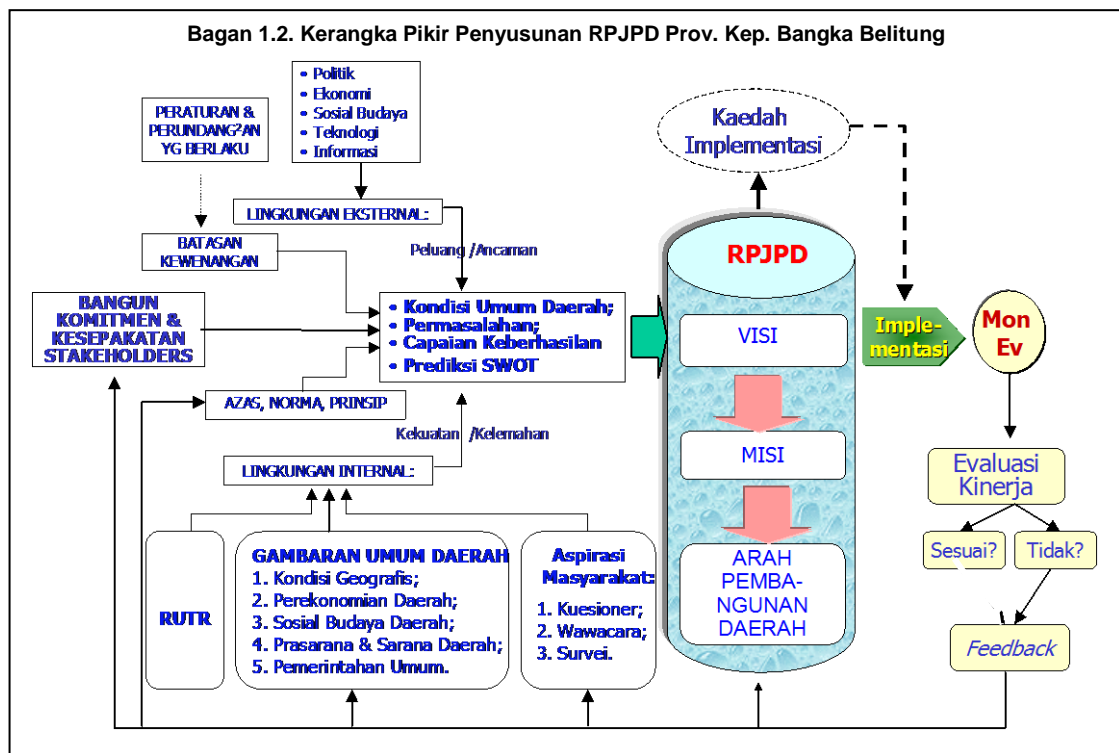


Pertama, penyiapan rancangan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertujuan untuk mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rancangan ini dibuat melalui pembentukan Tim Fasilitasi RPJP Daerah dengan langkah-langkah kegiatan seperti penyusunan rencana kerja, penyiapan data kondisi umum, rancangan visi, misi dan arah pembangunan, serta sosialisasi dan penjangingan aspirasi. **Kedua**, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai forum konsultasi, untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJPD tersebut. **Ketiga**, penyusunan rancangan akhir RPJPD, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJPD sampai menjadi rancangan akhir RPJPD. **Keempat**, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJPD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD

sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025.

1.5 KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJPD

Kerangka pikir penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005–2025 didasarkan atas pendekatan manajemen strategik yang didasarkan atas komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) daerah, dan identifikasi kondisi umum serta analisis kondisi daerah sebagai dasar dalam penyusunan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Kerangka pikir penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksud digambarkan pada Bagan 2.



1.6 LANDASAN HUKUM

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1). Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - 2) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - 3) UU Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).
 - 4) UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 6) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 7) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - 9) PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

10) Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009.

11) Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab III Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab V Kaedah Implementasi

BAB II

KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1. KONDISI DAN ANALISIS

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga membuka peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Selama kurun waktu lima tahun ini, berbagai kegiatan pembangunan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Namun banyak juga permasalahan dan kendala yang dihadapi, terutama berkaitan dengan masalah keterisolasian akibat karakteristik wilayah kepulauan. Berikut bahasan tentang kondisi dasar sampai saat ini, analisis proyeksi dan prediksi tersebut pada 20 tahun kedepan yang terbagi ke dalam beberapa bidang kegiatan meliputi:

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2. Demografi
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Sosial dan Budaya
5. Sarana dan Prasarana
6. Pemerintahan

Dalam bahasan kondisi dasar masing-masing bidang tersebut, di samping berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini, juga dibahas mengenai kondisi kemajuan yang telah dicapai. Sementara dalam analisis proyeksi selain pembahasan tentang proyeksi ancaman, peluang, permasalahan, juga akan dibahas proyeksi keberhasilan untuk 20 tahun ke depan berdasar data pendukung yang tersedia pada saat ini. Pada masing-masing bidang akan dibuat satu kesimpulan umum untuk memprediksikan kondisi yang akan dicapai dalam jangka panjang.

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup



1) Input

a. Topografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil. Dua pulau terbesar adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung, selain itu terdapat pula pulau-pulau besar lainnya di antaranya Pulau Lepar, Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Nado dan Pulau Batudinding.

Mengacu pada Properda dan Renstra Propinsi Kepulauan Bangka Belitung luas wilayahnya mencapai $\pm 81.724,54$ km², wilayahnya berbentuk kepulauan dengan lokasi yang terpencar. Dari luas tersebut luas daratannya mencapai $\pm 16.424,140$ km² atau 20,10% dari luas total wilayah provinsi. Secara spesifik luas daratan pulau Bangka mencapai $\pm 11.623,14$ km² dan luas Pulau Belitung mencapai $\pm 4.801,00$ km², di mana luas pesisir kepulauan Bangka Belitung mencapai $\pm 65.300,40$ km² atau sekitar 79,90% dari luas keseluruhan.

Pada tahun 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan menjadi enam kabupaten dan satu kota yaitu: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, *land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter yang berada di Kabupaten Bangka dan Gunung Menumbing yang berada di Kabupaten Bangka Barat.

Profil wilayah ini umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19%, bergelombang 41,08%, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37% merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah.

Kota Pangkalpinang umumnya relatif datar dengan kemiringan 0–15% dan ketinggiannya antara 0–30 m dpl. Topografi bergelombang dan berbukit dapat ditemukan di bagian barat–selatan kota. Topografi Kabupaten Belitung umumnya beragam dari daratan, bergelombang dan berbukit. Luas topografi datar dengan kemiringan 2–15% mencapai 347.087 ha dan tersebar di dua kabupaten serta sisanya dengan kemiringan lebih dari 40% luasnya 16.353 ha. Ketinggiannya bervariasi antara 0–500 m dpl. Bagian terbesar dari luasnya (69,55%) berada pada ketinggian antara 25–100 m dpl.

Elevasi bentang alam wilayah provinsi hampir lebih dari 90% berada di bawah 100 m dpl (di atas permukaan laut), sisanya berkisar antara 100–500 m dpl dengan demikian dapat dikatakan kemiringan lereng wilayah perencanaan pada umumnya landai dengan kemiringan dominan antara 0–15%. Sebaran lokasi-lokasi dengan kemiringan lebih dari 15% khususnya berada di daerah-daerah perbukitan yaitu pada desa-desa yang berada di ketinggian di atas 100 m dpl.

Tabel 2.1.
Ketinggian di Atas Permukaan Laut Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/*Kota	Ibukota Kabupaten	Tinggi (meter)
1	Bangka	Sungailiat	0 – 25
2	Bangka Barat	Muntok	0 – 50
3	Bangka Tengah	Koba	0 – 25
4	Bangka Selatan	Toboali	0 – 25
5	Belitung	Tanjungpandan	0 – 10
6	Belitung Timur	Manggar	0 – 07
7	*Pangkalpinang	*Pangkalpinang	0 – 25
Rata-rata			0 – 23

Sumber : Badan Pertanahan Nasional 7 Kab/Kota, 2004

Untuk wilayah-wilayah dengan kemiringan lerengnya lebih dari 40% sebaiknya dimanfaatkan sebagai kawasan lindung, khususnya yang memberikan perlindungan di bawahnya dan juga sebagai kawasan hutan lindung serta kawasan resapan air. Kawasan budidaya dapat dikembangkan di wilayah-wilayah di luar kawasan lindung yang telah ditetapkan, baik yang berupa kawasan hutan lindung, hutan lindung pantai maupun sempadan sungai/danau.

b. Struktur Litologi, Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pertambangan. Hampir diseluruh wilayah perencanaan tersebar bahan tambang. Material timah (*tin*), kaolin, kuarsa (*quartz*) dan *billitonite* (dikenal dengan “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Kandungan mineral timah di Pulau Belitung dan Pulau Bangka, telah diketahui sejak abad 18. Kegiatan penambangan timah di Indonesia dalam skala industri dimulai tahun 1920 oleh Pemerintah Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, pengelolaan penambangan berpindah tangan ke Pemerintah RI mulai tahun 1957 dan seluruh pengelolaan penambangan baru bisa dilakukan secara intensif oleh Pemerintah RI pada tahun 1962. Sejak diambil alih pemerintah RI, perusahaan penambangan timah ini mengalami beberapa kali perubahan nama, sampai akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1976 pengelolaan penambangan secara resmi dilakukan oleh PT. Tambang Timah (Persero).

Potensi pertambangan sampai saat ini masih cukup potensial. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah sistem penambangan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan tata ruang yang ada. Dan perlu diingat bahwa mineral tambang adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*) dan tidak kekal serta suatu saat mineral tersebut akan habis. Kondisi saat ini hampir di seluruh wilayah provinsi ini banyak terdapat ratusan bahkan ribuan hektar tanah rusak/kolong-kolong akibat penambangan yang tidak terkendali, terutama yang dilakukan oleh masyarakat atau sering disebut dengan istilah Tambang

Inkonvensional (TI). Operasi TI ini cenderung ilegal karena beroperasi tanpa memperhatikan konsep tata ruang yang ditetapkan dan tidak ada proses rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Akibatnya telah terjadi perusakan dan pergeseran fungsi lahan yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Belitung Sumatera yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1995, keadaan batuan pembentuk struktur geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersusun oleh beberapa satuan batuan, yang dikelompokkan atas ciri litologi dan dominasi dari setiap satuan batuan. Adapun satuan batu tersebut antara lain Endapan Aluvial, Formasi Tajam dan Formasi Kelapakampit. Batuan endapan aluvial tersebut berupa kerikil-kerakal, pasir, lanau, lempung dan pecahan koral.

◆ **Batuan Granit**

Batuan granit berdasarkan proses terbentuknya dapat dikategorikan sebagai batuan beku dan dalam proses lebih lanjut, batuan ini mengalami pelapukan terutama unsur *feldspat* membentuk suatu komposisi mineral *hidrat-silikat alumunium* yang dikenal dengan istilah populer yaitu kaolin.

◆ **Batuan Kuarsa dan Pasir**

Berdasarkan proses terbentuknya batuan ini dapat dikategorikan sebagai batuan endapan. Dilihat dari komposisi mineral yang menyusunnya merupakan butiran-butiran yang cukup besar. Di wilayah perencanaan batuan ini terjadi sebagai akibat endapan yang terbawa oleh air.

◆ **Batuan Aluvial Pasir**

Jenis batuan ini terjadi karena endapan yang disebabkan oleh aliran sungai, sehingga letaknya terdapat di sepanjang sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belitung Timur (Pulau Belitung). Batuan ini dikenal sebagai pasir kali. Berdasarkan sifat luapan air maka batuan ini luasnya menyempit di bagian hulu sungai dan semakin melebar ke bagian hilir sungai.

Keberadaan jenis tanah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari berbagai jenis tanah yaitu *aluvial*, *aluvial hidromorf*, *litisol*, *podsolik coklat*. Kondisi tanah ditinjau dari parameter tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah. Tekstur tanah merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan perbandingan relatif antara partikel-partikel tanah pasir, tanah liat, dan debu.

Tingkat kehalusan partikel tanah berturut-turut adalah pasir (paling kasar), lempung (sedang), dan debu (halus). Adapun lokasi persebaran masing-masing jenis tanah adalah sebagai berikut seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Jenis Tanah
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Luas Jenis Tanah (km ²)					Jumlah
		Aluvial	Aluvial Hidromorf	Litisol	Podsolik	Podsolik Coklat	
1	Bangka	20.28	199.62	209.32	2,521.45	0.00	2,950.67
2	Bangka Tengah	0.4	203.03	154.18	1,777.73	20.47	2,155.77
3	Bangka Selatan	27.93	413.15	415.81	2,697.45	52.74	3,607.08
4	Bangka Barat	23.03	318.10	94.01	2,385.48	0.00	2,820.62
5	Belitung	0.00	43.26	665.09	1,585.33	0.00	2,293.68
6	Belitung Timur	0.00	191.34	105.10	2,210.47	0.00	2,506.91
7	*Pangkalpinang	0.00	1.27	0.00	88.13	0.00	98.40
Total		71.64	1,369.77	1,643.49	13,266.04	73.21	16,424.14
Persentase (%)		0.44	8.34	10.01	80.77	0.45	

Sumber : Peta Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor Th.1990

Berdasarkan lokasinya, jenis tanah aluvial banyak terdapat di Kabupaten Bangka yaitu seluas 20,28 km² atau sekitar 0,69%, jenis tanah *aluvial hidromorf* banyak terdapat di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat masing-masing seluas 413,15 km² dan 318,10 km². Jenis tanah *litisol* banyak ditemukan di Kabupaten Belitung yaitu seluas 665,09 km² atau 29,00% dan jenis tanah *podsolik* banyak ditemukan di hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total mencapai 13.335,16 km² atau sekitar 81,19% dari luas wilayah ini. Adapun rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Jenis Tanah Terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004

No	Kabupaten / Kota Kecamatan	Luas Jenis Tanah (km ²)					Jumlah
		Aluvial	Aluvial Hidromorf	Litisol	Podsolik	Podsolik Coklat	
1	Bangka						
	a Sungailiat			18,23	128,15		146,38
	b Bakam		14,84	58,93	414,33		488,10
	c Pemali			15,92	111,95		127,87
	d Merawang		3,59	20,02	140,78		164,39

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025

No	Kabupaten / Kota Kecamatan	Luas Jenis Tanah (km ²)					Jumlah
		Aluvial	Aluvial Hidromof	Litisol	Podsolik	Podsolik Coklat	
e	Puding Besar		53,43		329,86		383,29
f	Mendo Barat		109,90		460,56		570,46
g	Belinyu	12,25	6,28	63,40	464,57		546,50
h	Riau Slip	8,03	11,58	32,82	471,25		523,68
	Jumlah	20,28	199,62	209,32	2.521,45	-	2.950,67
2	Bangka Tengah						
a	Koba	-	117,34	100,31	694,44	20,47	932,56
b	Sungaiselan	0,40	73,43	29,37	590,81	-	694,01
c	Simpang Kaatis	-	-	11,69	235,25	-	246,94
d	Pangkalan Baru	-	12,26	12,79	257,23	-	282,28
	Jumlah	0,40	203,03	154,16	1.777,73	20,47	2.155,79
3	Bangka Selatan						
a	Toboali	27,93	144,99	152,84	1.226,57	34,01	1.586,34
b	Payung	-	119,30	90,22	333,30	-	542,82
c	Simpang Rimba	-	46,40	4,54	311,37	-	362,31
d	Air Gegas	-	102,46	84,16	648,28	18,73	853,63
e	Lepar Pongok	-	-	84,05	177,93	-	261,98
	Jumlah	27,93	413,15	415,81	2.697,45	52,74	3.607,08
4	Bangka Barat						
A	Mentok	4,48	51,64	22,63	385,24	-	463,99
B	Kelapa	-	98,39	3,05	499,73	-	601,17
C	Tempilang	-	47,89	-	350,97	-	398,86
D	Jebus	12,62	39,22	38,39	639,89	-	730,12
E	Simpang Teritip	5,93	80,96	29,94	509,65	-	626,48
	Jumlah	23,03	318,10	94,01	2.385,48	-	2.820,62
5	Belitung						
A	Tanjungpandan	-	-	82,69	295,76	-	378,45
B	Membalong	-	43,26	226,02	640,26	-	909,54
C	Sijuk	-	-	164,27	293,93	-	458,20
D	Badau	-	-	188,62	205,37	-	413,99
E	Selat Nasik	-	-	3,49	130,01	-	133,50
	Jumlah	-	43,26	665,09	1.565,33	-	2.293,68
6	Belitung Timur						
A	Manggar	-	4,11	21,80	351,09	-	377,00
B	Dendang	-	77,58	-	527,92	-	605,50
C	Gantung	-	102,44	9,90	824,66	-	937,00
D	Kelapa Kampit	-	7,21	73,40	506,80	-	587,41
	Jumlah	-	191,34	105,10	2.210,47	-	2.506,91

No	Kabupaten / Kota Kecamatan	Luas Jenis Tanah (km ²)					Jumlah
		Aluvial	Aluvial Hidromof	Litisol	Podsolik	Podsolik Coklat	
7	*Pangkalpinang						
A	Tamansari	-	-	-	38,43	-	38,43
B	Pangkal Balam	-	0,16	-	6,40	-	6,56
C	Rangkui	-	0,20	-	7,67	-	7,87
D	Gerunggang	-	-	-	-	-	-
E	Bukit Intan	-	0,91	-	35,63	-	36,54
	Jumlah	-	1,27	-	88,13	-	89,40
	Total Luas	71,64	1.369,77	1.643,49	13.246,04	73,21	16.424,15

Sumber : Diolah dari Peta Penelitian Tanah dan Agro Klimat, Bogor Th. 1990

c. Iklim dan Curah Hujan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, di mana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 25,9°C sampai dengan 28,3°C dengan kelembaban udara terendah 72-73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

Tabel 2.4.
Klimatologi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Suhu Udara/Temperatur (°C)			Rata-rata Penyinaran Matahari
		Minimum	Maksimum	Rata-rata	
1	Januari	23.40	30.40	26.20	31.70
2	Pebruari	23.30	30.80	26.40	29.90
3	Maret	23.30	31.30	26.60	31.20
4	April	24.30	32.20	27.70	53.10
5	Mei	24.40	32.20	27.50	44.40
6	Juni	24.40	31.90	27.70	54.30
7	Juli	23.40	30.70	26.60	40.90
8	Agustus	23.80	32.10	27.70	67.70
9	September	24.50	32.60	28.30	60.80
10	Oktober	23.90	33.10	27.80	49.70
11	Nopember	24.00	32.00	27.20	52.60
12	Desember	23.50	29.90	25.90	16.70
	Rata-rata	23.85	31.60	27.13	44.42

Sumber : Departemen Perhubungan, BMG Stasiun Klimatologi Pangkalpinang, 2004

Wilayah yang dikelilingi laut menyebabkan banyak terjadi pembentukan awan dan uap air laut. Tingginya pembentukan awan mempengaruhi intensitas curah hujan di daerah ini. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 460,2 mm dan terendah pada bulan Agustus 2,40 mm. Rata-rata curah hujan dalam satu tahun adalah 159,86 mm dengan hari hujan/bulan sebanyak 16 hari. Dengan kondisi jumlah hujan seperti itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun wilayah ini tergolong memiliki bulan basah (rata-rata jumlah curah hujan bulanan >100 mm).

Berdasarkan kondisi di atas, maka pemanfaatan lahan untuk pengembangan pertanian lebih sesuai untuk pertanian lahan basah dibandingkan dengan lahan kering. Namun kendala yang ada adalah kurang tersedianya sarana irigasi, sehingga saat ini sawah yang ada sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Keadaan Cuaca di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Kelembaban Udara (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Tekanan Udara/Air (mbs)	Rata-rata Kec. Angin (knots)	Arah Angin Terbanyak
1	Januari	87	185.40	24	1.010,3	2.00	U
2	Pebruari	84	196.90	16	1.010,5	2.00	U
3	Maret	86	236.40	25	1.009,7	2.00	BL-TL
4	April	82	156.80	16	1.009,6	2.00	T
5	Mei	54	175.10	24	1.009,3	2.00	T
6	Juni	79	66.70	13	1.010.6	3.00	S
7	Juli	83	154.10	17	1.010.9	3.00	S
8	Agustus	72	2.40	1	1.010.7	6.00	TGR-S
9	September	73	4.10	9	1.010.4	5.00	T-S
10	Oktober	77	129.20	11	1.010.8	3.00	T-S
11	Nopember	81	151.00	16	1.010.0	1.00	TL
12	Desember	89	460.20	28	1.009,9	1.00	B-U
Rata-rata		81.00	159.86	16	1.010,2	2.70	

Sumber : Departemen Perhubungan, BMG Stasiun Klimatologi Pangkalpinang, 2004

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 dapat dirinci berdasarkan penggunaan lahan sawah,

penggunaan lahan bukan sawah, dan lain-lain. Penggunaan lahan sawah total mencapai 9.099 ha atau hanya sekitar 0,55%, penggunaan lahan bukan sawah mencapai 1.584.583 ha atau 96,48% dan sisanya untuk penggunaan lahan lainnya (48.372 ha atau 2,95%). Penggunaan lahan bukan sawah yang paling dominan adalah untuk permukiman/pekarangan yaitu mencapai 117.346 ha dan paling sedikit adalah untuk tambak yaitu 860 ha. Selengkapnya penggunaan lahan eksisting diperlihatkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004

No	Penggunaan Lahan	Kabupaten/*Kota							Jumlah	Persen-tase
		Bangka	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Bangka Barat	Belitung	Belitung Timur	*Pangkalpinang		
I	Lahan Sawah	1.898	-	5.995	444	388	374	-	9.099	0,55
1	Irigasi Teknis	268	-	425	-	-	-	-		
2	Irigasi Setengah Teknis	850	-	1.100	-	50	10	-		
3	Irigasi Sederhana	460	-	565	-	338	-	-		
4	Irigasi Desa/Non PU	280	-	1.600	-	-	-	-		
5	Tadah Hujan	40	-	400	320	-	364	-		
6	Pasang Surut	-	-	250	-	-	-	-		
7	Lebak	-	-	160	124	-	-	-		
8	Polder dan Sawah Lain	-	-	1.495	-	-	-	-		
II	Lahan Bukan Sawah	271.161	213.777	353.373	278.918	221.289	238.025	8.940	1.585.483	96,48
1	Pekarangan	15.751	55.306	5.675	708	27.577	9.897	2.778,88		
2	Tegal/Kebun	17.532	31.729	36.700	3.033	14.221	2.490	-		
3	Ladang/Huma	11.555	203	3.600	505	1.258	242	-		
4	Penggembalaan/Padang Rumput	2.116	-	750	72	-	2.063	-		
5	Sementara tak diusahakan	28.779	24.812	12.000	40	31.779	9.417	-		
6	Hutan Rakyat	29.789	12.648	650	67.037	32.744	701	-		
7	Hutan Negara	9.571	30.000	124.781	117.335	18.299	111.445	-		
8	Perkebunan	19.008	17.471	20.000	38.682	47.322	32.440	-		
9	*Lain-lain	137.060	41.608	149.217	51.506	48.089	69.330	6.161,12		
III	Lain-lain	22.009	2.340	1.340	2.699	7.692	12.292	-	48.372	2,95
1	Rawa tidak ditanami	21.882	1.635	1.200	1.588	7.671	12.282	-		
2	Tambak	86	55	65	611	10	3	-		
3	Kolam/Tebat/Empang	41	650	75	500	11	7	-		
	Jumlah	295.068	216.117	360.708	282.061	229.369	250.691	8.940	1.642.954	

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 7 Kabupaten/Kota, 2003

Berdasarkan fungsi hutan lindung, luas hutan lindung mencapai 186.230,50 ha atau 27,22% dari total luas kelompok hutan di wilayah provinsi Bangka Belitung. Untuk hutan lindung terluas terdapat di Kabupaten Bangka Tengah dengan total luas mencapai 50.425,00 ha atau 27,08%, dan paling sedikit di Kabupaten Bangka seluas 11.413,00 ha atau 6,13%.

Luas kawasan hutan produksi diseluruh wilayah mencapai 465.966,25 ha atau 68,11% dari total luas kelompok hutan di wilayah provinsi. Untuk hutan produksi terluas terdapat di Kabupaten Bangka Selatan dengan total luas mencapai 117.922,00 ha atau 25,31% dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung seluas 52.164,00 ha atau 11,19%. Selain hutan lindung dan hutan produksi, di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat hutan konversi dengan luas 31.961,00 ha atau 4,67% dari total luas kelompok hutan di wilayah provinsi. Hutan konversi terluas terdapat di Kabupaten Bangka dengan total luas mencapai 143.395 ha dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung seluas 1.385,00 ha.

Tabel 2.7.
Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No.	Kabupaten/*Kota	Fungsi Hutan					Total Luas Hutan (ha)	%
		Hutan Lindung		Hutan Produksi		Hutan Konvensi		
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(%)		
1	Bangka	11.413,00	6,13	73.638,00	15,80	14.395,00	99.446,00	14,54
2	Bangka Barat	50.425,00	27,08	63.987,00	13,73	6.069,00	120.481,00	17,61
3	Bangka Tengah	24.394,00	13,10	117.922,00	25,31	1.712,00	144.028,00	21,05
4	Bangka Selatan	23.050,00	12,38	91.150,00	19,56	8.400,00	122.600,00	17,92
5	Belitung	33.242,00	17,85	52.164,00	11,19	1.385,00	86.791,00	12,69
6	Belitung Timur	43.706,50	23,47	67.105,25	14,40	-	110.811,75	16,2
7	*Pangkalpinang	0	0	-	-	-	-	0
	Jumlah	186.230,50	100,01	465.966,25	99,99	31.961,00	684.157,75	100,01
	Persentase (%)	27,22		68,11		4,67	100,00	

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan 7 Kabupaten/Kota, 2003

Salah satu masalah penggunaan lahan yang paling penting adalah masalah berkurangnya luas hutan karena dijadikan ladang atau untuk dibangun sarana-prasana seperti jalan raya. Cara umum yang digunakan penduduk untuk membuka hutan adalah dengan melakukan pembakaran. Cara pembukaan hutan yang ilegal tersebut dapat menyebabkan terjadinya bahaya kebakaran hutan

dalam skala luas. Bahkan efek samping dari kebakaran hutan tersebut dapat menyebabkan terjadinya polusi udara yang disebabkan oleh asap kebakaran sehingga pada akhirnya dapat memicu munculnya penyakit ISPA bagi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.8.
Pergeseran Fungsi Hutan Lindung
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003–2004

No.	Kabupaten/*Kota	Luas Hutan Lindung (ha)		Pergeseran (ha)	Persentase Pergeseran (%)
		Tahun 2003	Tahun 2004		
1	Bangka	37.535,50	11.413,00	(26.122,50)	-69,59
2	Bangka Barat	19.095,50	50.425,00	31.329,50	164,07
3	Bangka Tengah	37.833,50	24.394,00	(13.439,50)	-35,52
4	Bangka Selatan	43.599,50	23.050,00	(20.549,50)	-47,13
5	Belitung	33.242,50	33.242,00	(0,50)	-
6	Belitung Timur	47.508,50	43.706,50	(3.802,00)	(8,00)
7	*Pangkalpinang	-	-	-	-
	Jumlah	218.815,00	186.230,50	(32.584,50)	-15,66

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 2.9.
Pergeseran Fungsi Hutan Produksi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003–2004

No.	Kabupaten/*Kota	Luas Hutan Produksi (ha)		Pergeseran (ha)	Persentase Pergeseran (%)
		Tahun 2003	Tahun 2004		
1	Bangka	73.696,00	73.638,00	(58,00)	-0,08
2	Bangka Barat	66.987,00	63.987,00	(3.000,00)	-4,48
3	Bangka Tengah	117.992,00	117.922,00	(70,00)	-0,06
4	Bangka Selatan	91.150,00	91.150,00	-	-
5	Belitung	49.065,00	52.164,00	3.099,00	6,32
6	Belitung Timur	72.115,00	67.105,25	(5.009,75)	-6,95
7	*Pangkalpinang	-	-	-	-
	Jumlah	471.005,00	465.966,25	(5.038,75)	-1,07

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel 2.8 dan tabel 2.9 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran hutan pada masing-masing fungsi hutan. Untuk hutan lindung secara keseluruhan telah mengalami pengurangan luas sekitar 34.587 ha atau sekitar 15,66%, dan pengurangan terbesar terjadi di Kabupaten Bangka yaitu seluas 26.122,50 ha

atau 69,59%, sementara di Kabupaten Bangka Tengah luas hutan lindung bertambah dari 19.095 ha pada tahun 2003 menjadi 50.425,00 ha pada tahun 2004 atau mengalami pertambahan seluas 164,07%. Sedangkan pada hutan produksi mengalami pengurangan luas total sekitar 5.038,75 ha atau sekitar 1,07%. Pengurangan terbesar terjadi di Kabupaten Belitung Timur yaitu 5.009 ha atau 6,95% dan untuk Kabupaten Belitung, hutan produksi justru mengalami penambahan luas sekitar 3.009,75 ha atau 6,32%.

1.1) Permasalahan

Berdasarkan uraian kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka secara ringkas permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- (1) Lokasi wilayah yang terpisah dan tersebar yang disebabkan oleh kondisi geografis wilayah kepulauan, menyebabkan kesulitan dalam mengakses daerah tersebut, sehingga cakupan pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi tidak merata.
- (2) Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (*illegal logging*).
- (3) Masih rendahnya penegakan hukum dalam kasus pemanfaatan sumberdaya alam seperti *illegal fishing*, atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.
- (4) Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain.
- (5) Keterbatasan tenaga, anggaran, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak sebanding dengan luas wilayah dan masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

1.2.) Capaian Keberhasilan

Berikut ini akan dibahas beberapa capaian keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lingkup geomorfologi dan lingkungan hidup.

- (1) Terealisasinya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan hasil antara lain Magang Analisis Laboratorium Bagi Laboran, Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan AMDAL Bagi Pengusaha.
- (2) Terbentuknya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya yang meliputi Pemagaran Kolong Air Minum Permai, Pemagaran Sumber Air Baku Tebat Gadong, dan Pengerukan/Penggalian Kolong Yamin.
- (3) Berjalannya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya yang meliputi Pembangunan Saluran Pembuangan Primer, Penyusunan DED Air Klubi, Jangkar asam, Sp. Pesak.
- (4) Terealisasinya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang meliputi Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan DED Pengelolaan Kolong secara terpadu.
- (5) Terealisasinya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi Pemulihan dan Pemberdayaan Lahan Pasca Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2) Analisis

2.1) Proyeksi Peluang

Berikut beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung bidang geomorfologi dan lingkungan hidup dalam rangka perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.

- (1) Adanya dukungan potensi sumberdaya alam terutama ikan dan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai modal bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.
- (2) Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdekatan dengan negara Malaysia merupakan salah satu keunggulan lokasi sehingga di masa yang akan datang dapat mendorong perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
- (3) Kondisi morfologi yang khas dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan peluang untuk dijadikan sebagai tempat wisata yang berbasis lingkungan (ekowisata), terutama wisata pantai.

2.2) Proyeksi Ancaman

Dalam upaya mencapai hasil pembangunan yang maksimal, berikut beberapa faktor penghambat bidang morfologi dan lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

- (1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam konteks regional merupakan daerah penyangga bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu, apabila kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas maka dapat memicu perubahan kualitas dan kuantitas ekosistem dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyadari arti penting posisi wilayahnya yang berfungsi bagi penyangga bagi wilayah lain dalam konteks lingkungan tersebut.
- (2) Potensi pertambangan sampai saat ini masih cukup potensial. Namun jika sistem penambangan yang dilakukan tidak ramah lingkungan dan sesuai dengan tata ruang yang ada, maka tanah rusak/kolong-kolong akibat penambangan akan terus meluas. Dan perlu diingat bahwa mineral tambang adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan tidak kekal serta suatu saat mineral tersebut akan habis.

2.3) Proyeksi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang berpotensi untuk muncul dalam pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang adalah:

- (1) Perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah yang masih kaya akan SDA. Sumberdaya alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kebijakan pembangunan yang dibuat hanya mengejar peningkatan ekonomi semata maka yang terjadi adalah perusakan lingkungan. Oleh sebab itu perumusan kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga.
- (2) Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
- (3) Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Kekayaan SDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daya tarik bagi para investor. Masuknya para investor selain memberikan keuntungan juga dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang lebih kompleks. Masalah-masalah lingkungan yang muncul akan semakin parah apabila sistem pemantauan dan pengendalian terhadap pencemaran air, tanah, udara masih lemah.
- (5) Tidak dilibatkannya masyarakat khususnya masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA akan semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup dan kelestarian alam
- (6) Kondisi daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam yang semakin menurun.

2.4) Proyeksi Keberhasilan

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung, penghambat, maupun potensi permasalahan yang akan muncul di bidang geomorfologi dan lingkungan hidup, maka dalam jangka panjang akan dicapai kondisi sebagai berikut:

- (1) Dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, akan terwujud sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- (2) Dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang akan terwujud suatu sistem perencanaan pengelolaan pembangunan lingkungan hidup di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Kapasitas lembaga pengelola SDA dan lingkungan hidup akan semakin optimal dalam memainkan peran dan fungsinya.
- (4) Dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, akan terwujud suatu masyarakat yang mempunyai sikap kesadaran tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan SDA.
- (5) Terwujudnya sistem informasi pengelolaan SDA dan kebakaran hutan.

3) Output

Dalam lingkup geomorfologi dan lingkungan hidup, diprediksikan untuk 20 tahun ke depan, pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai konsekuensi dari pembangunan tersebut maka kebutuhan lahan sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan akan semakin bertambah. Akan terjadi pembukaan hutan dalam skala luas yang mengakibatkan terjadi pengurangan luasan kawasan lindung. Hal tersebut akan membawa dampak bagi keseimbangan ekosistem bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun lingkup wilayah yang lebih luas.

Seiring dengan pesatnya pembangunan maka pencemaran air, udara, dan tanah juga akan semakin bertambah. Semboyan kelestarian lingkungan akan menjiwai pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dapat terwujud karena besarnya komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan pembangunan yang

berwawasan lingkungan hidup. Peranan masyarakat sebagai pengelola lingkungan hidup akan semakin maksimal. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya tingkat pendidikan yang menjadikan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kelestarian lingkungan hidup dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

2.1.2 Demografi



1) Input

Kondisi demografi mempunyai kedudukan yang sentral dalam pembangunan daerah, yaitu kedudukannya sebagai subyek pembangunan dan juga sekaligus sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan diharapkan dengan jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan ekonomis diantaranya biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya persediaan tenaga kerja. Dalam lingkup perencanaan, sebagai subyek, penduduk membuat perencanaan yang diwakili oleh perencana. Sedangkan sebagai obyek pembangunan mengandung arti bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pembangunan sasarannya adalah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Dalam hal perencanaan, tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok dalam proses perencanaan.

Tabel 2.10.
Perkembangan Penduduk Masing–Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003–2004

No	Kabupaten/Kota	Tahun			Perkembangan	
		2002* (jiwa)	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2002-2003 (%)	2003-2004 (%)
1	Bangka	579,225	222,875	231,793	8.01	4.00
2	Bangka Tengah		124,175	129,469		4.26
3	Bangka Selatan		143,909	147,039		2.17
4	Bangka Barat		134,652	140,323		4.21
5	Belitung	206,701	130,948	134,781	4.35	2.93
6	Belitung Timur		84,744	88,065		3.92
7	*Pangkalpinang	127,942	134,728	141,185	5.30	4.79
	Jumlah	913,868	976,031	1,012,655		
	Rerata				5.89	3.75

Ket : 2002*) Untuk tahun 2002, data statistik menurut Kab/Kota masih menggunakan Kab/Kota sebelum pemekaran.

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2004, mencapai 1.012.655 jiwa, dengan Kabupaten Bangka yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 231.793 jiwa atau sekitar 22,89% dari total populasi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 88.065 jiwa (8,70%). Dibandingkan dengan tahun 2003 yang tercatat sebesar 976.031 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 3,75% per tahun. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibanding laju pertumbuhan sebelumnya yaitu tahun 2002–2003 yang mencapai 5.89%. Kontribusi laju pertumbuhan penduduk terbesar pada periode 2003–2004 berasal dari Kabupaten Pangkalpinang sebesar 4,79%, dan Kabupaten Bangka Selatan menyumbang laju pertumbuhan penduduk terkecil sebesar 2,17% (Tabel 2.10).

Dilihat dari penyebarannya dan kepadatannya, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak merata di masing-masing kabupaten. Pada tahun 2004, Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk mencapai 231.793 jiwa. Dengan kepadatan rata-rata 270 jiwa/km², Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang terpadat penduduknya yakni sebesar 1.579 jiwa/km², Sedang kabupaten dengan rata-rata kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 30 jiwa/km² (Tabel 2.11).

Tabel 2.11.
Kepadatan Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk		Jumlah Rumah Tangga (kk)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
			(jiwa)	Persentase (%)		
1	Bangka	2,950.68	231,793	22.89	53,901	79
2	Bangka Tengah	2,155.77	129,469	12.79	29,996	60
3	Bangka Selatan	3,607.08	147,039	14.52	34,775	41
4	Bangka Barat	2,820.61	140,323	13.86	32,832	50
5	Belitung	2,293.69	134,781	13.31	34,463	59
6	Belitung Timur	2,506.91	88,065	8.70	22,305	35
7	*Pangkalpinang	89.40	141,185	13.94	34,656	1,579
Jumlah		16,424.14	1,012,655		242,928	

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Pada tahun 2004 jumlah rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 242.928 rumah tangga dengan komposisi jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kabupaten Bangka sebanyak 53.901 rumah tangga. Dari 7 kabupaten/kota di wilayah ini, rata-rata kepadatan rumah tangga mencapai 4 jiwa/kk.

Dari sisi dinamika kependudukan, menunjukkan telah terjadinya proses migrasi penduduk antar wilayah yang ada. Pada tahun 2004 terjadi sejumlah penduduk yang melakukan perpindahan keluar wilayah. Perpindahan ini mengindikasikan adanya permasalahan yang mencakup ketidakcukupan kesempatan kerja. Di sisi lain, terjadi perpindahan penduduk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan adanya daya tarik potensi ekonomi dalam wilayah bersangkutan.

Berdasar struktur penduduk yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2004 mayoritas penduduk berada pada kelompok umur produktif 15–64 tahun yang mencapai jumlah 670.861 jiwa atau 66,25%, jumlah penduduk untuk kelompok umur 0–14 tahun adalah 304.651 jiwa atau 30,08% dan sisanya berumur >65 tahun sebanyak 37.143 jiwa atau 3,67% dari total penduduk provinsi. Dilihat dari masing-masing kabupaten tampak beberapa daerah memiliki struktur umur muda dengan mayoritas penduduk usia 0–14 tahun.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Jiwa)						Jumlah
		0–14 Tahun	(%)	15–64 Tahun	(%)	>65 Tahun	(%)	
1	Bangka	70,569	23.16	152,496	22.73	8,728	23.50	231,862
2	Bangka Tengah	38,506	12.64	85,940	12.81	5,023	13.52	129,508
3	Bangka Selatan	44,199	14.51	97,074	14.47	5,766	15.52	147,084
4	Bangka Barat	42,544	13.96	92,678	13.81	5,101	13.73	140,365
5	Belitung	40,168	13.96	90,289	13.46	4,324	11.64	134,820
6	Belitung Timur	26,095	8.57	59,214	8.83	2,756	7.42	88,090
7	*Pangkalpinang	42,570	13.97	93,170	13.89	5,445	14.66	141,228
Jumlah		304,651		670,861		37,143		1,012,655
Persentase (%)			30.08		66.25		3.67	

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Dilihat dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 yang mencapai 494.250 jiwa atau 67,10% dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 707.683 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara umum mencapai 68,92% untuk total empat kabupaten di Pulau Bangka, 65,81% untuk Belitung dan Belitung Timur dan 60,80% untuk kota Pangkajene. Dengan rata-rata TPAK sebesar 67,10 pada tahun 2004 ini, berarti telah terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 69,20%. Ini berarti telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran dari jumlah angkatan kerja yang ada, dimana jumlah yang bekerja mencapai 435.917 dengan tingkat pengangguran sebesar 8,20 yang lebih rendah dari angka sebelumnya yang mencapai 9,40.

Dari jumlah tenaga kerja yang ada, komposisi mata pencaharian penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama, yang jumlahnya 189.798 atau mencapai 43,54%, diikuti dengan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,35%. Sedangkan jumlah pekerja paling rendah berada di sektor listrik, gas dan air minum yang hanya mencapai 741 pekerja atau 0,17%.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Lapangan Pekerjaan	Pekerja	Persentase
		(Jiwa)	(%)
1	Pertanian	189,798	43.54
2	Pertambangan dan Penggalian	75,632	17.35
3	Industri Pengolahan	21,404	4.91
4	Listrik, Gas & Air Minum	741	0.17
5	Bangunan	20,488	4.70
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	68,962	15.82
7	Angkutan dan Komunikasi	14,472	3.32
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3,182	0.73
9	Jasa Kemasyarakatan	39,843	9.14
10	Lainnya	1,395	0.32
Jumlah		435,917	100.00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Jumlah rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05), yang dikenal dengan Sensus Kemiskinan 2005, mencapai 33.652 rumah tangga

atau sebesar 13,61% dari keseluruhan rumah tangga yang berjumlah 247.265 rumah tangga. Banyaknya rumah tangga miskin ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan harga BBM khususnya bensin yang terjadi di bulan Maret dari Rp1.800 per liter menjadi Rp2.400 per liter atau naik 33,33%, dan kenaikan di bulan Oktober dari Rp2.400 per liter menjadi Rp4.500 per liter atau naik 87,5%. Kendati demikian, jumlah dan persentase rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah paling kecil dibanding provinsi lain.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, berdasarkan kelompok sejahtera, jumlah KK yang termasuk dalam kelompok prasejahtera mencapai 28.563 KK atau 11,80% dari seluruh KK yang ada. Jumlah terbesar berada di Kabupaten Bangka Barat yang mencapai 8.764 KK. Sebaliknya untuk KK dengan kelompok sejahtera III+ hanya sebesar 1,25% dan mayoritas berada di kabupaten Belitung.

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Sejahtera					Jumlah	Jumlah Keluarga (jiwa)	Tingkat Hunian (jiwa/kel)
		Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III +			
1	Bangka	8.692	15.504	22.787	8.890	61	55.934	53,901	4
2	Bangka Tengah	4.138	9.736	11.562	4.590	53	30.079	29,996	4
3	Bangka Selatan	4.938	7.999	16.746	3.868	135	33.686	34,775	4
4	Bangka Barat	8.764	8.034	13.578	2.653	153	33.182	32,832	4
5	Belitung	846	11.731	8.932	12.666	1.753	35.928	34,463	4
6	Belitung Timur	1.157	5.505	8.535	8.393	763	24.353	22,305	4
7	*Pangkalpinang	28	8.830	10.015	13.234	113	32.220	34,656	4
Total		28.563	67.339	92.155	54.294	3.031	245.382	242.928	
Persentase		11,80	27,83	38,08	2,44	1,25			

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selama 5 tahun terakhir perkembangan ekonomi daerah belum dapat mengimbangi meningkatnya angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Akibatnya jumlah angkatan kerja tahun 2005 mencapai 485.514 orang, bertambah menjadi 10.658 orang dibanding tahun 2004 sebesar 474.856 orang. Jumlah penduduk yang bekerja dalam tahun 2005 mencapai 446.174 orang, dengan jumlah pengangguran baru mencapai 39.340 orang. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2005 sebesar 8,10%, lebih rendah sedikit dibanding tahun 2004 yang mencapai sebesar 8,20%. Selain

masalah pengangguran terbuka, masalah ketenagakerjaan lain adalah kecenderungan penurunan lapangan kerja formal dalam beberapa tahun terakhir. Menurunnya jumlah lapangan kerja formal menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja informal. Kebanyakan pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal bekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya upah riil yang diterima relatif rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan. Membesarnya lapangan kerja informal telah menyebabkan perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Sementara itu adanya kecenderungan peningkatan upah pekerja di sektor pertambangan dan penggalian tanpa mempertimbangkan produktivitas akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Masalah penambangan ilegal mewarnai kondisi ketenagakerjaan daerah, khususnya terkait dengan masalah sosial ekonomi dan lingkungan hidup.

1.1) Permasalahan

Berdasarkan data yang ada, pada saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi beberapa permasalahan bidang demografi sebagai berikut:

- (1) Seperti juga di daerah lain pada umumnya, permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi. Khusus untuk Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah terpadat berpotensi terhadap tingginya beban permasalahan perkotaan yang dihadapi.
- (2) Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.
- (3) Struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.

- (4) Jumlah keluarga (KK) yang masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera pada tahun 2004 mencapai 28.563 KK atau 11,80% dari total 245,382 keluarga.
- (5) Angka pengangguran cukup tinggi, misalnya tahun 2004 sebesar 8,20% dari total penduduk, kendati menurun sedikit pada tahun 2005 menjadi 8,10%. Angka tersebut cukup tinggi untuk ukuran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan rata-rata daerah lain disekitarnya.
- (6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 67,10% di tahun 2004 menjadi 65,0% pada tahun 2005.

1.2) Capaian Keberhasilan

Beberapa program pelaksanaan pembangunan bidang demografi telah mencapai beberapa keberhasilan sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk sebesar 4,03% per tahun pada tahun 2004.
- (2) Penurunan jumlah penduduk miskin dan penciptaan lapangan kerja dan usaha peningkatan pelayanan keterampilan/pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan dalam rangka pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin serta langkah-langkah lain dalam rangka memperbaiki kualitas pertumbuhan, sehingga jumlah penduduk miskin diperkirakan menurun.

2) Analisis

2.1) Proyeksi Peluang

Dalam bidang demografi, analisis proyeksi peluang ini memberikan gambaran tentang berbagai informasi dan kondisi yang bersifat positif dalam mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan manusia ini pada intinya adalah peningkatan kualitas manusia sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya. Beberapa hal yang dapat memberi peluang lebih baik bagi peningkatan kualitas penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam jangka panjang sebenarnya masih terbuka peluang bagi peningkatan usia harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peluang untuk meningkatkan usia harapan hidup penduduk di atas 70 tahun dengan cara meningkatkan kualitas penduduk dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan adanya peningkatan akses terhadap fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap berkurang, tetapi jumlahnya masih relatif tinggi yaitu sekitar 4,03%. Namun dilihat dari angka kepadatan penduduk yang berkisar 61 orang/km² pada tahun 2004 menunjukkan angka yang relatif rendah. Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan penyebaran penduduk harus terus ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu.
- (3) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 20 tahun yang akan datang dapat mengarahkan komposisi demografi yang ideal, yang mana terjadi keseimbangan dan harmonisasi antara penduduk usia produktif dengan nonproduktif.
- (4) Penduduk usia kerja pada tahun 2004 sebesar 670,861 jiwa (66.25%). Dengan kondisi dominannya jumlah penduduk produktif, merupakan faktor peluang yang sangat berarti sebagai modal pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2) Proyeksi Ancaman

Ancaman terhadap pembangunan kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada intinya datang dari rendahnya kualitas penduduk, rendahnya akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta keterisolasian dari daerah lainnya. Berikut adalah beberapa kondisi yang berkaitan dengan berbagai ancaman terhadap kualitas penduduk yang diproyeksikan akan muncul.

- (1) Ancaman utama terhadap rendahnya kualitas penduduk datang dari rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Masalah yang terjadi di bidang kependudukan tersebut jika tidak ditangani dengan baik secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi aspek lain dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Masalah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Walaupun jumlah keluarga prasejahtera cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2004, namun kelompok tersebut baru berpindah ke golongan keluarga sejahtera I saja, belum terjadi lompatan yang signifikan ke kelompok berikutnya. Meskipun jumlah kemiskinan sudah dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
- (3) Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh dimensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lainnya. Ini mendukung adanya konsep pembangunan manusia seutuhnya, meliputi moral, sosial, ekonomi dan dimensi lainnya.
- (4) Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi masalah kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Derajat kesehatan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai indikator yang berkaitan satu sama lain.

2.3) Proyeksi Permasalahan

Permasalahan bidang demografi yang akan dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka panjang, meliputi antara lain:

- (1) Terjadinya struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah.
- (2) Akses terhadap fasilitas kesehatan yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan belum menunjukkan hasil yang optimal. Rendahnya fasilitas kesehatan akan sangat mempengaruhi kualitas penduduk pada masa yang akan datang.
- (3) Rendahnya prosentasi pengeluaran rumah tangga dalam bidang pendidikan menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi di bidang sumber daya manusia. Kondisi ini akan menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.4) Proyeksi Keberhasilan

Keberhasilan bidang demografi yang diproyeksikan dapat dicapai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

- (1) Meningkatnya Indek Harapan Hidup (IHH) serta tercapainya usia harapan hidup di atas 70 tahun.
- (2) Rata-rata pertumbuhan penduduk kurang dari 1% per tahun serta meningkatnya persebaran penduduk di berbagai kabupaten.
- (3) Berkurangnya angka kemiskinan dengan terjadinya peningkatan Indek Pembangunan Manusia dan menurunnya angka Indek Kemiskinan Manusia.
- (4) Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan,
- (5) Meningkatnya kualitas penduduk dan berkurangnya tingkat pengangguran.

3) Output

Prediksi kondisi demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, akan menunjukkan struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini terlihat dari semakin kecilnya jumlah

kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Secara umum tingkat kepadatan penduduk akan semakin besar. Peningkatan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang masih di atas 0% per tahun dan masih adanya arus urbanisasi. Selain itu komposisi penduduk yang ada akan semakin heterogen. Peningkatan heterogenitas penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akibat dari dampak globalisasi yang menunjukkan terjadinya arus migrasi antar daerah dan negara.

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1) Input



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator kemajuan ekonomi suatu daerah. Variabel ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai nilai produksi barang dan jasa suatu daerah selama satu tahun. Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.15 untuk perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan tabel 2.16 PDRB atas dasar harga konstan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 bernilai 6,104 triliun rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2005 menjadi sebesar 13,387 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, total PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 bernilai 6,104 triliun rupiah dan terus meningkat sampai pada tahun 2005 menjadi sebesar 8,225 triliun rupiah.

Dalam kurun waktu tersebut, sumbangan pada total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh sektor Pertanian dan Industri Pengolahan, dengan rata-rata 21,73% dan 25,14% (atas harga berlaku). Sedangkan atas harga konstan, rata-rata menyumbang 24,71% dan 24,09%. Pada rangking berikutnya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang menyumbang rata-rata 18,70% atas harga berlaku dan 16,98% atas harga konstan. Peringkat ketiga terbesar adalah sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran yang menyumbang 15,31% atas harga berlaku dan 15,54% atas harga konstan. Sektor yang menyumbang laju pertumbuhan ekonomi terkecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih yaitu sebesar 0,72% atas harga berlaku dan 0,59% atas harga berlaku.

Tabel 2.15.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2000–2005 (Juta Rp.)

No	A Sektor	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Pertanian	1,553,110	25.44	1,696,120	23.82	1,803,834	22.11	1,968,787	20.57	2,194,934	19.81	2,490,802	18.61
2	Pertambangan dan Penggalian	859,711	14.08	1,046,406	14.69	1,267,960	15.54	1,934,439	20.21	2,529,363	22.83	3,323,053	24.82
3	Industri Pengolahan	1,558,687	25.53	1,866,092	26.21	2,171,942	26.62	2,367,379	24.73	2,685,585	24.24	3,146,143	23.50
4	Listrik, Gas & Air Bersih	36,271	0.59	44,953	0.63	60,571	0.74	78,957	0.82	87,558	0.79	99,009	0.74
5	Bangunan	333,209	5.46	374,975	5.27	438,138	5.37	493,564	5.16	551,840	4.98	729,480	5.45
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	992,405	16.26	1,193,640	16.76	1,312,239	16.08	1,406,699	14.70	1,584,778	14.30	1,840,534	13.75
7	Pengangkutan & Komunikasi	205,330	3.36	253,224	3.56	293,290	3.59	326,314	3.41	376,818	3.40	466,538	3.48
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	252,801	4.14	285,629	4.01	322,036	3.95	347,057	3.63	369,843	3.34	407,939	3.05
9	Jasa-Jasa	312,712	5.12	360,051	5.06	488,322	5.99	648,547	6.78	700,035	6.32	884,239	6.60
Total		6,104,236		7,121,090		8,158,333		9,571,743		11,080,753		13,387,737	
Penduduk						913.868		976.031		1.021.655		1.043.455	
Income per Capita						8.927.255		9.806.802		10.845.885		12.830.201	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005.

Tabel 2.16.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000–2005 (Juta Rp.)

No	Sektor	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Pertanian	1,553,110	25.44	1,681,187	26.02	1,765,419	25.57	1,803,586	23.36	1,887,671	23.69	1,990,628	24.20
2	Pertambangan dan Penggalian	859,711	14.08	889,917	13.77	1,023,980	14.83	1,619,193	20.97	1,570,365	19.71	1,520,959	18.49
3	Industri Pengolahan	1,558,687	25.53	1,621,407	25.09	1,705,164	24.70	1,744,045	22.59	1,839,803	23.09	1,935,242	23.53
4	Listrik, Gas & Air Bersih	36,271	0.59	38,800	0.60	41,243	0.60	43,670	0.57	46,238	0.58	47,819	0.58
5	Bangunan	333,209	5.46	355,447	5.50	383,421	5.55	411,969	5.34	443,733	5.57	469,750	5.71
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	992,405	16.26	1,076,483	16.66	1,111,179	16.09	1,138,186	14.74	1,180,703	14.82	1,207,053	14.67
7	Pengangkutan & Komunikasi	205,330	3.36	215,059	3.33	229,304	3.32	244,224	3.16	260,557	3.27	278,437	3.38
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	252,801	4.14	263,174	4.07	270,884	3.92	279,676	3.62	287,987	3.61	296,072	3.60
9	Jasa-Jasa	312,712	5.12	320,400	4.96	374,092	5.42	435,163	5.64	449,794	5.65	479,745	5.83
	Total	6,104,236		6,461,875		6,904,687		7,719,713		7,966,849		8,225,704	
	Penduduk					913.868		976.031		1.021.655		1.043.455	
	Income per Capita					7.555.453		7.909.291		7.797.798		7.883.142	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005.

Melihat pada PDRB perkapita, menyiratkan besarnya potensi ekonomi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PDRB Perkapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam harga berlaku dari tahun 2000 sampai tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 atas harga berlaku mencapai Rp12.230.021. Sementara jika dihitung dalam harga konstan PDRB dalam kurun waktu tersebut, perkembangannya fluktuatif meskipun tidak terlalu besar. Pada tahun 2005 PDRB perkapita sebesar Rp7.883.142.

Tabel 2.17 menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara tahun 2000 sampai 2005 atas dasar harga berlaku. Untuk PDRB tanpa migas, pertumbuhannya dihitung sejak tahun 2004, dan menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2004 sebesar 15,77% menjadi 20,82% di tahun 2005. sedangkan laju pertumbuhan PDRB tanpa migas mengalami penurunan antara tahun 2001 sampai tahun 2003, tetapi di tahun berikutnya meningkat kembali dan mencapai 20,67% pada tahun 2005.

Tabel 2.17.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Usaha
ADH Berlaku Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000–2005
(Persen)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1	Pertanian	9,21	6,35	9,14	11,49	13,48	9,93
2	Pertambangan dan Penggalian	21,72	21,17	52,56	30,75	31,38	31,52
3	Industri Pengolahan	19,72	16,39	9	13,44	17,15	15,14
4	Listrik, Gas & Air Bersih	23,94	34,74	30,35	10,89	13,08	22,60
5	Bangunan	12,53	16,84	12,65	11,81	32,19	17,20
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	20,28	9,94	7,2	12,66	16,14	13,24
7	Pengangkutan & Komunikasi	23,33	15,82	11,26	15,48	23,81	17,94
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	12,99	12,75	7,77	6,57	10,3	10,08
9	Jasa-Jasa	15,14	35,63	32,81	7,94	26,31	23,57
PDRB DENGAN MIGAS		-	-	-	15,77	20,82	
PDRB TANPA MIGAS		16,66	14,57	11,56	16,22	20,67	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005.

Tabel 2.18 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2001–2005 atas dasar konstan. Untuk PDRB tanpa migas, pertumbuhannya dihitung sejak tahun 2004, dan menunjukkan kenaikan dari tahun 2004 sebesar 3,20% menjadi 3,25% di

tahun 2005. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB tanpa migas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, seperti kenaikan sebesar 6,85% pada tahun 2002 tidak dapat dipertahankan pada tahun 2003 dan 2004 meskipun pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 4,50%.

Tabel 2.18.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Usaha
ADH Konstan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000–2005

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Pertanian	8,25	5,01	2,16	4,66	5,45	5,11
2	Pertambangan dan Penggalian	3,51	15,06	58,13	-3,02	-3,15	14,11
3	Industri Pengolahan	4,02	5,17	2,28	5,49	5,19	4,43
4	Listrik, Gas & Air Bersih	6,97	6,3	5,88	5,88	3,42	5,69
5	Bangunan	6,67	7,87	7,45	7,71	5,86	7,11
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,47	3,22	2,43	3,74	2,23	4,02
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,74	6,62	6,51	6,69	6,86	6,28
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,1	2,93	3,25	2,97	2,81	3,21
9	Jasa-Jasa	2,46	16,76	16,33	3,36	6,66	9,11
PDRB DENGAN MIGAS		-	-	-	3,20	3,25	
PDRB TANPA MIGAS		5,86	6,85	5,06	4,31	4,50	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005.

a. Sektor Pertanian dan Kehutanan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang kontribusinya mendominasi bagi PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, rata-rata lebih dari seperlima (lebih dari 20%) selama kurun waktu 2000–2005 PDRB Provinsi ini disumbang dari sektor tersebut meskipun mengalami penurunan jika ditilik dari pertumbuhannya.

Dari beberapa jenis tanaman pangan yang dihasilkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004, produksi terbesar berasal dari tanaman ubi kayu yang mencapai 9.809,14 ton. Pada peringkat berikutnya disusul oleh produksi padi (padi sawah sebesar 4.612,19 ton dan padi ladang

sebesar 1.707,72 ton), ubi jalar sebesar 4.674,62 ton, jagung sebesar 1.765,13 ton serta kacang tanah mencapai 400,07 ton.

Tabel 2.19.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No.	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Padi Sawah	3.894,00	2.495,00	4.612,19	1,85
2	Padi Ladang	1.997,00	1.862,00	1.707,72	0,92
3	Jagung	773,70	570,00	1.765,13	3,10
4	Kedelai	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kacang Tanah	495,50	337,00	400,07	1,19
6	Kacang Hijau	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ubi Kayu	985,50	1.045,75	9.809,14	9,38
8	Ubi Jalar	593,00	658,00	4.674,62	7,10
Jumlah		8.738,70	6.967,75	22.968,86	23,53

Sumber: Dinas Pertanian & Kehutanan Kab/Kota 2005, diolah.

Ditinjau dari sisi konsumsi, apabila mengacu pada rata-rata konsumsi beras penduduk Indonesia yang sebesar 130 kg/kapita/tahun, maka dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.012.655 jiwa pada tahun 2004, maka akan dibutuhkan sekitar 131.645,15 ton beras. Ini berarti terjadi defisit produksi padi dari konsumsinya sehingga diperlukan untuk mendatangkan beras dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau dilakukan diversifikasi pangan dengan jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Dalam kaitan tanaman pangan non-padi yang bisa dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat produksi jagung, ubi kayu serta ubi jalar cukup lumayan untuk dijadikan sebagai penyangga. Produksi jagung pada tahun 2004 sebesar 1.765,13 ton ternyata sebagian besar dihasilkan di Kabupaten Bangka Selatan. Sementara produksi ubi kayu sebesar 9.809,14 ton juga sebagian besar dihasilkan oleh Kabupaten Bangka Selatan. Demikian halnya dengan produksi ubi jalar yang sebesar 4.674,62 ton kebanyakan dihasilkan oleh Kabupaten Bangka Selatan. Ini menunjukkan besarnya kontribusi Kabupaten Bangka Selatan sebagai penyangga pangan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain produksi tanaman pangan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghasilkan komoditi pertanian lain yang berupa sayuran serta buah-buahan serta tanaman obat. Dari data Dinas Pertanian, menunjukkan sekali lagi bahwa wilayah Kabupaten Bangka Selatan menjadi produsen utama komoditi pertanian (tanaman pangan maupun non pangan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perkebunan sawit adalah sub sektor perkebunan yang penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tahun 2004, luas areal pencadangan perkebunan sawit total mencapai 207.966,11 ha dengan total ijin lokasi seluas 165.876,13 ha. Jumlah ini mengalami perluasan dari 138.650,76 ha pada tahun 2003 atau bertambah seluas 69.000 ha. Demikian halnya luas areal ijin lokasi bertambah dari 138.650,76 ha pada tahun 2003 menjadi 165.876,13 ha. Data produksi kelapa sawit menunjukkan pada tahun 2003 luas areal perkebunan sawit mencapai 107.070,00 ha dengan total produksi 1.390.881,84 ton. Jumlah areal tersebut mengalami perluasan sebanyak 11.251,55 ha atau 10,59% dibandingkan dengan luas yang ada pada tahun 2002. Demikian halnya dengan produksi yang bertambah dari 1.158.314,69 ton pada tahun 2002 menjadi 1.390.881,84 ton.

Untuk perkebunan rakyat, data tahun 2004 menunjukkan perkebunan rakyat yang paling luas adalah perkebunan tanaman lada seluas 43.797,05 ha dengan produksi 22.140,32 ton sementara yang paling sedikit adalah perkebunan teh seluas 1,0 ha dengan produksi 0,15 ton. Namun dari segi produksi, terbanyak berasal dari perkebunan tanaman karet dengan produksi sebesar 23.324 ton. Dengan demikian komoditas perkebunan rakyat yang dominan produksinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berturut-turut adalah lada, karet serta kelapa sawit, namun tanaman rusak terbanyakpun juga adalah tanaman lada, karet dan kelapa sawit.

Jenis ternak yang paling banyak dipelihara masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk ternak besar adalah sapi yang total mencapai 4.051 ekor. Sementara untuk ternak kecil yang terbanyak adalah ternak babi sejumlah 17.214 ekor. Dari keseluruhan ternyata ternak unggas memiliki populasi terbanyak yaitu sejumlah 1.955.229 ekor atau 98,78% dari total jenis ternak di Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kabupaten Bangka adalah wilayah yang paling banyak memiliki

populasi ternak yakni sebesar 23,77% dari populasi ternak yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Sub sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh perikanan laut karena didukung oleh letak geografis yang berada pada wilayah perairan, sementara untuk perikanan darat didominasi oleh kegiatan budidaya air tawar dan payau. Pada tahun 2004 produksi ikan di wilayah ini sebanyak 75.471,814 ton dengan nilai sebesar Rp. 378.001.004.000. Wilayah penghasil ikan terbanyak di Provinsi ini adalah Kabupaten Belitung (27,82% dari total) disusul oleh Kabupaten Belitung Timur (11,05% dari total).

Untuk budidaya perikanan terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2004 hasil produksi budidaya ikan di provinsi ini mencapai 825,330 ton dengan nilai Rp. 18.384.860.000. Produksi budidaya ikan terbesar berasal dari Kabupaten Bangka yaitu sebesar 30,55% dari seluruh produksi disusul Kabupaten Bangka Tengah sebesar 11,07%.

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sebagai sektor primer (beserta sektor pertanian), pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara sendiri sektor pertambangan dan penggalian pada kurun waktu 2000–2005 memberi kontribusi rata-rata sebesar 18,70% atas dasar harga berlaku dan 16,98% atas dasar harga konstan pada PDRB.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan produsen utama bahan galian tambang Indonesia. Wilayah ini termasuk semenanjung Melayu yang kaya akan bahan tambang, baik bahan tambang galian B maupun C. Selain itu berdasar data-data geologis, hampir seluruh wilayah baik daratan maupun lautan memiliki kandungan timah atau dikenal sebagai Sabuk Timah Dunia. Namun demikian saat ini timah bukan lagi produk unggulan yang ditawarkan oleh Kepulauan Bangka Belitung. Adapaun potensi pertambangan yang potensial saat ini adalah bahan galian C yaitu Kaolin, Pasir Kuarsa, Granit, Tanah Liat, Pasir Bangunan dan Batu Diabase.

Tabel 2.20.
Kuasa Pertambangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2004

No	Daerah	Luas Wilayah (Ha)	Darat (Ha)	%	Laut (Ha)	%	Jumlah (Ha)
PT TIMAH							
A	Pulau Bangka						
1	Bangka	1.161.400	80.528,93	30,65	27.814,98	23,72	
2	Bangka Tengah		43.976,61	16,74	11.367,47	9,69	
3	Bangka Selatan		81.554,04	31,04	12.550,42	10,70	
4	Bangka Barat		56.690,02	21,58	65.553,02	55,89	
Sub Jumlah A			262.749,60	100,00	117.285,89	100,00	380.035,49
B	Pulau Belitung	562.500					
5	Belitung		23.053,62	40,11	0,00		
6	Belitung Timur		34.416,63	59,89	30.075,00	100,00	
Sub Jumlah B			57.470,25	100,00	30.075,00		87.545,25
Jumlah A+B		1.723.900	320.219,85		147.360,89		467.580,74
Persentase (%)			68,48		31,52		
PT KOBATIN							
1	Bangka Tengah		157.300	100,00	-	-	157.300
Jumlah			157.300	100,00			157.300
Jumlah (PT TIMAH + PT KOBATIN)			477.519,85	76,42	147.360,89	23,58	624.880,74

Sumber: PT Timah dan PT Kobatin 2004.

Sejak tahun 1709 bahan tambang timah telah dieksploitasi dan memberikan banyak devisa bagi negara serta menyerap banyak tenaga kerja. Terdapat dua perusahaan besar yang melakukan penambangan di wilayah ini yakni PT Timah Tbk. Dan PT Kobatin. Pada saat ini luas Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah Tbk mencapai 273.123,74 Ha sementara PT Kobatin seluas 61.847,70 Ha. Kuasa Pertambangan tersebut berlaku selama 30 tahun.

Dari tabel 2.20 terlihat luas kuasa pertambangan pada saat ini mencapai 320.219,85 ha wilayah daratan dengan perincian 262.749,60 ha berada di Pulau Bangka dan 57.470,25 ha berada di Pulau Belitung. Untuk kuasa pertambangan wilayah laut totalnya mencapai 147.360,89 ha dengan perincian 117.285,89 ha di

Pulau Bangka dan 30.075,00 ha berada di Kabupaten Belitung Timur. Dengan demikian total seluruh kuasa pertambangan (daratan dan laut) mencapai 467.580 ha.

Di Kabupaten Bangka Barat total luas kuasa pertambangan adalah 122.243,04 ha atau 26,14% dari total kuasa pertambangan total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Kabupaten Bangka luasnya mencapai 108.343,91 ha atau 23,17% dan sisanya tersebar di empat kabupaten lainnya.

Untuk kuasa pertambangan di daratan terluas terdapat di Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 81.554,04 ha, kemudian Kabupaten Bangka seluas 80.528,93 ha dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Belitung yaitu seluas 23.053,62 ha. Untuk kuasa pertambangan laut, terluas berada di Kabupaten Bangka Barat yakni 65.553,02 ha, sementara di Kabupaten Belitung bahkan tak ada.

Tabel 2.21.
Proporsi Kuasa Pertambangan
di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Kuasa Pertambangan (KP)			
		Darat (ha)	Laut (ha)	Total (ha)	%
1	Bangka	80.528,93	27.814,98	108.343,91	23,17
2	Bangka Tengah	43.976,61	11.367,47	55.344,08	11,84
3	Bangka Selatan	81.554,04	12.367,47	94.104,46	20,13
4	Bangka Barat	56.690,02	65.553,02	122.243,04	26,14
5	Belitung	23.053,62	-	23.053,62	4,93
6	Belitung Timur	34.416,63	30.075,00	64.491,63	13,79
Jumlah		320.219,85	147.360,89	467.580,74	

Sumber: PT Timah dan PT Kobatin 2004, diolah.

Dari sisi produksi, biji timah dan logam timah yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 mencapai sekitar 54.479,10 Ton Sn biji timah dan 54.182,075 Metric Ton logam timah. Perkembangan produksi biji timah dan logam timah selama kurun waktu 1999–2004 memperlihatkan fluktuasi, di mana produksi timah mencapai 81.891,642 Ton Sn lalu menurun hingga 54.479,100 Ton Sn pada tahun 2004. Dengan demikian mengalami penurunan hampir 20,67%. Demikian pula untuk produksi logam timah tahun 2004 juga mengalami penurunan sekitar 20,9% dibanding produksi tahun 2003.

Tabel 2.22.
Perkembangan Produksi Biji Timah dan Logam Timah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 1999–2004

No	Tahun	Perkembangan Produksi		Perkembangan Produksi	
		(Ton Sn)		(Metric Ton)	
		Biji Timah	%	Logam Timah	%
1	2004	54.479,100	-20,670	54.182,075	-10,9
2	2003	65.739,900	-24,569	60.096,337	-2,2
3	2002	81.891,642	31,191	61.431,100	26,7
4	2001	56.348,907	9,144	45.053,307	6,5
5	2000	51.196,500	21,372	42.109,314	12,3
6	1999	40.254,752	-	36.934,430	-

Sumber: PT Timah dan PT Kobatin 2004, diolah.

Tabel 2.23.
Jumlah Produksi Biji Timah dan Logam Timah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Timah			
		Biji Timah (Ton Sn)	Persentase (%)	Logam Timah (Metric Ton)	Persentase (%)
1	Januari	3.456,50	6,34	2.934,72	5,42
2	Februari	2.907,70	5,34	3.112,42	5,74
3	Maret	3.377,90	6,20	4.394,72	8,11
4	April	4.737,70	8,70	4.473,30	8,26
5	Mei	4.045,50	7,43	5.146,12	9,50
6	Juni	6.162,60	11,31	5.276,55	9,74
7	Juli	5.309,80	9,75	5.031,63	9,29
8	Agustus	6.786,80	12,46	5.240,47	9,67
9	September	5.334,90	9,79	4.501,33	8,31
10	Oktober	4.717,50	8,66	5.383,15	9,94
11	November	3.794,70	6,97	4.447,36	8,21
12	Desember	3.847,50	7,06	4.240,30	7,83
Jumlah		54.479,10		54.182,06	

Sumber: PT Timah dan PT Kobatin 2004, diolah.

c. Sektor Industri Pengolahan

Di luar sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sektor industri pengolahan memiliki andil besar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2000–2005. Lebih dari seperempat (rata-rata 25,14% atas dasar harga berlaku dan 24,09% atas dasar harga konstan) komposisi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disumbangkan

oleh sektor ini. Jika dilihat dari pertumbuhannya pun sektor ini cukup menjanjikan di mana secara rata-rata tumbuh sebesar 15,44% dan 4,43% berturut-turut atas dasar harga berlaku dan konstan.

Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kuantitas mulai bergeser dari sebelumnya didominasi oleh kelompok industri logam, mesin dan elektronika dengan jumlah industri sebanyak 763 dan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.725 orang, yang mana di kelompok tersebut terdapat industri smelter dll. Pada tahun 2006 mulai digantikan oleh kelompok industri kimia dan bahan bangunan dengan jumlah industri sebanyak 785 dengan jumlah penyerapan tenaga kerja terbesar, yaitu sebanyak 6485 orang.

Industri pangan merupakan industri yang mengolah hasil agro industri, perikanan, perkebunan dan hasil laut. Contoh pengolahan industri pangan antara lain berupa terasi, rusip, getas/kerupuk, dan sebagainya. Industri kerajinan tangan yang diusahakan berupa industri pewter dengan memanfaatkan potensi pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu timah, gelang/cincin/tongkat dari akar bahar, kerajinan batu satam yang menjadi khas dari Pulau Belitung, kerajinan anyaman misalnya kopiah resam, anyaman bambu dan lain sebagainya.

Tabel 2.24.
Kelompok Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Industri					Jumlah
		Pangan	Sandang & Aneka	Logam, Mesin & Elektronika	Kimia & Bahan Bangunan	Kerajinan	
1	Bangka	91	7	116	162	21	397
2	Bangka Barat	44	0	23	28	5	100
3	Bangka Tengah	18	1	61	53	2	135
4	Bangka Selatan	54	2	41	61	12	170
5	Belitung	100	7	188	214	31	540
6	Belitung Timur	103	16	74	65	115	373
7	Pangkalpinang	191	23	260	202	49	725
Total		601	56	763	785	235	2440
Persentase (%)		24.63	2.30	31.27	32.17	9.63	

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi & UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data pada tabel 2.24 memperlihatkan sebaran jenis industri terbanyak ada di Kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 725 unit, diikuti Kabupaten Belitung sebanyak 540 unit, di Kabupaten Bangka sebanyak 397 unit, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah industri sebanyak 100.

Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih sedikit yakni sebanyak 15.604 orang, tetapi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kelompok industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah industri kimia dan bahan bangunan yaitu sebanyak 6.485 orang atau 41,56% dari seluruh tenaga kerja yang terserap, diikuti oleh kelompok industri logam dan elektronik yaitu sebanyak 4.725 orang (30,28%). Sementara industri yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah industri sandang dan aneka dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 365 atau 2,34% dari seluruh tenaga kerja yang terserap.

Tabel 2.25
Penyerapan Tenaga Kerja Masing-Masing Kelompok Industri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Penyerapan Tenaga Kerja Tiap Kelompok Industri					Jumlah
		Pangan	Sandang & Aneka	Logam, Mesin & Elektronika	Kimia & Bahan Bangunan	Kerajinan	
1	Bangka	627	130	1202	1913	54	3926
2	Bangka Barat	170	0	243	204	16	633
3	Bangka Tengah	119	11	498	301	5	934
4	Bangka Selatan	220	3	167	291	74	755
5	Belitung	643	39	492	2119	48	3341
6	Belitung Timur	292	18	207	169	134	820
7	Pangkalpinang	1501	164	1916	1488	126	5195
Total		3572	365	4725	6485	457	15604
Persentase (%)		22.89	2.34	30.28	41.56	2.93	

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi & UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d. Sektor Listrik, Gas dan Air

Sektor ini relatif kecil sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun waktu 2002–2005 kontribusi sektor ini selalu kurang dari 1% dari PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun

harga konstan. Dimana masing-masing sebesar 0,72% atas harga berlaku 0,59% atas harga konstan. Namun demikian rata-rata pertumbuhan sektor ini sebesar 22,60% atas dasar harga berlaku dan sekitar 5,69% dalam rentang waktu yang sama, jauh lebih tinggi dari rata-rata sumbangannya terhadap pembentukan PDRB.

e. Sektor Bangunan/Konstruksi

Sektor bangunan juga memiliki sumbangan yang tidak terlalu besar pada pembentukan PDRB Provinsi bersangkutan. Sumbangan sektor ini terhadap PDRB secara rata-rata dalam kurun waktu 2000–2005 masing 5,28% atas dasar harga berlaku dan sekitar 5,52% atas dasar harga konstan.

Namun demikian rata-rata pertumbuhan sektor ini sekitar 17,20% atas dasar harga berlaku dan sekitar 7,11% dalam harga konstan, dalam rentang waktu yang sama jauh lebih tinggi dari sumbangan rata-rata terhadap PDRB.

f. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Meskipun pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada kurun waktu 2002–2005 yang rata-rata sebesar 23,81% atas dasar harga berlaku dan 6,86% atas dasar harga konstan, namun jika dilihat dari besarnya kontribusinya pada pembentukan PDRB ternyata rata-rata hanya kurang dari 4%. Dimana masing-masing sebesar 3,47% atas harga berlaku dan 3,30% atas harga konstan.

g. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan ranking ketiga penyumbang PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kontribusi sekitar 15% pada kurun waktu 2002–2005. rata-rata sumbangannya terhadap pembentukan PDRB 15,31% atas harga berlaku dan 15,54% atas harga konstan. Namun demikian jika dilihat pada pertumbuhannya pada kurun waktu yang sama, lebih kecil dari rata-rata sumbangannya terhadap pembentukan PDRB dimana rata-rata tumbuh sebesar 13,24% atas dasar harga berlaku dan hanya sebesar 4,02% atas dasar harga konstan.

Sebetulnya sektor ini dapat berkembang dengan pesat mengingat karakteristik dominan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki

dua pulau besar dengan banyak pulau-pulau kecil yang secara alamiah memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari. Pengembangan kawasan wisata akan berbanding lurus dengan berkembangnya kebutuhan akomodasi berupa hotel dan restoran.

h. Sektor Keuangan, Penyewaan dan Jasa Perusahaan

Sama seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor inipun relatif kecil sumbangannya terhadap pembentukan PDRB provinsi. Rata-rata hanya sekitar 3,5% saja (baik atas dasar harga berlaku maupun konstan) kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa konstruksi pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i. Sektor Jasa-Jasa

Pada kurun waktu 2002–2004, sektor jasa termasuk sektor yang cukup mengesankan jika ditilik dari pertumbuhannya. Sektor ini tumbuh rata-rata sebesar 23,57% atas dasar harga berlaku dan tumbuh sebesar 9,11% jika dihitung menggunakan harga konstan, di mana angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata sumbangan terhadap pembentukan PDRB yang hanya sekitar 5,5%.

1.1) Permasalahan

Dari berbagai kondisi dasar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang ekonomi dan sumber daya alam pada saat ini, antara lain:

(1) Walaupun rata-rata kontribusi sektor pertanian dan kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi untuk periode 2003–2004, namun sektor ini tumbuh lebih rendah dibanding rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kurun waktu yang sama, bahkan untuk tahun 2004 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah (9,73%) dibanding tahun sebelumnya (10,95%). Beberapa permasalahan disektor pertanian dan kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Di sub sektor pertanian produksi padi masih tergantung pada musim (tadah hujan) denagn ladang dan gaga rancah pada musim hujan.

diarahkan pada produksi padi ladang. Situasi ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu: *pertama*, produktivitas rata-rata tahun 2004 padi ladang sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.19 sebelumnya yaitu 0,92 ton/hektar, relatif lebih rendah dari produktivitas padi sawah yang sebesar 1,85 ton/hektar. Kondisi ini menggambarkan inefisiensi dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman dengan menggunakan sistem padi ladang; *kedua*, sistem ladang berpindah yang dijalankan oleh mayoritas petani tradisional bisa mengganggu kelestarian dan produksi hutan karena pembukaan ladang baru dilakukan melalui pembabatan atau pembakaran hutan.

2. Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Adanya kesulitan ditingkat petani untuk melakukan akses ke pasar atas komoditi yang dihasilkannya maupun untuk memperoleh pupuk dan pestisida.
 5. Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah, bahkan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2004.
- (2) Pada sub sektor perkebunan, di luar perkebunan sawit, untuk kurun waktu 2003–2004, tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan penurunan. Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi besar yang perlu digarap secara lebih intensif. Untuk maksud tersebut maka keberadaan perkebunan besar sangat dibutuhkan sehingga efisiensi pemanfaatan hasil perkebunan dan akses dapat diperoleh.

- (3) Pada sub sektor peternakan, data menunjukkan bahwa populasi dan produksi ternak tidak merata di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Sementara pada sub sektor perikanan masih sangat didominasi oleh perikanan laut karena didukung oleh letak geografis yang berada pada wilayah perairan. Untuk budidaya perikanan relatif belum berkembang. Pada tahun 2004 hasil produksi budidaya ikan di provinsi ini hanya 825.330 ton dengan nilai Rp18.384.860.000,00. Permasalahan yang dihadapi di sini lagi-lagi terkait dengan belum meratanya budidaya perikanan di kabupaten/kota.
- (5) Permasalahan utama dalam sektor pertambangan dan penggalian adalah berkaitan dengan sifat dari komoditas pertambangan dan penggalian, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan menipisnya deposit komoditas yang telah dieksploitasi seperti yang dialami pada komoditas timah, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penerimaan pemerintah dengan sendirinya menurun. Demikian juga, komoditas pertambangan lain untuk menggantikan komoditas unggulan selama ini, belum diperoleh secara ekonomis. Salah satu kendala dalam eksplorasi komoditas pertambangan yang baru adalah timbul dari masalah birokrasi perizinan.
- (6) Permasalahan utama dalam sektor industri pengolahan dapat dipetakan sebagai berikut:
 1. Sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan.
 2. Minimnya kredit yang disalurkan pihak perbankan ke pengusaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dana masyarakat yang terhimpun. Lebih jelasnya akan dibahas pada sektor keuangan.

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar.
- (7) Permasalahan yang ada dalam sektor listrik, gas dan air adalah tidak meratanya pengembangan sektor ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan ini merupakan konsekuensi logis antara besarnya investasi yang dibutuhkan dalam sub sektor listrik dengan pendapatan yang diharapkan, meskipun PLN membawa misi-misi pembangunan tertentu. Pengembangan listrik di wilayah yang merupakan ibukota kabupaten terutama didorong untuk menunjang penambahan sarana dan prasarana pemerintah, bukan didorong oleh kegiatan usaha.
- (8) Permasalahan dalam sektor bangunan/konstruksi adalah masih rendahnya perkembangan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga belum mengoptimalkan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan yang dialami sektor ini terutama disebabkan oleh permintaan pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk aktivitas pemerintah.
- (9) Terdapat dua permasalahan mendasar dalam sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, yaitu:
 1. Minimnya sarana dan prasarana perhubungan. Kendala ini membatasi mobilitas barang dan orang antar wilayah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun mobilitas barang dan orang masuk dan keluar wilayah kabupaten.
 2. Rendahnya fasilitas kredit yang disediakan perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menunjang kegiatan sektor ini.
- (10) Beberapa permasalahan kritical yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam sektor Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di antaranya:
 1. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana fisik untuk transportasi dan komunikasi.
 2. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

3. Khusus untuk telepon, adanya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar.
- (11) Persoalan dalam sektor Keuangan, Penyewaan dan Jasa Perusahaan sebagian besar berupa ketimpangan antara dana yang terhimpun dengan realisasi kredit yang disalurkan oleh perbankan. Kondisi ini menghambat perkembangan sektor lain yang membutuhkan dana untuk investasi maupun modal kerja. Rendahnya kemauan bank dalam menyalurkan kredit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada dua alasan klasik, yaitu; *pertama*, tidak adanya agunan asset yang memadai dari pengusaha; *kedua*, rendahnya kemampuan pengusaha dalam administrasi usaha yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang menjadi salah satu acuan perbankan dalam penyaluran kredit.
- (12) Sektor Keuangan, Penyewaan dan Jasa Perusahaan menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang rendah, yaitu rata-rata 7,5% dalam harga berlaku dan hanya sekitar 3% dalam harga konstan. Hal ini tentu kurang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di masa mendatang.

1.2) Capaian Keberhasilan

Beberapa kondisi yang menunjukkan tercapainya keberhasilan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut:

- (1) Walaupun pertumbuhan sektor pertanian dan kehutanan dalam nilai rupiah berfluktuasi sampai tahun 2005, namun sektor ini mampu mempertahankan posisinya sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB sejak provinsi ini didirikan. Rata-rata penerimaan di sektor ini adalah sebesar 25% dari PDRB untuk kurun waktu 2002–2005.
- (2) Pemerintah telah meningkatkan upaya memperbaiki pendapatan petani/peternak dan ketahanan pangan.
- (3) Pemerintah telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan secara baik yang di dasarkan pada kondisi wilayah.

- (4) Terlepas dari potensi menurunnya produksi tambang unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa mendatang, sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi besar bagi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak kabupaten ini didirikan sebagaimana disebutkan pada kondisi umum sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini telah menjadi motor penggerak bagi sektor lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, telah memberikan kontribusi yang besar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (5) Tidak terdapat capaian yang berarti dalam sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun patut dicatat bahwa tingkat pertumbuhan sektor ini untuk kurun waktu 2003–2005 menunjukkan *trend* meningkat. Tidak terdapat kecenderungan untuk menurun. Oleh sebab itu, apabila sektor ini diberikan perhatian yang serius, maka dapat menjadi sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa mendatang.
- (6) Sektor listrik, gas dan air merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata cukup tinggi dari seluruh sektor perekonomian untuk kurun waktu yang sama. Capaian pada sektor ini didominasi oleh sub sektor listrik, namun demikian penyebaran pertumbuhan tidak merata pada wilayah yang ada di provinsi ini. Di samping itu, dari sisi ekonomi capaian ini kurang memberi andil yang signifikan karena pengembangan ini lebih ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana pemerintah, bukan sebagai dampak perkembangan dunia usaha.
- (7) Sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang berarti, yaitu rata-rata sebesar 16% atas harga berlaku dan sekitar 7,5% dalam harga konstan. Namun demikian dari aspek ekonomi, sektor ini belum menunjukkan keberhasilan yang berarti karena lebih ditujukan pada kepentingan sarana dan prasarana fisik pemerintah.
- (8) Sektor perdagangan, hotel dan restoran di tahun 2002 mengalami penurunan dari 16,08% menjadi 14,42% pada tahun 2005.

- (9) Indikator capaian dalam sektor Pengangkutan dan Komunikasi adalah bertambahnya luas jalan yang telah dibangun, bertambahnya arus barang dan penumpang, pengembangan dermaga serta bertambahnya pemanfaatan telepon sebagaimana dibahas dalam bagian kondisi umum sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian upaya ini perlu lebih dioptimalkan mengingat masih banyak wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih terisolasi.

2) Analisis

Untuk melakukan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan, dan keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dipertimbangkan potensi ekonomi yang dimiliki berdasarkan data historis yang tersedia. Metode analisis atas potensi ekonomi yang digunakan di sini adalah: Metode *Shift Share* (SS), *Location Quotient* (LQ), dan *Tipologi Klassen*. Analisis kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tiga metode tersebut dengan menggunakan data periode 2003–2004 memberikan hasil sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Tabel 2. 26
Analisis LQ, Shift-Share dan Tipologi Klassen
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2003–2004

No.	Sektor	Analisis LQ		Shift-Share		Tipologi Klassen	
		2003	2004	2003	2004	2003	2004
1.	Pertanian	0.95	0.99	2,900	-0,350	Potensial	Potensial
2.	Pertambangan & Penggalian	1	1.04	-7,570	2,850	Potensial	Potensial
3.	Industri Pengolahan	0.96	0.93	2,780	-1,180	Potensial	Prima
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.88	1	-0,820	-1,570	Berkembang	Terbelakang
5.	Bangunan	7.43	1.03	-2,390	-3,400	Berkembang	Prima
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.95	0.83	2,630	0,570	Terbelakang	Terbelakang
7.	Pengangkutan & komunikasi	0.09	1.4	-1,450	-2,380	Terbelakang	Berkembang
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.98	0.88	1,250	1,340	Terbelakang	Terbelakang
9.	Jasa-jasa	0.93	0.046	-11,27	0,950	Berkembang	Terbelakang

Sumber: Hasil olahan (2006)

Berdasarkan hasil analisis LQ, shift-share dan tipologi klassen di atas, dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2004, sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lonjakan pendapatan yang bersumber dari pertambangan dan penggalian yang luar biasa selama tahun 2004, telah menyebabkan peran sektor-sektor unggulan lainnya seperti pertanian dan industri pengolahan cenderung semakin menurun, namun demikian sektor-sektor ini masih potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa jenis tanah dan luasnya lahan masih memungkinkan untuk mengembangkan sektor ini. Di samping itu, sejarah masa lalu provinsi ini telah dikenal luas sebagai daerah penghasil lada dan karet serta kelapa sawit pada satu dekade terakhir.

Yang perlu disadari, sekalipun sektor pertambangan dan penggalian terlihat semakin baik kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun untuk menjadikan sektor ini sebagai sektor unggulan perlu dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Hal ini disebabkan karena sektor ini merupakan sumber daya yang tidak terbarukan (*unrenewable*) dan pola eksplorasi sebagaimana yang dilakukan sekarang ini akan berdampak sangat merugikan bagi lingkungan dan generasi mendatang.

Untuk industri pengolahan, sekalipun hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal, namun ke depan upaya untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari sub sektor perkebunan dan perikanan yang didukung oleh “jenuhnya” dan terbatasnya daya dukung lahan industri yang ada di kawasan Jabotabek merupakan peluang untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan industri. Hal ini didukung juga oleh posisi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di lintasan perdagangan internasional.

Dilihat dari potensi yang ada, perdagangan dan pariwisata yang dicerminkan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terlihat bahwa selama periode analisis belum dikembangkan secara optimal. Namun demikian, dilihat dari posisinya yang strategis dan potensi keragaman dan kualitas Objek dan Daya Tarik (ODT) Wisata yang dimiliki provinsi ini, nampaknya mengharuskan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih serius dan lebih bekerja keras untuk mengelola sektor perdagangan dan pariwisata ini. Di samping itu, peluang

perdagangan bebas (AFTA, APEC dan WTO) yang nampaknya secara pasti akan diterapkan harus dijadikan peluang untuk mengembangkan sektor perdagangan dengan memanfaatkan potensi jalur perdagangan yang strategis di kawasan ASEAN dan Pasifik.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan analisis LQ, shift-share dan tipologi klassen di atas dan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan di masa yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian (khususnya perkebunan dan kelautan), industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa-masa mendatang.

2.1) Proyeksi Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, yang berpotensi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan adalah:

- (1) Komitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah secara konsisten menimbulkan peluang bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, yaitu pada empat sektor unggulan yaitu kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan, pertanian dan perkebunan, dan pariwisata.
- (2) Kebijakan pemerintah pusat untuk mendelegasikan lebih banyak wewenang pengeluaran izin ke daerah akan mendorong investasi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama investasi pada industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya lokal.
- (3) Meningkatnya kerjasama antar daerah untuk pembangunan ekonomi dan diberlakukannya pasar bebas (AFTA, APEC dan WTO) memberi peluang bagi ekspor komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke daerah dan negara lain dan menarik investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Investasi yang diharapkan tidak hanya pada sektor-sektor unggulan, tetapi juga sektor perhubungan dan komunikasi yang menjadi pendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Selain itu, situasi ini bisa mendorong usaha pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan komoditi andalan berupa wisata alam.

- (4) Perkembangan dalam teknologi pertambangan yang diarahkan pada teknologi yang ramah lingkungan memberi peluang bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan potensi pertambangannya dengan dampak negatif bagi lingkungan yang lebih rendah dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
- (5) Perkembangan teknologi yang terkait dengan variasi pemanfaatan serta efisiensi pengelolaan hasil kehutanan dan perkebunan akan mendorong efisiensi penggunaan bahan baku yang berasal dari hutan dan perkebunan sehingga hasil hutan dan perkebunan dapat dioptimalkan secara ekonomis dan kelestariannya tetap terjaga.
- (6) Semakin seriusnya pemerintah pusat memperbaiki kondisi penegakkan hukum dan masalah keamanan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan rasa aman dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- (7) Upaya perbaikan administrasi pemerintah daerah akan membantu dalam penyediaan informasi yang lebih baik untuk evaluasi kinerja dan perencanaan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara terarah dan terintegrasi.
- (8) Ditemukannya lahan baru bahan tambang galian C seperti, kaolin, pasir kuarsa, granit, tanah liat, pasir bangunan dan batu diabase, di mana bisa membantu menjaga kelanjutan peran sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (9) Daya saing sektor-sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relatif lebih baik dari sektor-sektor yang sama pada tingkat nasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis dengan menggunakan metode SS sebelumnya, menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah sasaran investasi di masa mendatang dibanding rata-rata kabupaten/kota tersebut.
- (10) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang potensial yang dapat dikembangkan dan disesuaikan kemampuannya.

2.2) Proyeksi Ancaman

Beberapa ancaman di bidang ekonomi dan sumber daya alam yang kemungkinan akan dihadapi di masa mendatang adalah:

- (1) Berkurangnya deposit serta sulitnya mencari lokasi pengganti bahan tambang yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta eksploitasi yang kurang terencana dengan baik bisa membawa kerusakan yang parah bagi lingkungan.
- (2) Berkurangnya lahan hutan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, lemahnya upaya penegakkan hukum terhadap penebangan liar hutan lindung; *kedua*, beralihnya fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit; *ketiga*, belum seriusnya upaya melakukan reboisasi atas hutan yang rusak; *keempat*, kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak efisien; dan *kelima* kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak efisien.
- (3) Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing lewat berbagai paket insentif.
- (4) Semakin meningkatnya tuntutan produk yang ramah lingkungan dan tidak dihasilkan lewat perusakan lingkungan sehingga mengancam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berupa hasil tambang dan kehutanan yang berpotensi merusak lingkungan.
- (5) Kemungkinan terjadi konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya. Serta kemungkinan konflik horizontal antar masyarakat terkait ketidakadilan ekonomi serta masalah faktor sosio kultural, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemungkinan terjadinya konflik tersebut akan mengganggu iklim investasi dan kegiatan ekonomi.
- (6) Terjadinya pencemaran air dan udara sebagai akibat penambangan yang dilakukan secara tidak terpadu dan dengan metode yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini bisa mengganggu kinerja dari sektor yang lain terutama sub sektor pertanian dan sub sektor perikanan serta kesehatan.

2.3) Proyeksi Permasalahan

Berkaitan dengan data yang ada, pada masa 20 tahun ke depan diproyeksikan beberapa masalah yang akan dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagai berikut:

- (1) Minimnya sarana dan prasarana perhubungan masih menjadi potensi permasalahan di masa mendatang. Faktor penyebab permasalahan ini di antaranya: *pertama*, kondisi wilayah yang ada; *kedua*, masalah ganti rugi tanah dan bangunan untuk proyek pembangunan sarana dan pra sarana fisik; dan *ketiga*, kemungkinan berkurangnya penerimaan pemerintah yang menjadi sumber terbesar pembangunan sarana dan prasarana fisik karena rencana pemerintah pusat menghapus DAU bagi daerah yang kaya.
- (2) Kondisi penduduk yang tersebar menjadi kendala dalam upaya pembangunan infrastruktur dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (3) Keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah.
- (4) Ketersediaan energi listrik dan utilitas lainnya masih menjadi kendala di masa depan. Berdasarkan pada kenyataan, penambahan daya listrik dan suplai air minum yang besar hanya terjadi di ibukota kabupaten, sedangkan beberapa wilayah lain hanya mengalami sedikit peningkatan, bahkan pada beberapa wilayah tidak ada peningkatan sama sekali.
- (5) Masih panjangnya birokrasi perizinan yang timbul karena adanya ego birokrasi yang sulit dihilangkan

2.4) Proyeksi Keberhasilan

Di masa yang akan datang, diproyeksikan keberhasilan di beberapa sektor ekonomi dan sumber daya alam, antara lain:

- (1) Semakin membaiknya tata penggunaan lahan, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, baik untuk pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
- (2) Semakin meningkatnya infrastruktur sektor pertanian yang akan meningkatkan produktivitas bahan pangan.

- (3) Semakin meningkatnya pemanfaatan potensi sektor pertambangan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
- (4) Semakin meningkatnya diversifikasi bahan pangan, maupun hasil industri kecil.

3) Output

Dengan semakin berkembangnya hasil seluruh sektor perekonomian dan hasil sumber daya alam, maka untuk 20 tahun ke depan, akan tercipta peningkatan kesejahteraan yang memadai. Perkembangan ini akan diikuti dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum, yang memberi efek multiplier pada perkembangan perekonomian berikutnya. Selain itu pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dapat memberikan tambahan kesejahteraan penduduknya.

2.1.4 Sosial Budaya

1) Input



a. Bidang Pendidikan

Pembangunan sumberdaya manusia sangat mutlak diperlukan terutama bagi wilayah yang masih tertinggal. Manusia berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang mampu menggerakkan pembangunan fisik maupun non fisik secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan sumberdaya manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menginginkan masyarakat maju dan menuju sumberdaya manusia yang berorientasi global dan berbasis pada nilai-nilai luhur yang dinamis, maka masih perlu dijelaskan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masalah di tiap-tiap wilayah. Ketepatan dalam menentukan indikator proses maupun hasil ini akan sangat menentukan kinerja pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kecerdasan guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai integritas dan daya saing yang

tinggi. Oleh karena itu tugas dari dunia pendidikan bukan mengajarkan apa yang paling baik diketahui dan dipikirkan pada masa lampau, akan tetapi yang terpenting adalah menyajikan informasi dan orientasi terhadap keadaan masa kini, khususnya orientasi terhadap masa depan di mana nantinya para siswa akan hidup di dalamnya. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengambil bagian secara kreatif di berbagai kegiatan belajar yang relevan dengan bagian kehidupan di masa mendatang. Pendekatan humanistik dilakukan melalui penyajian berbagai pengalaman belajar yang menggugah kesadaran untuk menemukan diri sendiri, yaitu martabatnya sebagai individu-individu yang memiliki potensi untuk berkembang.

Pendidikan merupakan modal utama bagi pengembangan manusia seutuhnya dimasa yang akan datang. Adanya program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu merupakan salah satu upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan formal merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang berjenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan formal secara umum diselenggarakan di sekolah-sekolah dibawah Depertemen Pendidikan Nasional namun ada juga diluar tanggung jawab Depertemen Pendidikan Nasional seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Sosial dan lainnya.

Kendala yang dirasakan dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kondisi geografis yang berupa kepulauan yang memiliki potensi masalah ketersediaan aksesibilitas yang baik. Kondisi ini mengakibatkan proses belajar mengajar agak terhambat karena sekolah biasanya dibangun untuk beberapa daerah yang terkadang letaknya berjauhan. Sebaran bangunan sekolah formal yaitu mulai dari tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sudah tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pada jenjang perguruan tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah memiliki 5 sekolah tinggi serta 5 akademi.

Sekolah Taman Kanak-Kanak tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun untuk Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan tidak terdapat Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri. Hal ini menuntut anak usia TK yang berada di kedua kabupaten tersebut untuk bersekolah di TK Swasta. Pada tabel 2.27 dan tabel 2.28, menunjukkan di Tahun Ajaran 2004/2005 jumlah murid Taman Kanak-Kanak (Negeri dan Swasta) sebanyak 8.961 orang dengan jumlah guru sebanyak 428 orang dan jumlah sekolah sebanyak 141.

Tabel 2.27.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	1	7	120	120	17
2	Bangka Barat	1	6	92	92	15
3	Bangka Tengah	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	0	0
5	Belitung	1	5	58	58	12
6	Belitung Timur	1	7	70	70	10
7	*Pangkalpinang	2	10	125	63	13
	2004/2005	6	35	465	58	10
	Jumlah 2003/2004	5	24	333	67	14
	2002/2003	3	16	278	93	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.28.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	37	98	2.060	56	21
2	Bangka Barat	14	49	768	55	16
3	Bangka Tengah	12	26	534	45	21
4	Bangka Selatan	10	26	652	65	25
5	Belitung	24	75	1.488	62	20
6	Belitung Timur	9	17	490	54	29
7	*Pangkalpinang	29	102	2.504	86	25
	2004/2005	135	393	8.496	63	22
	Jumlah 2003/2004	126	406	7.091	56	17
	2002/2003	115	345	6.174	54	18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tabel 2.29, tabel 2.30, tabel 2.31, dan tabel 2.32 menunjukkan banyaknya sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD serta Madrasah Ibtidaiyah) baik Negeri maupun Swasta yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.29.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	162	1.466	27.445	169	19
2	Bangka Barat	118	912	17.854	151	20
3	Bangka Tengah	85	750	16.503	194	22
4	Bangka Selatan	80	715	19.339	242	27
5	Belitung	126	918	17.334	138	19
6	Belitung Timur	103	756	10.278	100	14
7	*Pangkalpinang	68	774	13.568	200	18
2004/2005		742	6.291	122.321	165	19
Jumlah	2003/2004	756	6.398	120.986	160	19
2002/2003		765	6.143	122.509	160	20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.30.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	11	82	1.832	167	22
2	Bangka Barat	7	30	981	140	33
3	Bangka Tengah	5	28	760	152	27
4	Bangka Selatan	1	7	203	203	29
5	Belitung	2	13	413	207	32
6	Belitung Timur	1	5	12	12	2
7	*Pangkalpinang	12	131	3.305	275	25
2004/2005		39	296	7.506	192	25
Jumlah	2003/2004	37	350	8.292	224	24
2002/2003		35	386	8.224	235	21

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.31.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	1	14	141	141	10
2	Bangka Barat	2	20	228	114	11
3	Bangka Tengah	1	15	217	217	14
4	Bangka Selatan	1	7	112	112	16
5	Belitung	1	12	77	77	6
6	Belitung Timur	0	0	0	0	0
7	*Pangkalpinang	2	30	280	140	9
2004/2005		8	98	1.055	132	11
Jumlah 2003/2004		9	93	1.432	159	15
2002/2003		7	113	639	91	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.32.
Jumlah Sekolah , Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	7	70	702	100	10
2	Bangka Barat	2	22	180	90	8
3	Bangka Tengah	2	17	149	75	9
4	Bangka Selatan	4	43	309	77	7
5	Belitung	1	5	51	51	10
6	Belitung Timur	1	8	83	83	10
7	*Pangkalpinang	4	48	682	171	14
2004/2005		21	213	2.156	103	10
Jumlah 2003/2004		21	212	2.352	112	11
2002/2003		42	258	2.605	62	10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.33, tabel 2.34, tabel 2.35, dan tabel 2.36, menunjukkan banyaknya sekolah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun Ajaran 2004/2005 jumlah sekolah SLTP (Negeri dan Swasta) ada 126 buah sekolah dengan 36.964 orang murid dan 2.329 tenaga pengajar. Sedangkan banyaknya Madrasah Tsanawiyah

Negeri dan Swasta ada 42 buah sekolah dengan 5.709 murid dan 697 orang tenaga pengajar.

Tabel 2.33.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	19	363	6.855	361	19
2	Bangka Barat	9	173	3.094	344	18
3	Bangka Tengah	7	148	3.252	465	22
4	Bangka Selatan	7	190	3.069	438	16
5	Belitung	14	295	4.808	343	16
6	Belitung Timur	12	181	2.731	228	15
7	*Pangkalpinang	10	274	5.730	573	21
2004/2005		78	1.624	29.539	379	18
Jumlah 2003/2004		75	1.556	28.654	382	18
2002/2003		70	1.260	28.281	404	22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.34.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	14	149	1.818	130	12
2	Bangka Barat	10	122	1.194	119	10
3	Bangka Tengah	3	133	472	157	4
4	Bangka Selatan	2	33	371	186	11
5	Belitung	5	73	892	178	12
6	Belitung Timur	3	43	306	102	7
7	*Pangkalpinang	11	152	2.372	216	16
2004/2005		48	705	7.425	155	11
Jumlah 2003/2004		50	646	8.243	165	13
2002/2003		55	655	10.095	182	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.35.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	1	20	134	134	7
2	Bangka Barat	2	39	503	252	13
3	Bangka Tengah	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	0	0
5	Belitung	1	12	66	66	6
6	Belitung Timur	1	19	125	125	7
7	*Pangkalpinang	1	39	615	615	16
2004/2005		6	129	1.443	241	11
2003/2004		6	116	1.325	221	11
Jumlah	2002/2003	5	72	1.204	241	17
2001/2002		4	90	1.111	278	12
2000/2001		5	127	903	180	7
1999/2000		6	76	919	153	12

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.36.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	12	192	1.844	154	10
2	Bangka Barat	7	104	702	100	7
3	Bangka Tengah	4	73	606	152	8
4	Bangka Selatan	8	111	811	101	7
5	Belitung	2	39	81	41	2
6	Belitung Timur	1	13	51	51	4
7	*Pangkalpinang	2	36	171	86	5
2004/2005		36	568	4.266	119	8
2003/2004		36	555	4.363	121	8
Jumlah	2002/2003	39	544	4.200	108	8
2001/2002		37	307	3.476	94	11
2000/2001		37	475	2.188	59	5
1999/2000		34	399	2.770	81	7

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sementara itu, untuk sekolah setingkat Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan tersedia di seluruh kabupaten/kota. Tabel 2.37 sampai tabel 2.42 menunjukkan pada Tahun Ajaran 2004/2005 jumlah sekolah SMU/SMK/ Madrasah Aliyah (Negeri dan Swasta) sebanyak 111 buah dengan 32.588 murid dan 2.722 orang tenaga pengajar. Jumlah sekolah SMU/SMK/ Madrasah Aliyah tersebut tersebar cukup merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.37.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	6	148	2.339	390	16
2	Bangka Barat	4	90	1.323	331	15
3	Bangka Tengah	2	47	955	478	20
4	Bangka Selatan	2	51	666	333	13
5	Belitung	4	90	1.250	313	14
6	Belitung Timur	4	91	1.198	300	13
7	*Pangkalpinang	4	158	2.634	659	17
2004/2005		26	675	10.365	399	15
Jumlah 2003/2004		20	588	9.115	456	16
2002/2003		15	381	7.642	509	20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.38.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMU Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	10	164	2.133	211	13
2	Bangka Barat	5	96	921	184	10
3	Bangka Tengah	1	11	83	83	8
4	Bangka Selatan	2	51	554	277	11
5	Belitung	4	75	779	195	10
6	Belitung Timur	3	73	132	44	2
7	*Pangkalpinang	8	181	2.700	338	15
2004/2005		33	651	7.282	221	11
Jumlah 2003/2004		39	672	7.898	203	12
2002/2003		34	655	8.271	243	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.39.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	3	78	1.013	338	13
2	Bangka Barat	1	19	155	155	8
3	Bangka Tengah	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	0	0
5	Belitung	2	67	932	466	14
6	Belitung Timur	0	0	0	0	0
7	*Pangkalpinang	4	194	2.409	602	12
2004/2005		10	358	4.509	451	13
Jumlah 2003/2004		6	322	4.025	671	13
2002/2003		5	218	3.256	653	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.40.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	7	181	2.146	307	12
2	Bangka Barat	4	88	903	226	10
3	Bangka Tengah	1	15	417	417	28
4	Bangka Selatan	1	28	266	266	10
5	Belitung	3	79	1.123	374	14
6	Belitung Timur	4	68	440	110	6
7	*Pangkalpinang	7	192	2.570	367	13
2004/2005		27	652	7.865	291	12
Jumlah 2003/2004		32	725	6.126	191	8
2002/2003		27	667	7.145	265	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.41.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Negeri
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	1	32	335	335	10
2	Bangka Barat	1	20	67	67	3
3	Bangka Tengah	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	0	0
5	Belitung	1	19	102	102	5
6	Belitung Timur	0	0	0	0	0
7	*Pangkalpinang	1	49	698	698	14
2004/2005		4	120	1.202	301	10
2003/2004		4	105	1.113	278	11
Jumlah	2002/2003	3	43	1.039	346	24
2001/2002		3	70	833	278	12
2000/2001		3	70	845	282	12
1999/2000		3	70	1.380	460	20

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.42.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah Swasta
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2004/2005

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid terhadap	
					Sekolah	Guru
1	Bangka	3	72	385	128	5
2	Bangka Barat	3	43	285	95	7
3	Bangka Tengah	2	32	244	122	8
4	Bangka Selatan	5	55	273	55	5
5	Belitung	2	30	29	15	1
6	Belitung Timur	0	0	0	0	0
7	*Pangkalpinang	2	34	149	75	4
2004/2005		11	266	1.365	80	5
2003/2004		18	252	1.389	77	6
Jumlah	2002/2003	16	231	1.115	70	5
2001/2002		20	227	2.349	117	10
2000/2001		13	143	592	46	4
1999/2000		19	189	575	30	3

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 sekolah tinggi dan 5 akademi dengan total mahasiswa sebanyak 2.702 orang, dengan jumlah dosen tetap 133 dan 278 dosen tidak tetap.

b. Bidang Kesehatan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani senantiasa menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi tuntutan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sektor kesehatan seringkali menjadi sektor pembangunan yang terabaikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat cenderung lebih mendahulukan kepentingan pertumbuhan ekonomi/bisnis dibandingkan dengan pembangunan sektor kesehatan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kelalaian ini akan berakibat pada lambatnya proses pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri secara keseluruhannya. Sehingga pemerintah daerah setempat perlu segera memperbaiki kondisi ini, di mana pembangunan di sektor kesehatan masyarakat perlu segera dikembangkan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 6 unit terbagi menjadi 3 RS umum pemerintah, 2 RS umum swasta, dan 1 RS jiwa. Untuk puskesmas sebanyak 192 unit terbagi dalam puskesmas 47 unit dan puskesmas pembantu 148 unit. Dari fasilitas kesehatan tersebut terdapat tenaga medis yang terdiri dari 130 dokter umum, 32 dokter ahli, 31 dokter gigi, 391 orang perawat dan 292 orang bidan. Sarana penunjang kesehatan seperti apotek dan pedagang besar farmasi di provinsi ini sebanyak 27 apotek dan 5 pedagang besar.

Dibidang program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 tercatat 23.377 akseptor. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh para akseptor KB baru adalah suntikan yang mencapai 56,62% (13.236 akseptor) dan pil KB sebesar 33,42% (7.813 akseptor) dan sisanya alat kontrasepsi lainnya.

Tabel 2.43.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Penyakit
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Jenis Penyakit	Kabupaten/Kota							Jumlah
		Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	*Pangkal Pinang	
1	Infeksi Akut lain pada Saluran Pernafasan Atas	34.839	3.421	11.418	6.499	22.078	5.451	36.575	120.281
2	Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan Bagian Atas	1.393	858	658	1.286	2.556	9.758	6.763	23.272
3	Malaria Klinis	10.991	2.500	4.614	6.642	1.485	1.892	8.463	36.587
4	Penyakit pada Sistem Otot	4.964	742	2.192	1.962	7.432	6.003	8.427	31.722
5	Diare	4.425	778	2.265	2.079	3.038	1.168	1.161	14.914
6	Penyakit Kulit Infeksi	2.381	331	1.122	952	4.179	2.826	4.711	16.502
7	Penyakit Kulit Alergi	2.020	479	1.737	2.181	3.311	2.141	6.668	18.537
8	Tekanan Darah Tinggi	4.297	1.173	2.048	2.050	10.047	3.849	7.429	30.893
9	Asma	2.658	363	694	444	927	1.206		6.292
10	Gastritis	381						2.564	2.945
11	Penyakit Pulpa & Jaringan			488		1.232			1.720
12	Infeksi Penyakit Usus Lain			788					788
13	Kecelakaan & Ruda Paksa				445	722			1.167
14	Penyakit Gigi & Rongga Mulut	11.542		327		1.538		4.689	18.096
15	Infeksi Akut lain pd Saluran Pernafasan Bagian Bawah	1.186			677				1.863
16	Penyakit Lainnya	30.122	1.944	6.073	2.264	3.531	7.906	41.644	93.484
	Jumlah	111.199	12.589	34.424	27.481	62.076	42.200	129.094	419.063

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Keluarga pra sejahtera pada tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 28.563 keluarga, keluarga sejahtera I sebanyak 67.339 keluarga, keluarga sejahtera 2 sebanyak 92.155 keluarga, sejahtera 3 sebanyak 54.294 keluarga dan keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 3.031 keluarga.

c. Bidang Kepariwisata

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang berkaitan erat dengan pengembangan wilayah. Pariwisata adalah industri yang sangat berkaitan dengan erat dengan sektor-sektor industri lainnya, terutama yang bergerak di bidang ekonomi dan jasa. Sebagai salah satu sektor pembangunan, pariwisata menjadi salah satu sumberdaya yang dapat mendukung peningkatan potensi lokal yang ada, sehingga mampu mempersempit kesenjangan yang mungkin terjadi dengan daerah lain yang memiliki sumberdaya sejenis. Dengan kata lain pariwisata sebagai salah satu sektor usaha (industri) memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor-sektor lainnya yang ada di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut secara keseluruhan.

Karakteristik dominan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah adanya dua Pulau Besar dan memiliki banyak pulau-pulau kecil, yang secara alamiah memiliki potensi pantai indah dan pada saat ini pada beberapa tempat sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Wisata ini sebetulnya dapat dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas dengan berbagai fungsi wisata yang spesifik seperti wisata bahari, wisata khas bentang alam (ciri fisik spesifik), wisata olah raga pantai dan wisata campuran lainnya. Kawasan wisata yang saat ini menonjol terutama antara lain :

1) Di Wilayah Bangka

- a. Pantai Matras, terletak di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat dan berjarak sekitar 35 Km dari Pangkalpinang. Pantai ini memiliki nuansa gelombang yang cukup tinggi sehingga memungkinkan untuk wisata olahraga dan *speed boat*.
- b. Pantai Tanjung Pesona, terletak di daerah Tanjung Pantai Matras.
- c. Pantai Parai Tenggara.
- d. Pantai Pasir Padi, terletak di Desa Air Itam Pangkalpinang. Pantai ini begitu landai dengan hamparan pasir yang sangat luas dan panjang dan saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat terutama pada hari libur.
- e. Pantai Air Anyir, terletak sekitar 15 Km dari Sungailiat ke arah Pangkalpinang. Di pantai ini biasanya ada upacara adat Rebo Kasan

sebagai bentuk budaya untuk melakukan upacara rasa bersyukur dan doa sebelum melaut.

- f. Pantai Romodong, terletak di Kecamatan Belinyu, sekitar 77 Km dari Sungailiat. Pantai ini menghadap ke Barat sehingga dari pinggir pantai dapat menikmati matahari tenggelam. Panjang pantai mencapai 4 Km, landai dan berpesisir halus dengan laut yang cukup bening. Di pantai ini telah tersedia *cottage* dan fasilitas lainnya.
 - g. Pantai Tanjung Kalian, terletak 9 Km dari Kecamatan Mentok. Di pantai ini terdapat mercusuar yang dibangun pada tahun 1962 dan terdapat monumen peringatan 21 pesawat Australia pada saat terjadinya peristiwa pemboman kapal laut Australia oleh Jepang tanggal 16 Pebruari 1942. selain itu, dipantai ini terdapat menara pantau guna melihat kapal-kapal yang akan berangkat dari pelabuhan Muntok.
 - h. Pantai Tanjung Ular
- 2) Di Wilayah Belitung
- a. Pantai Tanjung Tinggi yang terletak sekitar 35 Km dari Tanjung Pandan, dengan pemandangan batu granit yang menonjol.
 - b. Pantai Tanjung Kelayang, terletak 27 Km dari Tanjung Pandan.
 - c. Pantai Punai, terletak di bagian utara Pulau Belitung.

Wisata Budaya yang juga memungkinkan akan menarik wisatawan adalah :

- a. Upacara Rebo Kasan.
- b. Upacara Buang Jong, upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat pedalaman Sekak di daerah Belinyu sebagai tanda syukur dan tolak bala.
- c. Upacara Ceriak Nerang, upacara yang umum dilakukan setelah panen padi.
- d. Upacara Perang Perang Ketupa, yaitu upacara yang dilakukan masyarakat, khususnya daerah tempilang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
- e. Upacara Sepintu Sedulang, suatu prosesi membawakan makanan ke mesjid dengan menggunakan dulang. Ini mencerminkan sikap kegotong

royongan dan kebersamaan dalam masyarakat dan biasanya dilakukan pada saat perkawinan, kematian dan acara keagamaan.

- f. Upacara Sembahyang Kubur. Upacara ini dilakukan pada bulan ke empat atau ke lima tahun cina yang mengikuti perhitungan lebaran masyarakat keturunan Tionghoa/Cina.

Wisata sejarah, dapat dikembangkan terutama dengan mengembangkan Batu Balai sebagai wisata budaya, Wisma Ranggam, Vihara Dewi Kwan Im, Phak Kak Liam, dan Klenteng China Jebus.

1.2) Permasalahan

Di bidang sosial budaya, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bidang Pendidikan, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah:
 - a. Masih tingginya angka anak putus sekolah dalam keluarga-keluarga di kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan anaknya. Selain itu secara tidak langsung kondisi geografis juga sangat mempengaruhi dan sarana transportasi masih kurang sehingga anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai sekolah mereka. Adakalanya mereka harus melakukan perjalanan berkilo-kilo meter atau menggunakan perahu untuk mencapai sekolahnya karena belum ada sekolah di sekitar tempat tinggalnya.
 - b. Pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak masih sangat kurang sehingga motivasi belajar anak rendah. Kondisi ini dilatarbelakangi pendidikan dan pengetahuan orangtua mereka sendiri yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup rendah.

- c. Pendidikan moral khususnya pendidikan agama masih terabaikan. Pelajaran pendidikan agama di sekolah tidak diberikan oleh guru-guru agama, tetapi oleh orang-orang dari KUA kabupaten atau gereja setempat. Hal ini disebabkan karena sulitnya pengangkatan guru-guru agama dari Depdiknas maupun Departemen Agama.
- d. Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang, hal ini sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar di kelas. Guru yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal tentunya akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mereka, sehingga apa yang telah didapatkan selama pendidikan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga secara langsung anak didik mereka semakin bertambah pula pengetahuannya.
- e. Untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah diperlukan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah dan fasilitas lain yang memadai, namun kondisi yang ada saat ini cukup memprihatikan. Banyak gedung sekolah dalam kondisi atap yang bocor serta dinding sekolah yang mulai mengelupas sehingga tidak layak untuk melakukan kegiatan belajar dan juga sangat membahayakan bagi keselamatan mereka.
- f. Kondisi masih terbatasnya ketersediaan buku paket sangat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Buku paket masih terbatas bagi guru saja sehingga murid mesti mencatat terlebih dahulu sehingga memperlambat proses belajar mengajar di sekolah.
- g. Tingkat keaktifan guru masih kurang dalam memberikan pelajaran di sekolah, sehingga murid menjadi lebih pasif. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja guru yang cukup berat dan harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang harus mereka ajarkan. Selain itu juga dapat disebabkan kondisi fisik guru yang kurang bagus karena mereka juga harus berjalan dan naik perahu untuk mengajar di sekolah yang cukup menguras tenaga mereka sebelum mengajar.

- h. Masyarakat sekitar seringkali mendapat pendidikan non formal yang ditujukan tentang pengendalian kebakaran hutan, cara beternak, pemeliharaan ikan dalam keramba dan pengelolaan tanaman musiman. Pendidikan ini dilakukan oleh beberapa organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat, namun banyak yang gagal karena tidak ada pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus.
- (2) Bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah:
- a. Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak.
 - b. Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya kurang mencukupi. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka tidak dapat dilayani dengan cepat. Penurunan ini disebabkan karena kondisi geografis yang cukup sulit dan kesejahteraan hidup mereka belum terpenuhi sehingga mereka pindah ke tempat lain yang lebih mudah dan terjamin kesejahteraannya.
- (3) Bidang Pariwisata, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah:
- a. Peran pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan kepariwisataan seperti fasilitas pusat informasi pariwisata daerah, fasilitas dan jasa transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan untuk menuju ke obyek-obyek wisata dan sarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.
 - b. Peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan masih minim, di mana seharusnya masyarakat lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjadi prioritas utama untuk berusaha dan terlibat langsung di dalamnya.

1.2) Capaian Keberhasilan

Beberapa catatan keberhasilan bidang sosial budaya yang telah dicapai selama masa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- (1) Bidang pendidikan, capaian keberhasilannya antara lain :
 - a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru sangat membantu mereka dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah sehingga anak didik mereka juga semakin berkembang dan bertambah ilmu pengetahuannya. Oleh sebab itu ada beberapa guru yang mengambil pendidikan diploma II dan mendapat pelatihan dan penataran di Balai Pelatihan Guru (BPG). Mereka diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan bagi anak didiknya.
 - b. Semakin meningkat orang dewasa yang dapat membaca dan menulis terutama setelah ada program pendidikan informal bagi orang dewasa dari pemerintah yang berupa program Paket A dan Paket B. Selain itu juga terdapat Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berupa kegiatan cara merangkai bunga, memasak dan sebagainya. Program PKK ini sangat berguna sekali bagi muda-mudi dan ibu rumah tangga untuk menambah ketrampilan mereka sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
 - c. Pemerintah daerah setempat telah meningkatkan gaji para guru. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para guru dengan beban kerja serta kondisi yang lapangan cukup berat. Kondisi lapangan terletak di pelosok-pelosok sehingga membutuhkan mental yang kuat dan rasa tanggungjawab tinggi untuk mencerdaskan anak didik mereka.
 - d. Untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik maka diangkat guru bantu dan Guru Honorer (PTT).
 - e. Adanya pemberian beasiswa bagi mereka yang tidak mampu tetapi berprestasi untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK.

- f. Meningkatnya sarana/prasarana pendidikan mulai dari TK sampai PT dengan semakin meningkatnya Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB).
- (2) Bidang kesehatan capaian keberhasilannya antara lain:
- a. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan sektor kesehatan, salah satunya telah dilakukan melalui peningkatan peran bidan sebagai ujung tombak sampai ke desa-desa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan bidan yang berkualitas, telah di buka sekolah (Perguruan Tinggi Swasta) untuk Pendidikan Bidan DIII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penderita penyakit menular dan penyakit-penyakit degeneratif, serta tidak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
- (3) Bidang kepariwisataan, capaian keberhasilannya antara lain:
- a. Industri kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengandalkan potensi seni dan budayanya serta fasilitas, sarana dan prasarana telah menghasilkan *multiplier effect* yang sangat besar bagi masyarakat.
 - b. Berkembangnya berbagai usaha pendukung pariwisata, seperti usaha akomodasi, rumah makan, dan kerajinan, serta jumlah tenaga kerja yang terserap didalamnya.
 - c. Sumbangan industri pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

2) Analisis

2.1) Proyeksi Peluang

Beberapa peluang yang diproyeksikan akan muncul pada pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 tahun ke depan antara lain:

- (1) Bidang Pendidikan
- a. Pendidikan non formal yang telah diberikan kepada masyarakat berupa pelatihan-pelatihan seperti membuat keramba ikan, pengelolaan tanaman musiman dan beternak akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka apabila dapat dikembangkan dengan baik.
 - b. Warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena hampir di setiap kabupaten sudah terdapat sekolah sehingga di masa datang akan tersedia sumberdaya manusia yang berkualitas dan terampil.
 - c. Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai SDA yang belum dipergunakan secara maksimal, sehingga diharapkan para generasi muda yang telah memperoleh pendidikan dan mempunyai ketrampilan khusus dapat mengembangkan dan mempergunakan SDA yang ada secara maksimal dalam usaha membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Bidang Kesehatan
- a. Pemerintah daerah dan beberapa perusahaan yang berada di kabupaten/kota melakukan kerjasama untuk melengkapi sarana kesehatan masyarakat sekitar.
 - b. Semakin banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga swasta lainnya bergerak dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Adanya otonomi daerah mendorong pembangunan kesehatan dengan pendekatan lokal spesifik yaitu sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah setempat, sehingga permasalahan kesehatan masyarakat yang ada dapat segera teratasi dengan cepat.
 - d. Angka kematian bayi saat melahirkan nol, karena masyarakat telah menggunakan jasa tenaga bidan yang notabene mempunyai pendidikan khusus untuk membantu para ibu yang akan melahirkan sehingga resiko kematian ibu dan anak nol.

- e. Pencanaan Pelayanan Prima untuk kesehatan baik di puskesmas-puskesmas maupun di rumah sakit karena kebutuhan tenaga medis dan peralatan medis sudah memadai atau lengkap.
- (3) Bidang Kepariwisata
- a. Sarana transportasi yang dikembangkan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai daerah atau pulau lain cukup bervariasi, seperti jalur udara dan laut.
 - b. Adanya aksesibilitas lintas kabupaten maupun provinsi dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian ke obyek-obyek wisata.
 - c. Masih banyak daerah yang memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan sehingga dapat menarik investor untuk masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2) Proyeksi Ancaman

Beberapa ancaman yang diproyeksikan akan muncul pada pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 tahun ke depan antara lain:

- (1) Bidang Pendidikan
- a. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pola pikir mereka untuk kelanjutan kehidupan mereka dimasa depan. Kehidupan yang semakin sulit membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk dapat tetap bertahan dalam menjalani kehidupan ini.
 - b. Banyaknya anak yang putus sekolah dan banyaknya pengangguran akan berdampak pada semakin meningkatnya tindak kriminalitas di daerah setempat karena kesulitan biaya hidup.
- (2) Bidang Kesehatan
- a. Kondisi geografis dan keterisolasian wilayah mengakibatkan kurang efektifnya sistem pelayanan kesehatan.

- b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
 - c. Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah menyebabkan perhatian masyarakat akan kebutuhan kesehatan diabaikan.
 - d. Adanya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima.
 - e. Alokasi biaya untuk pembangunan kesehatan belum memadai.
- (3) Bidang Kepariwisata
- a. Keamanan dan keselamatan wisatawan selama perjalanan belum terjamin.
 - b. Kondisi lingkungan daerah tujuan obyek wisata yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan semakin menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah obyek wisata tersebut. Dampak lain yang ditimbulkan adalah menurunnya pendapatan asli daerah.
 - c. Kondisi lingkungan pantai yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran laut yang dapat merusak ekosistem laut.

2.3) Proyeksi Permasalahan

- (1) Bidang Pendidikan
- a. Fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, pengadaan meja kursi, buku-buku pelajaran dan sebagainya masih memprihatinkan dan kurang jumlahnya. Akibatnya, proses belajar mengajar di sekolah menjadi sangat terganggu.
 - b. Sarana dan prasarana transportasi yang masih sangat minim menjadi penghambat dalam kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. Guru dan murid masih jalan kaki maupun naik perahu sehingga membutuhkan tenaga yang cukup besar agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik selama di sekolah.

- c. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah setempat ataupun dari instansi terkait masih sangat minim sehingga banyak program pelatihan yang gagal.
- (2) Bidang Kesehatan
- a. Infrastruktur (transportasi, listrik, jalan) untuk sampai ke daerah-daerah yang terpencil belum memadai sehingga menyulitkan tenaga medis dalam melayani masyarakat daerah tersebut.
 - b. Data mengenai keluarga miskin dari BKKBN yang ada belum memadai untuk menemukan keluarga miskin, sehingga data riil keluarga miskin belum ada.
- (3) Bidang Kepariwisata
- a. Sebagian obyek wisata belum dikelola secara baik, dan belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai.
 - b. Aksesibilitas menuju ke obyek-obyek wisata masih terbatas.
 - c. Jarak tempuh perjalanan yang jauh antara obyek wisata yang satu ke obyek yang lain membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.
 - d. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan belum dapat berperan secara maksimal baik dari segi jumlah maupun kualitas.

2.4) Proyeksi Keberhasilan

Beberapa hal yang dapat menunjukkan proyeksi keberhasilan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 tahun ke depan adalah:

- (1) Bidang Pendidikan
- a. Terwujudnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cerdas, berwawasan global dan berbudi luhur.

- b. Dukungan dan peran serta orang tua dalam program wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak mereka dapat terwujud bahkan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
- c. Fasilitas dan sarana pendidikan sudah dapat terpenuhi dengan baik sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.

(2) Bidang Kesehatan

- a. Telah berdiri Rumah Sakit yang mempunyai peralatan medis yang cukup lengkap dan canggih sehingga ke depannya diharapkan dapat melayani masyarakat lebih baik.
- b. Peranan tenaga medis mulai masuk ke kampung-kampung untuk mengurangi cara-cara penyembuhan tradisional atau penggunaan dukun. Hal ini dapat berjalan dengan baik sejalan dengan adanya pengembangan perbaikan infrastruktur daerah.
- c. Angka penderita penyakit, gizi buruk, angka kematian bayi dan ibu hamil menurun bahkan nol
- d. Sarana Pelaksanaan kesehatan sudah lengkap.

(3) Bidang Kepariwisata

- a. Semakin dikembangkannya potensi atraksi-atraksi seni dan adat istiadat masyarakat daerah setempat yang beraneka ragam dapat menjadi daya tarik wisatawan.
- b. Semakin berkembangnya potensi obyek wisata budaya dan sejarah, kepurbakalaan, flora dan fauna menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
- c. Semakin berkembangnya potensi wisata bahari yang mempunyai pantai indah serta terumbu karang yang berwarna-warna dan masih alami serta beragam jenis ikan hias.

(3) Output

Prediksi kondisi sosial budaya yang akan dicapai di masa 20 tahun mendatang, akan memunculkan status keadaan kehidupan yang lebih baik, berupa peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta memiliki identitas budaya yang tinggi. Hal ini akan memberi efek terhadap penyediaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk membangun daerah di masa yang datang. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan budaya secara efektif dan efisien akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.5. SARANA DAN PRASARANA



1) Input

Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk melihat ketersediaan prasarana dan sarana kebutuhan publik seperti: transportasi, telekomunikasi, listrik, energi, air bersih, telematika, dan pemukiman serta pemanfaatannya dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Pembangunan bidang ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan yang stagnan bahkan menurun.

a. Prasarana dan Sarana Transportasi

Transportasi memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, yang berdampak lebih lanjut terhadap ketersediaan sumber daya. Transportasi juga berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu bangsa. Prasarana dan sarana transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup transportasi jalan, transportasi penyeberangan, serta transportasi udara. Transportasi, selain mengemban fungsi pelayanan publik juga dapat dikembangkan sebagai industri jasa.

Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil; melancarkan distribusi barang dan jasa; dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai wilayah perbatasan dan cenderung terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah.

Untuk transportasi darat, sarana jalan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun non ekonomi meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Data yang ada menunjukkan bahwa jalan nasional pada tahun 2004 mencapai 530,65 km yang seluruhnya merupakan jalan aspal. Dari jumlah ini, yang berada pada kondisi baik sepanjang 228,10 km, sisanya dalam kondisi sedang dan rusak mencapai masing-masing 162,51 km dan 140,04 km.

Tabel 2.44.
Jaringan Jalan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005

No	Kabupaten/Kota	Jaringan Jalan				
		Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten (Km)	Jumlah (Km)	%
1	Bangka	116.54	61.80	555.15	733.49	22.46
2	Bangka Tengah	65.38	59.38	214.75	339.51	10.39
3	Bangka Selatan	102.02	73.34	305.02	480.38	14.71
4	Bangka Barat	114.50	43.44	421.42	579.36	17.74
5	Belitung	69.16	132.78	454.03	655.97	20.08
6	Belitung Timur	49.25	142.88	266.00	458.13	14.03
7	*Pangkalpinang	13.80	5.55	-	19.35	0.59
Jumlah		530.65	519.17	2,216.37	3,266.19	
Persentase (%)		16.25	15.90	67.86		

Sumber : Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005

Tabel 2.45.
Karakteristik Jaringan Jalan di Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2005

Karakteristik Jalan		Status							
		Negara/Nasional		Provinsi		Kabupaten		Jumlah	
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)
1. Jenis Permukaan (km)									
A	Aspal	530.65	100.00	519.17	100.00	2,082.19	85.36	2,829.09	81.08
B	Kerikil	-				95.07	3.90	95.07	2.72
C	Tanah	-			-	262.00	10.74	262.00	7.72
D	Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		530.65		519.17		2,439.26		3,489.08	
2. Kondisi									
A	Baik	228.10	42.98	335.25	64.57	990.79	40.62	1,213.73	34.79
B	Sedang	162.51	30.63	95.92	18.48	632.58	25.93	1,004.47	28.79
C	Rusak	140.04	26.39	88.00	16.95	630.92	25.87	790.19	22.65
D	Rusak Berat	-	-	-	-	184.97	7.58	184.97	5.30
Jumlah		530.65		519.17		2,439.26		3,193.36	

Sumber : Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

Untuk jalan provinsi sampai dengan tahun 2005 mencapai sepanjang 519,17 km dengan permukaan aspal. Namun dari segi kualitas jalan, relatif mengalami peningkatan. Panjang jalan selama tiga tahun terakhir ditingkatkan rata-rata ± 40 km/tahun, serta dipelihara baik secara rutin ataupun berkala.

Sedangkan untuk jalan kabupaten yang pada tahun 2005 mencapai 2.439,26 km, menunjukkan variasi sebaliknya. Dominasi terbesar terdapat pada permukaan jalan aspal yang mencapai 2,082.19 km (85,36%) dibandingkan dengan permukaan kerikil yang hanya 95,07 (3,90%) km dan jalan tanah 262,00 km (10,74%). Begitu juga dengan kondisi jalannya. Data pada tahun 2005, menunjukkan bahwa kondisi baik untuk jalan kabupaten ini mencapai 990.79 km (40,62%), kondisi sedang mencapai 632,58 km dan sisanya dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Tabel 2.46
Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005

No	Karakteristik Jalan	Kabupaten/Kota							Jumlah	(%)
		Bangka	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Bangka Barat	Belitung	Belitung Timur	*Pangkalpinang		
1	Jenis Permukaan (km)									
	A Aspal	348.39	199.89	303.02	264.05	331.21	210.50	222.89	1,879.95	77.07
	B Kerikil	34.17	14.86		157.17	-	-	-	206.20	8.45
	C Tanah	172.59		2.00	-	122.80	55.50	-	352.89	14.47
	D Tidak Dirinci				-	-	-	-	-	
	Jumlah	555.15	214.75	305.02	421.22	454.01	266.00	222.89	2,439.04	
2	Kondisi								-	
	A Baik	177.16	66.61	303.02	361.07	331.21	99.42	-	1,338.49	54.87
	B Sedang	130.47	38.30	-	-	89.42	97.08	-	355.27	14.56
	C Rusak	185.30	12.15	2.00	-	33.40	14.00	-	246.85	10.12
	D Rusak Berat	62.22	97.69		60.35	-	55.50	-	275.76	11.31
	Jumlah	555.15	214.75	305.02	421.42	454.03	266.00	222.89	2,439.26	
3	Kelas Jalan								-	
	A Kelas I								-	
	B Kelas II								-	
	C Kelas III				264.15			222.89	487.04	19.97
	D Kelas III A	348.39							348.39	14.28
	E Kelas III B		214.75	305.02		454.03	45.13		1,018.93	41.77
	F Kelas III C						165.37		165.37	6.78
	G Tidak Dirinci	206.76			157.27		55.50		419.53	17.20
	Jumlah	555.15	214.75	305.02	421.42	454.03	266.00	222.89	2,439.26	

Sumber : Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

b. Aksesibilitas dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi

Jalan dari kota Provinsi menuju beberapa Ibukota Kabupaten dalam wilayah Pulau Bangka seperti menuju Kota Muntok, Toboali, Sungai Liat dan Koba merupakan jalan lintas provinsi/negara dan kabupaten, sehingga ke tempat-tempat tersebut mobilisasi termasuk lancar, sedangkan dari kota-kota kabupaten menuju ibukota kecamatan sebagian besar berkonstruksi kerikil.

Sebagai gambaran bahwa jarak paling jauh dari ibukota kabupaten dalam wilayah Pulau Bangka menuju ibukota Provinsi Pangkalpinang adalah sejauh 138

Km yaitu ke Kota Muntok-Kabupaten Bangka Barat. Aksesibilitas dari dan menuju Kota Pangkalpinang ke Muntok dapat dilakukan relatif mudah, mengingat kondisi jalannya tergolong baik dan telah tersedia angkutan umum bis $\frac{3}{4}$.

Tabel 2.47.
Karakteristik Jaringan Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan, Tahun 2005

No	Karakteristik Jalan	Kabupaten/Kota							Jumlah	Persentase (%)	
		Bangka	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Bangka Barat	Belitung	Belitung Timur	*Pangkalpinang			
1	Jenis Permukaan (km)										
	a	Aspal	348,39	199,89	303,02	264,05	331,21	210,50	222,89	1.879,95	77,07
	b	Kerikil	34,17	14,86		157,17	-	-	-	206,20	8,45
	c	Tanah	172,59		2,00	-	122,80	55,50	-	352,89	14,47
	d	Tidak Dirinci				-	-	-	-	-	-
		Jumlah	555,15	214,75	305,02	421,22	454,01	266,00	222,89	2.439,04	
	Persentase (%)									-	
2	Kondisi										
	a	Baik	177,16	66,61	303,02	361,07	331,21	99,42	-	1.338,49	54,87
	b	Sedang	130,47	38,30	-	-	89,42	97,08	-	355,27	14,56
	c	Rusak	185,30	12,15	2,00	-	33,40	14,00	-	246,85	10,12
	d	Rusak Berat	62,22	97,69		60,35	-	55,50	-	275,76	11,31
		Jumlah	555,15	214,75	305,02	421,42	454,03	266,00	222,89	2.439,26	
3	Kelas Jalan										
	a	Kelas I									
	b	Kelas II									
	c	Kelas III				264,15			222,89	487,04	19,97
	d	Kelas III A	348,39							348,39	14,28
	e	Kelas III B		214,75	305,02		454,03	45,13		1.018,93	41,77
	f	Kelas III C						165,37		165,37	6,78
	g	Tidak Dirinci	206,76			157,27		55,50		419,53	17,20
	Jumlah	555,15	214,75	305,02	421,42	454,03	266,00	222,89	2.439,26		

Sumber : Dinas PU, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

Sedangkan apabila melihat keterkaitan dengan Pulau Belitung, aksesibilitas dari dan menuju dua ibukota kabupaten yaitu Tanjung Pandan dan Manggar, saat ini telah tersedia alternatif menggunakan Kapal Cepat dari

Tanjung Pandan ke Pelabuhan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang) dengan lama perjalanan antara 3-4 jam. Penjelasan selengkapnya akan diuraikan dalam bahasan selanjutnya.

Khusus dalam Pulau Belitung itu sendiri, aksesibilitas antara Kota Tanjung Pandan dengan Kota Manggar sangat lancar dan kondisi jalan beraspal. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 87,5 Km.

c. Kondisi Prasarana Dan Sarana Transportasi Laut

Saat ini hubungan ke provinsi lain dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan transportasi air dan transportasi udara. Perhubungan laut merupakan transportasi yang sangat strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi Kepulauan untuk berinteraksi dengan provinsi lain maupun menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran transportasi ini.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sepuluh pelabuhan yang secara umum merupakan pelabuhan barang dan penumpang sekaligus barang. Berdasarkan fungsi eksisting, dua pelabuhan termasuk pelabuhan penyeberangan kelas II, yaitu Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Tanjung Ru, tiga pelabuhan berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Tanjung Kelian dan Pelabuhan Pangkalbalam serta Pelabuhan Manggar sedangkan sisanya merupakan pelabuhan pengumpan lokal. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Pada tahun 2003 mobilitas arus barang terlihat mengalami penurunan yang cukup tinggi terutama pada kegiatan bongkar yaitu menurun sekitar 75,12% dan pada kegiatan muat barang menurun sekitar 75,89%. Kunjungan kapal di Pelabuhan Pangkalbalam pada tahun yang sama masih didominasi oleh kapal-kapal pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 3.870 unit, sedangkan untuk pelayaran luar negeri dengan kapal berbendera nasional mencapai 115 unit sedangkan kapal berbendera asing mencapai 159 unit. Panjang Dermaga yang dimiliki 110 meter dengan kapal terbesar yang dapat berlabuh di pelabuhan ini adalah kapal berbobot mati 1.000 DWT.

Tabel 2.48.
Pelabuhan Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Fungsi Eksisting, Tahun 2004

No	Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota	Fungsi Eksisting
1	Muntok	Bangka Barat	Penyeberangan Kelas II
2	Tanjung Kalian	Bangka Barat	Pelabuhan Pengumpan Regional
3	Tanjung Gudang	Bangka	Pengumpan Lokal
4	Pangkalbalam	*Pangkalpinang	Pengumpan Regional
5	Sungaiselan	Bangka Tengah	Pengumpan Lokal
6	Tanjung Pandan	Belitung	Pengumpan Lokal
7	Tanjung Batu	Belitung	Pengumpan Lokal
8	Tanjung Ru	Belitung	Penyeberangan Kelas II
9	Manggar	Belitung Timur	Pengumpan Regional
10	Sadai	Bangka Selatan	Pengumpan Lokal

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Menurut data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (2001), Pelabuhan Manggar termasuk dalam kategori Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sifat dari PPI ini adalah:

- ◆ Melayani kapal berukuran sampai dengan 10 GT.
- ◆ umlah ikan yang didaratkan tiap hari sekitar 10 ton atau 2000 ton / tahun.
- ◆ Melayani Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan pantai.

Selanjutnya dengan merujuk data dari DKP (2001), PPI Manggar termasuk pelabuhan perikanan kelas D. Termasuk dalam perairan Pantai Timur Sumatera, khususnya berada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP-02) Laut Cina Selatan. Areal PPI Manggar seluas 2.794,00 m² dikelola oleh UPTD.

Prasarana transportasi laut yang tersedia saat ini di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat diidentifikasi sebagai :

1. Pelabuhan nelayan sebagai tempat pendaratan ikan yang berlokasi di Kota Toboali.
2. Pelabuhan PT. Timah yang hanya dipergunakan eksklusif untuk kepentingan PT. Timah.
3. Pelabuhan Sadai yang dipergunakan untuk angkutan orang dan barang dengan rute dari dan ke Palembang serta ke Belitung baik dengan menggunakan sarana kapal ferry maupun kapal cepat jenis *speedboat*.

Jumlah kapal yang mendarat di Pelabuhan Sadai selama tahun 2001 tercatat sejumlah 1.040 kapal yang meliputi jenis kapal khusus sejumlah 659 kapal, non pelayaran sejumlah 303 kapal dan kapal perintis 78 kapal.

Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat pelabuhan yaitu Pelabuhan Sungai Selan yang melayani jenis pelayaran rakyat. Pada umumnya kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sungai Selan adalah kapal yang mengangkut barang. Di mana pada tahun 2003 jumlah kapal yang mendarat di Pelabuhan Sungai Selan sebanyak 318 kapal, dengan kegiatan muat 5.196 ton. Dari beberapa pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa Pelabuhan Muntok merupakan pelabuhan yang paling banyak disinggahi kapal, sedangkan Pelabuhan Belinyu paling sedikit disinggahi kapal/perahu.

Pada tahun 2003 Pelabuhan Tanjung Pandan merupakan pelabuhan yang memiliki lalu lintas penumpang turun atau naik yang paling besar yaitu total mencapai 246.889 orang di mana penumpang yang naik mencapai 114.504 orang dan yang turun mencapai 132.385 orang. Sedangkan Pelabuhan Toboali merupakan pelabuhan yang paling sedikit yaitu total mencapai 9.542 orang dengan komposisi penumpang naik mencapai 3.546 orang dan turun mencapai 5.996 orang. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Lalu Lintas Penumpang dan Barang di Masing-masing Pelabuhan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2003

No	Nama Pelabuhan	Banyaknya Kapal/Perahu	Barang (Ton)			Penumpang (orang)		
			Bongkar	Muat	Jumlah	Turun	Naik	Jumlah
1	Toboali	1.132	10.264	780.952	791.216	5.996	3.546	9.542
2	Sungailiat	-	-	-	-	-	-	-
3	Belinyu	259	24.476	13.539	38.015	31.108	26.636	57.744
4	Sungai Selan	318	-	5.196	5.196	-	-	-
5	Muntok	4.073	268.289	114.504	382.793	-	-	-
6	Tanjung Pandan	1.324	351.257	58.346	409.603	114.504	132.385	246.889
7	Pangkalbalam	1.600	-	-	-	18.600	39.188	7.788
8	Manggar	1.586	-	1.046.519	1.046.519	58.346	59.772	118.118
Jumlah		10.292	654.286	2.019.056	2.673.342	228.554	261.527	490.081
Persentase (%)			24,47	75,53		46,64	53,36	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Dari sembilan pelabuhan yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, terdapat tujuh pelabuhan nasional dan dua pelabuhan yang dikelola daerah. Di mana secara umum panjang dermaga berkisar antara 35m hingga 519m. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Pelabuhan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

Status Administrasi	Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota	Panjang Dermaga (M)
Pemerintah Nasional	1 Muntok	Bangka Barat	72 m ² / 35 m
Pemerintah Nasional	2 Belinyu	Bangka	90
Pemerintah Nasional	3 Pangkalbalam	*Pangkalpinang	254
Pemda	4 Sungaiselan	Bangka Tengah	
Pemerintah Nasional	5 Tanjung Pandan	Belitung	318
Pemerintah Nasional	6 Tanjung Batu	Belitung	
Pemerintah Nasional	7 Tanjung Ru	Belitung	570 m ² / 35 m
Pemerintah Nasional	8 Manggar	Belitung Timur	110
Pemda	9 Sadai	Bangka Selatan	35

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

d. Kondisi Prasarana Dan Sarana Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan alternatif yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah lain diseluruh Nusantara, selain itu tentu saja menggunakan kombinasi transportasi darat dan laut. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) Bandar Udara, yaitu Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Pulau Belitung.

Berdasarkan data pada tahun 2004, memperlihatkan frekuensi kedatangan pesawat dan sebaliknya di Bandara Depati Amir dan sebanyak 2.525 pesawat dengan total penumpang sebanyak 237.944 orang yang datang dan sebanyak 241.894 orang yang berangkat. Arus penumpang ini mengalami peningkatan kedatangan dan keberangkatan pesawat sekitar 20,88% dari tahun 2003 dan peningkatan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dimana masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,79% dan 41.68%.

Untuk hal yang sama, frekuensi kedatangan pesawat dan sebaliknya di Bandara H. SA Hanandjoeddin di Pulau Belitung adalah 631 pesawat dengan total

penumpang sebanyak 39.533 orang yang datang dan sebanyak 37.262 orang yang berangkat. Arus penumpang ini mengalami peningkatan kedatangan dan keberangkatan pesawat sekitar 13,63% dari tahun 2003 dan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat mengalami peningkatan masing-masing 36,33% dan 48,70%.

Angkutan udara ini dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan jasa angkutan transportasi udara, di mana jenis pesawat yang melayani umumnya Boeing 737 seri 200, Adapun maskapai penerbangan yang beroperasi adalah untuk cakupan domestik seperti Sriwijaya Air, Batavia Air dan Adam Air. Jalur penerbangan yang dapat dijangkau oleh Bandara Depati Amir antara lain Jakarta, Palembang, Padang (Sumatera Barat), Batam, dan lain-lain untuk skala domestik/penerbangan domestik.

Pelabuhan H. AS. Hanandjoeddin merupakan pelabuhan domestik dengan klasifikasi C dengan kapasitas Boeing 737 seri 200. Walaupun berlokasi di Kabupaten Belitung, keberadaan pelabuhan ini adalah untuk melayani penerbangan komersial dari dan menuju kota-kota terdekat seperti dari Palembang dan Pangkal Pinang serta Jakarta dan seluruh masyarakat dari Pulau Belitung khususnya. Jarak tempuh dari Bandara ke ibukota Kabupaten Belitung Timur, Manggar adalah selama 1 jam lewat jalan darat. Saat ini dengan semakin komplitnya usaha jasa penerbangan, membuat harga tiket pesawatpun menjadi lebih murah dan ini membuat penerbangan dari dan menuju bandara inipun menjadi ramai. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.51 s/d Tabel 2.54.

Tabel 2.51.
Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara Depati Amir
Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1	Januari	203	203	19.075	17.162
2	Pebruari	216	216	16.143	19.193
3	Maret	246	246	21.627	20.064
4	April	234	234	16.137	19.343
5	Mei	187	187	18.797	19.345
6	Juni	195	195	19.077	19.975
7	Juli	207	207	22.289	21.066

No	Bulan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
8	Agustus	172	172	18.838	19.102
9	September	127	127	13.155	11.988
10	Oktober	264	264	25.032	29.181
11	Nopember	253	253	26.639	24.398
12	Desember	221	221	21.135	21.077
Jumlah Th. 2004		2525	2525	237.944	241.894
Jumlah Th. 2003		1990	1990	169.007	170.738

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov. Kep Babel, 2004

Tabel 2.52.

Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara H. AS. Hanandjoeddin
Tj. Pandan - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1	Januari	66	66	4.186	4.194
2	Pebruari	60	60	3.665	4.168
3	Maret	85	85	5.827	5.232
4	April	64	64	3.762	4.434
5	Mei	52	52	3.691	3.785
6	Juni	39	39	3.623	3.673
7	Juli	72	72	5.204	4.949
8	Agustus	61	61	4.309	4.306
9	September	34	34	3.781	3.951
10	Oktober	44	44	4.114	4.065
11	Nopember	95	95	7.346	8.121
12	Desember	45	45	4.388	4.531
Jumlah Th. 2004		717	717	53.896	55.409
Jumlah Th. 2003		631	631	39.533	37.262

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov. Kep Babel, 2004

Tabel 2.53.
Lalu Lintas Penerbangan Penumpang Di Bandara Depati Amir Dan H.A.S. Hanandjoeddin - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1	Januari	269	269	23.261	21.356
2	Pebruari	276	276	19.808	23.361
3	Maret	331	331	27.454	25.296
4	April	298	298	19.899	23.777
5	Mei	239	239	22.488	23.130
6	Juni	234	234	22.700	23.648
7	Juli	279	279	27.493	26.015
8	Agustus	233	233	23.147	23.408
9	September	161	161	16.936	15.939
10	Oktober	308	308	29.146	33.246
11	Nopember	348	348	33.985	32.519
12	Desember	266	266	25.523	25.608
	Jumlah	3.242	3.242	291.840	297.303

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov. Kep Babel, 2004

Tabel 2.54.
Lalu Lintas Cargo Di Bandara Depati Amir Dan H.A.S. Hanandjoeddin Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No	Bulan	Barang (Kg)		Bagasi (Kg)	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	Januari	119.609	108.441	324.176	283.117
2	Pebruari	114.872	91.278	265.823	253.977
3	Maret	152.516	83.417	289.571	280.434
4	April	135.063	82.907	271.471	244.517
5	Mei	127.379	78.202	339.856	253.032
6	Juni	147.750	98.197	349.849	276.230
7	Juli	148.419	91.537	328.323	259.469
8	Agustus	152.933	86.606	435.759	188.529
9	September	125.926	88.067	228.577	284.647
10	Oktober	118.002	71.292	290.570	319.693
11	Nopember	138.196	111.085	458.892	303.221
12	Desember	144.491	152.664	408.653	278.843
	Jumlah	1.625.156	1.143.693	3.991.520	3.225.709
	Total Bongkar dan Muat	2.768.849		7.217.229	
	Persentase%	58,69	41,31	55,31	44,69

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Prov. Kep Babel, 2004

Untuk sarana bandara yang meliputi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan, frekuensi penerbangan pada tahun 2004 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sebesar 2.525 dan 717 meningkat sebesar 78,81% dibanding tahun 2003.

e. Prasarana dan Sarana Listrik

Pada umumnya pembangunan ketenagalistrikan menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi geografi yang membutuhkan sistem interkoneksi yang hanya dapat dikembangkan secara efisien di pulau-pulau besar dengan penduduk yang padat, dan lokasi sumber energi yang terpusat seperti di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Kepadatan penduduk yang tidak merata yang menjadikan kendala efisiensi bagi pulau-pulau dengan kepadatan rendah, dan adanya pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk menyusun RUKD.

Sampai dengan tahun 2004, di 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sudah menikmati aliran listrik dengan sumber listrik dari 9 (sembilan) Pembangkit Listrik dengan daya terpasang mencapai 97.002 KW atau meningkat 136 KW dari daya terpasang pada tahun 2003 (63.866 KW), jumlah kapasitas tersambung mencapai 137.634,89 dan jumlah produksi mencapai 273.006,67 KWh atau mengalami penambahan produksi sebesar 16.035,07 KWh dari jumlah produksi pada tahun 2003.

Total jumlah pelanggan mencapai 136.683 atau bertambah sebanyak 605 pelanggan dari tahun 2003. Pelanggan terbanyak adalah untuk kebutuhan rumah tangga/rumah tinggal yaitu mencapai 127.753 pelanggan, kemudian perusahaan/usaha sebanyak 5.489 pelanggan, sarana ibadah sebanyak 2.438 pelanggan dan untuk industri sebanyak 116 pelanggan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.55.
 Daya Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (KW)
 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No.	Kabupaten/*Kota	PLTD	Jumlah	(%)
1	Bangka	58.137	58.137	59,93
2	Bangka Barat	3.731	3.731	3,85
3	Bangka Tengah	4.431	4.431	4,57
4	Bangka Selatan	7.683	7.683	7,92
5	Belitung	14.980	14.980	15,44
6	Belitung Timur	8.040	8.040	8,29
7	*Pangkalpinang	-	-	
	Total	97.002	97.002	

Sumber : PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

Tabel 2.56.
 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan PLN
 Cabang Bangka Belitung, Tahun 2003 – 2004

No	Uraian	Satuan	Jumlah	
			Tahun 2003	Tahun 2004
1	Jumlah Pembangkit	Unit	91	80
	Jumlah Pelanggan	langganan	136,078	136,683
	a. Rumah Tangga	langganan	127,377	127,753
	b. Industri	langganan	118	116
2	c. Dinas/Instansi/Gedung	langganan	583	769
	d. Sarana Ibadah	langganan	2,342	2,438
	e. Perusahaan/Usaha	langganan	5,453	5,489
	f. Lain-lain	langganan	205	118
3	Banyaknya daya terpasang	KW	96,866	97,002
4	Jumlah Kapasitas Tersambung	KVA	137,270.84	137,634.89
5	Jumlah Produksi	KWh	257,971.60	273,006.67

Sumber : PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

Perbandingan lainnya antara jumlah pelanggan dengan daya terpasang dan daya terpakai dimasing-masing kabupaten/kota, memperlihatkan bahwa Kota Pangkalpinang merupakan jumlah konsumen (pelanggan) terbanyak yaitu 50.767 pelanggan dengan daya terpakai mencapai 54.121,13 KVA, sedangkan daya pembangkitnya tidak ada, atau dengan kata lain kebutuhan listrik Kota Pangkalpinang di pasok dari beberapa pembangkit yang ada di Pulau Bangka. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No.	Kab. /*Kota	Banyaknya Langganan	Daya Terpasang Pembangkit (KW)	Daya Terpakai (KVA)
1	Bangka	19.903	58.137	21.004,98
2	Bangka Barat	14.439	7.683	11.620,09
3	Bangka Tengah	4.102	3.731	3.350,75
4	Bangka Selatan	8.102	4.431	6.728,60
5	Belitung	23.866	14.980	28.024,43
6	Belitung Timur	15.504	8.040	12.789,32
7	*Pangkalpinang	50.767	-	54.121,13
	Total	136.683	97.002	137.639,30

Sumber : PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

Tabel 2.58.
Jumlah Pembangkit (Unit) dan Daya Terpasang PLN
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2004

No.	Kabupaten/*Kota	Jumlah Pembangkit	Daya (KW)	
			Terpasang	Mampu
1	Bangka	34	58.137	37.265
2	Bangka Barat	7	7.683	4.900
3	Bangka Tengah	7	3.731	1.800
4	Bangka Selatan	11	4.431	2.690
5	Belitung	13	14.980	9.130
6	Belitung Timur	8	8.040	1.815
7	*Pangkalpinang	-	-	-
	Total	80	97.002	57.600

Sumber : PLN Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS 7 Kab/Kota

1.1) Permasalahan

Dari berbagai data dan analisis yang ada, dapat disimpulkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyediaan sarana dan prasarana adalah:

- (1) Untuk sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi

jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup.

- (2) Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi terganggu.
- (3) Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi.
- (4) Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada.
- (5) Permasalahan yang ada dalam sektor listrik, gas dan air adalah tidak meratanya pengembangan sektor ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana fisik untuk transportasi dan komunikasi.

1.2.) Capaian Keberhasilan

Indikator capaian keberhasilan dalam sektor ini adalah bertambahnya luas jalan yang telah dibangun, bertambahnya arus barang dan penumpang, dan pengembangan dermaga sebagaimana dibahas dalam bagian kondisi umum sektor pengangkutan. Namun demikian upaya ini perlu lebih dioptimalkan mengingat masih banyak wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih terisolasi. Secara umum beberapa keberhasilan yang telah dicapai meliputi:

- (1) Peningkatan panjang jalan dengan permukaan aspal.
- (2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik yang bisa disediakan.
- (3) Penempatan rambu-rambu lalu lintas & marka jalan.
- (4) Pembinaan kepada pengguna lalu lintas darat dan air.

2) Analisis

2.1) Proyeksi Peluang

Proyeksi peluang yang akan memberi dukungan bagi keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan bidang sarana dan prasarana pada khususnya meliputi:

- (1) Adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana umum yang sangat mereka butuhkan.
- (2) Adanya otonomi daerah dan desentralisasi bidang pekerjaan umum, yang memberi peluang bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengembangkan sistem sarana dan prasarana sesuai kondisi yang dihadapinya.
- (3) Keikutsertaan dan peran aktif para *stakeholders*.
- (4) Etos dan semangat kerja pegawai.
- (5) Adanya program kerjasama antar kabupaten, yang dapat mendorong terhindarnya duplikasi kegiatan atau program, yang pada akhirnya dapat meringankan beban anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- (7) Banyaknya sumber-sumber ekonomi yang belum digali.
- (8) Masih belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasana yang telah ada.
- (9) Peningkatan penarikan retribusi-retribusi bidang sarana.

2.2) Proyeksi Ancaman

Di masa datang, ancaman yang akan dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan terjadi dalam hal-hal berikut:

- (1) Perkembangan lalu lintas seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, dan perkembangan mobilitas penduduk yang menyertai pertumbuhan ekonomi di masa datang.
- (2) Sikap kritis masyarakat terhadap kondisi infrastruktur, yang mungkin justru menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horisontal.
- (3) Rendahnya kesadaran masyarakat pada pemeliharaan infrastruktur.
- (4) Tingginya tuntutan pemenuhan fasilitas infrastruktur.
- (5) Perkembangan perdagangan dan jasa.
- (6) Minimnya prasarana penunjang operasional maupun personil di lapangan.

2.3) Proyeksi Permasalahan

Sementara itu proyeksi permasalahan yang akan dihadapi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode 20 tahun mendatang antara lain:

- (1) Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, yang diakibatkan oleh kondisi geografis wilayah dan cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab bidang sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana yang belum memadai akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas umum, baik dari segi jumlah maupun kualitas.
- (3) Masih lemahnya kinerja kelembagaan, akibat masih dilakukannya penataan kelembagaan yang mungkin masih terkendala.
- (4) Masih kurangnya pengetahuan teknis pegawai di masing-masing bagiannya.
- (5) Masih rendahnya tingkat akurasi data yang akan muncul jika tidak dilakukan modernisasi sistem pendataan.
- (6) Masih kurangnya kenyamanan pengguna jasa angkutan umum.
- (7) Kurangnya SDM profesional di bidang transportasi dan prasarana pendukung transportasi.

2.4) Proyeksi Keberhasilan

- (1) Dukungan *political will* dari pemerintah daerah dan DPRD dalam pengembangan penyediaan infrastruktur.
- (2) Struktur organisasi yang miskin struktur kaya fungsi, efisien dan efektif.
- (3) Adanya dukungan dana.
- (4) Adanya program peningkatan penyediaan infrastruktur.

3) Output

Di bidang prasarana dan sarana, prediksi untuk 20 tahun ke depan akan menunjukkan peningkatan kebutuhan pemenuhan fasilitas ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan mengalami peningkatan. Perbaikan di bidang ini selain tampak dari segi kuantitas juga akan tampak dari segi kualitas. Perbaikan ini pada gilirannya akan memberi efek mendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya.

Fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil; melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus di wilayah perbatasan dan terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah.

2.1.6. PEMERINTAHAN

1) Input

Pemerintahan berkait dengan institusi atau kelembagaan yang menyiapkan aturan main (*rules of the game*) atau prosedur untuk mengatur interaksi antar masyarakat dan organisasi serta mengimplementasikan aturan-



aturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Peran pemerintahan ini sangat penting dalam rangka memberikan ruang gerak bagi pelaku ekonomi baik pelaku organisasi maupun individu, untuk ikut berpartisipasi secara aktif.

Dalam era otonomi daerah, telah terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan yang cenderung sentralistis ke pemerintahan yang desentralistis. Hal ini merupakan momentum penting bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang dan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, menuntut pemerintah daerah bersikap proaktif melakukan perubahan, baik perubahan peraturan, institusi, sistem maupun sumber daya manusia di daerah.

Didalam masyarakat, peranan institusi adalah mengurangi ketidakpastian dengan cara membentuk struktur interaksi masyarakat yang stabil. Tetapi kestabilan itu bukanlah hal yang mutlak, karena dapat terjadi perubahan institusi. Perubahan institusi merupakan proses yang kompleks karena perubahan itu akan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan aturan.

a. Kondisi Kelembagaan Pemerintah Provinsi

Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi sendiri, maka struktur organisasi pemerintahan mengalami perubahan dari struktur organisasi dua Kabupaten dan satu kota menjadi struktur organisasi pemerintah enam kabupaten dan satu kota. Peningkatan struktur pemerintahan tersebut membutuhkan pembentukan instansi/dinas yang sesuai dengan tantangan bertambah banyaknya kabupaten-kabupaten baru (pemekaran).

Pembahasan kondisi kelembagaan pemerintahan provinsi meliputi struktur organisasi yang telah ada, kuantitas dan kualitas pegawai, kondisi sarana dan prasarana kerja serta tim koordinasi penataan ruang daerah.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Guna menunjang jalannya pemerintahan, aparat pegawai pemerintah daerah memegang peran penting untuk memberikan kontribusi terhadap semua kegiatan pelayanan bagi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintah daerah maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih sebagai pemerintahan provinsi yang baru dibentuk, tugas dan fungsinya akan jauh lebih berat, mengingat begitu banyak dan beraneka ragamnya tuntutan yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Adapun kondisi pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Agustus 2003, antara lain meliputi :

Struktur organisasi pemerintahan yang sudah dibentuk antara lain :

Instansi/Dinas	Instansi/Dinas
1. Sekretariat Daerah	23. UPTD Balai Meteorologi
2. Sekretariat DPRD	24. Dinas Kesejahteraan Sosial
3. Sekretariat Perwakilan KPU	25. Bappeda
4. Biro Pemerintahan	26. Bapedalda
5. Biro Kesejahteraan Sosial	27. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Biro Umum dan Perlengkapan	28. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
7. Biro Kepegawaian	29. Badan Diklat
8. Biro Keuangan	30. Badan Kesbang Linmas
9. Biro Hukum	31. Badan Pengawas Daerah
10. Biro ekonomi	32. Badan Pusat Statistik
11. Biro Ekonomi dan Pembangunan	33. BKKBN
12. Biro Organisasi	34. BPN
13. Dinas Pendapatan Daerah	35. Kejaksaan Tinggi
14. Dinas Kimpraswil (PU)	36. Departemen Kehakiman dan HAM
15. Dinas Kesehatan	37. Kanwil Departemen Agama
16. Dinas Perhubungan dan Pariwisata	

Instansi/Dinas	Instansi/Dinas
17. Dinas Pendidikan	38. Depot Logistik
18. Dinas Pertanian dan Kehutanan	39. Kantor Perhubungan Pemda Provinsi
19. Dinas Kelautan dan Perikanan	40. Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat
20. Dinas Pertambangan dan Energi	41. Kantor Sertifikasi dan Pengendali Mutu
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42. Bupati
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM	43. Camat

c. Kuantitas Aparatur Pemda

Kuantitas Aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2003 tercatat sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan golongan I–IV total mencapai 1.357 pegawai.
2. Jumlah PNS berdasarkan eselon II–IV total mencapai 326 pegawai.
3. Jumlah PNS menurut lembaga Departemen/Non Departemen berdasarkan golongan I–IV total mencapai 1.393 pegawai.

d. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor pendukung yang memegang peran penting, terutama sangat membantu dalam menciptakan etos kerja dan kenyamanan bekerja.

Kondisi sarana dan prasarana kerja sampai dengan Agustus 2003 khusus di Provinsi relatif baik, namun berada dalam satu kompleks perkantoran yang terpusat di Kelurahan Air Itam. Namun pada beberapa kabupaten, pemekaran tergolong sederhana, di mana kantor/tempat kerja baik dari segi ruangan kerja maupun bangunan belum representatif (sewa rumah). Kondisi perangkat telepon termasuk faximile dan antar dinas rata-rata sudah tersedia, sehingga sangat membantu kelancaran komunikasi yang sifatnya mendesak. Dari beberapa

pengamatan kendaraan dinas (mobil/motor) belum tersedia dan ini menghambat mobilisasi pegawai.

e. Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Guna membantu Gubernur dalam konteks Rencana Tata Ruang di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah terbentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten. Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2004.

Struktur organisasi BKPRD, selaku Penanggung Jawab adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Penanggung Jawab yaitu Wakil Gubernur, Ketua; Sekretaris Daerah, Ketua Harian; Kepala Bappeda, Sekretaris; Kepala Dinas Kimpraswil dan Anggota terdiri dari Ketua DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kapolda, Dirut PT. Timah Tbk, Pemimpin Redaksi Harian Pos serta Kacab RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

A. Tugas dan Fungsi Pokok BKPRD

- ◆ Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kabupaten/Kota.
- ◆ Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- ◆ Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan sesuai dengan kewenangan Provinsi.
- ◆ Mengintegrasikan RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota, RTRN, RTR Pulau Sumatera, RTR Kawasan Tertentu dan RTRW Provinsi yang berbatasan.

- ◆ Melaksanakan kegiatan pengawasan, rekomendasi penertiban dan perizinan, terkait dengan rencana tata ruang.
- ◆ Mensosialisasikan, mengkoordinasikan penanganan permasalahan dan memfasilitasi serta supervisi.
- ◆ Memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya.
- ◆ Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi
- ◆ Menjabarkan kebijakan Gubernur dalam Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
- ◆ Menyampaikan laporan kepada Gubernur pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja)

Sekretariat dan Kelompok Kerja adalah bagian tidak terpisahkan dari BKPRD yang secara teknis melaksanakan hal-hal terkait dalam merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kabupaten/Kota. Pokja ini terdiri dari Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas dan fungsi pokok dari Pokja Perencanaan Tata Ruang antara lain :

- ◆ Menyiapkan bahan bagi BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang provinsi.
- ◆ Mengkoordinasikan penyusunan RTR yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Provinsi.
- ◆ Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

- ◆ Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Provinsi dalam rangka sinkronisasi RTRW Provinsi perbatasan.
- ◆ Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya.
- ◆ Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan usulan kebijakan untuk dilakukan pembahasan dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

Sedangkan tugas dan fungsi pokok dari Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara lain:

- ◆ Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi.
- ◆ Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang.
- ◆ Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Provinsi
- ◆ Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.
- ◆ Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan usulan kebijakan untuk dilakukan pembahasan dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

1.1) Permasalahan

Sebagai pemerintahan yang baru dibentuk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah:

- (1) Secara internal pemerintah hasil pemekaran mengalami persoalan yang cukup serius diantaranya terbatasnya infrastruktur fisik, kapasitas sumber daya manusia, rendahnya manajemen pemerintahan dan kapasitas keuangan daerah.
- (2) Sebagai suatu provinsi baru yang dibentuk, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung membutuhkan banyak personil dalam menjalankan tanggung jawab baru sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sebagai langkah praktis agar tugas-tugas inti pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan, kebijakan penyediaan aparatur Pemerintah pada awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih bertumpu pada ketersediaan orang yang bersedia bekerja sebagai calon pegawai pemerintah daerah, ketimbang mempertimbangkan kemampuan-kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh calon pegawai yang bersangkutan.

- (3) Keterbatasan personil yang memiliki keahlian, menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang dirumuskan dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan beban kerja masing-masing bagian/unit kerja di suatu dinas, badan, dan/atau kantor.
- (4) Upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan selama ini lebih banyak yang berwawasan sektoral, dan ditujukan pada instansi-instansi sektoral sehingga mekanisme koordinasi, integrasi dan sinergitas antar lintas sektoral belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (5) Prinsip otonomi kampung belum mampu diterjemahkan oleh masyarakat kampung dalam menjalankan proses pemerintahan kampung. Sesuai dengan semangat UU No. 32/2004, kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (6) Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan persoalan keterisolasian terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
- (7) Lokasi wilayah yang sangat jauh antar pemerintah kabupaten menyebabkan kesulitan dalam berkoordinasi.
- (8) Batas administrasi yang tidak jelas menyebabkan terjadinya sengketa batas antar pemerintah daerah.

1.2) Capaian Keberhasilan

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk 3 (tiga) Sekretariat, 9 (sembilan) Biro, 12 (dua belas) Dinas, 10 (sepuluh) Badan dan 9 (sembilan) Kantor. Sekretariat terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Perwakilan KPU. Biro terdiri dari Biro Pemerintahan, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Organisasi. Dinas terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kimpraswil (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, UPTD Balai Meteorologi serta Dinas Kesejahteraan Sosial. Badan terdiri dari Bappeda, Bapedalda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Diklat, Badan Kesbang Linmas, Badan Pengawas Daerah, Badan Pusat Statistik, BKKBN, dan BPN. Sedangkan Kantor yaitu Kejaksaan Tinggi, Departemen Kehakiman dan HAM, Kanwil Departemen Agama, Depot Logistik, Kantor Perhubungan Pemda Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Sungai Liat, Kantor Sertifikasi dan Pengendali Mutu, Kantor Bupati, dan Kantor Camat.

2) Analisis

2.1) Proyeksi peluang

- (1) Adanya pemekaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dan mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi baru, memiliki momentum yang baik untuk merancang sistem pengelolaan pembangunan yang partisipatif, menata, membentuk dan mengembangkan kelembagaan dan organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan reformasi pembangunan di segala bidang.
- (3) Tersedianya kesempatan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dalam arti terlatih, terampil, mampu (*capable*), menguasai metodologi dan penerapannya, serta mampu mengembangkan inovasi-inovasi bagi terwujudnya misi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif.

2.2) Proyeksi ancaman

- (1) Pemekaran yang dilakukan secara tidak hati-hati justru akan memunculkan konflik vertikal maupun horizontal.
- (2) Penataan kelembagaan yang tidak didasarkan pada kajian-kajian secara mendalam (*need assesment*) akan memunculkan persoalan kerumitan tata hubungan pemerintahan.
- (3) Kapasitas aparat pemerintah dan lembaga yang tidak segera dibenahi akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
- (4) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan yang tidak difokuskan pada tema-tema lintas sektoral pemerintahan provinsi (seperti perencanaan daerah, pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pengembangan kelembagaan) akan mengganggu mekanisme koordinasi, integrasi dan sinergitas antar lintas sektoral.
- (5) Stabilitas sosial, politik dan ekonomi yang tidak menentu secara umum akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

2.3) Proyeksi permasalahan

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai keterbatasan (*the limits of government*) sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan semua hal sendirian (*self government*). Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengelola hubungan antar aktor di lingkungan sekitar (*networking*) baik dengan masyarakat maupun dengan swasta.
- (2) Terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah daerah menyebabkan belum efektifnya unit-unit organisasi pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Internalisasi pemahaman substansi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah yang belum maksimal akan mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan.

2.4) Proyeksi keberhasilan

- (1) Terciptanya mekanisme koordinasi, integrasi dan hubungan kerjasama yang sinergis antar daerah, lintas sektoral, antar instansi ataupun antar unit-unit organisasi pemerintah sehingga keterisolasian wilayah dapat teratasi.
- (2) Tersedianya sumber daya manusia berkualitas dan profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- (3) Tertatanya kelembagaan pemerintahan yang mampu menyerap kebutuhan akan pelayanan terhadap masyarakat.

3) Output

Dengan semakin stabilnya sistem pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berbekal pengalaman menjalankan sistem pemerintahan sebelum terbentuknya kabupaten ini, diprediksikan periode 20 tahun mendatang akan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Mampu memberikan pelayanan prima dan bermutu kepada masyarakat, mampu memberikan respon dalam mengapresiasi perkembangan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjalankan struktur kelembagaan secara efektif.

BAB III

VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3.1. PERMASALAHAN UMUM PEMBANGUNAN

1. Kerusakan lingkungan dan berkurangnya lahan produktif sebesar hampir 40% dan pencemaran sumber air bersih akibat aktivitas penambangan inkonvensional (TI).
2. Kondisi topografi wilayah yang berupa kepulauan menyebabkan pembangunan dan jangkauan pelayanan publik cenderung tidak merata.
3. Tingginya tingkat pengangguran (baik pengangguran terbuka maupun pengangguran tersembunyi) sebesar 9,4% dengan tingkat pendidikan yang rendah (SD dan SLTP).
4. Tingkat ketergantungan pasokan pangan (khususnya beras) yang sangat tinggi.
5. Maraknya *illegal fishing* dan perampokan di laut.
6. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal.
7. Rendahnya koordinasi dan ketidakjelasan arah pembangunan atau kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
8. Keterbatasan pasokan dan distribusi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi penghambat minat investor menanamkan modalnya.
9. Kualitas SDM yang masih rendah (tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD cukup tinggi).

3.2. MODAL DASAR PEMBANGUNAN

1. Potensi kekayaan sumber daya alam (perkebunan, pariwisata dan perikanan) yang melimpah dan belum dikelola secara optimal.
2. Berada dalam jalur perlintasan perdagangan nasional dan internasional yang sangat strategis dan mudah dijangkau.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut dan udara) yang memadai.
4. Sejak dahulu merupakan daerah yang terbuka, sehingga mudah menerima perubahan dan mampu menyikapi perbedaan.
5. Komitmen dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

3.3. VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2005–2025)

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”

Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable growth through poverty*) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Terciptanya lapangan kerja akan meningkatnya pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk membiayai (*ability to pay*) pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pada akhirnya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan tercipta.

Mewujudkan wilayah **agrikultur/pertanian** di sini lebih ditekankan pada upaya memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil produk pertanian unggulan seperti lada, cengkeh, karet, ikan dan produk perikanan. Selain hasil tambang timah (yang kemungkinan dalam 10 tahun ke depan kandungannya akan habis) sejak dulu Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil utama lada dan karet di Indonesia. Belakangan ini (semenjak krisis ekonomi dan berlanjut diberlakukannya otda) kebijakan peningkatan aktivitas perekonomian telah beralih ke sektor pertambangan yang relatif cepat terlihat hasilnya (*quick cash*) namun berpotensi merusak lingkungan hidup. Sektor-sektor yang memiliki jaminan keberlanjutan (*sustainable*) seperti pertanian, perkebunan dan perikanan selalu dikalahkan oleh sektor yang *quick cash* seperti tambang sehingga tidak masuk dalam prioritas pengembangan. Menyadari bahwa kandungan bahan tambang termasuk SDA yang tak terbarukan (*non-renewable*), memiliki keterbatasan pelayanannya maka kebijakan pembangunan daerah harus dibalik dengan lebih berpikir kepentingan jangka panjang yakni pengembangan sektor-sektor yang lebih menjamin keberlanjutannya seperti pertanian.

Agrikultur di sini haruslah dimaknai secara luas meliputi baik sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan. Secara tradisional sebelumnya masyarakat Provinsi Bangka Belitung adalah petani. Setelah krisis moneter 1997 yang dibarengi dengan jatuhnya harga berbagai komoditas unggulan seperti lada dan karet telah memaksa masyarakat petani Bangka Belitung beralih ke kegiatan yang dianggap akan lebih mampu menopang hidup, yakni dengan terjun ke Tambang Inkovensional (TI), yang sebelumnya dimonopoli oleh negara. Melihat kondisi eksisting yang ada saat ini -dengan menipisnya kandungan bahan tambang- mengembalikan masyarakat ke pertanian dan perkebunan adalah upaya yang patut dilakukan. Sementara bekas galian tambang timah yang terbengkalai dapat dipertimbangkan untuk budidaya perikanan darat. Penelitian LIPI belakangan ini mengisyaratkan kemungkinan tersebut, meski dengan prasyarat tertentu.

Secara kuantitatif ukuran pencapaian visi ini tentunya bisa dilihat pada sejauh mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu mengubah komposisi

PDRB daerah penduduk secara sektoral dari pertambangan menjadi pertanian beserta sektor ikutannya. Sektor ikutan yang dimaksudkan adalah sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai contoh sektor ikutan tersebut di antaranya adalah sektor industri pengolah hasil pertanian, sektor transportasi, sampai pada akhirnya sektor perdagangan dan jasa. Di samping itu, luas wilayah pertanian, perkebunan serta perikanan beserta infrastruktur (irigasi, akses pasar dan sebagainya) yang telah terbangun juga merupakan ukuran capaian yang perlu diperhatikan. Tak kalah pentingnya adalah, untuk menciptakan nilai tambah yang optimal, seperti banyaknya industri pengolahan pasca produksi pertanian juga menjadi tolok ukur yang perlu mendapat perhatian.

Secara kualitatif keberhasilan capaian visi ini bisa dilihat dari berubahnya sikap mental masyarakat yang lebih berorientasi jangka panjang. Dari yang semula bersikap serba kekinian menjadi lebih mementingkan keberlanjutan kehidupan jangka panjang. Dari berpikiran hanya bagaimana mengeksploitasi SDA sebesar-besarnya dan mendapat keuntungan sekarang menjadi berpola pikir kelestarian SDA yang dimiliki demi masa depan. Dari sikap yang tak peduli kelestarian lingkungan menjadi pemelihara kelestarian.

Sebagai wilayah kepulauan, sangat masuk akal bila **kebaharian** menjadi visi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Bangka Belitung sangat strategis dan terkenal memiliki potensi bahari yang berupa hasil laut serta pantai yang luar biasa besar. Bangka Belitung memiliki kekayaan hasil laut berupa ikan berbagai jenis dalam jumlah yang melimpah, sehingga pantas jika disebut sebagai elalase kelautan wilayah barat Indonesia. Selain itu pantai-pantai yang dimiliki juga luar biasa indah dengan pasir putih padatnya (bahkan di beberapa pantai berpasir kuning). Sayangnya semua potensi yang luar biasa ini belum banyak disadari dan dikembangkan sebagai sektor andalan seperti halnya di Bali. Kebaharian di sini harus diterjemahkan secara luas, tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya.

Indikator pencapaian visi kebaharian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara kuantitatif, peningkatan jumlah tenaga kerja yang tercurah pada

sektor perikanan laut, kepariwisataan beserta sektor ikutannya menjadi indikasinya. Indikator lain dapat dilihat dari meningkatnya produksi perikanan beserta industri pengolahannya (pengawetan ikan, pengalengan hasil laut dsb). Perkembangan sarana prasarana perikanan laut seperti perkembangan jumlah kapal penangkap ikan, tempat pelelangan ikan (TPI), industri pengolahan hasil laut, dsb juga perlu mendapat porsi sebagai ukuran keberhasilan.

Di bidang transportasi ukuran yang bisa dipergunakan antara lain berapa banyak pelabuhan laut yang terbangun, berapa besar pertumbuhan arus barang dan orang dari/ke Bangka Belitung. Kelancaran arus barang lewat pelabuhan tentunya juga akan mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan yang pada gilirannya akan menekan/menurunkan *cost of living* Bangka Belitung saat ini yang cukup tinggi.

Industri pariwisata memiliki efek multiplier yang besar bagi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Industri pariwisata memiliki cakupan mulai dari bisnis rumahan, bisnis eceran sampai bisnis penerbangan. Di sektor pariwisata beserta sektor ikutan, keberhasilan dapat ditengarai dari perkembangan daerah tujuan wisata (DTW) pantai di Bangka Belitung dalam masa 20 tahun. Peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah tujuan/objek wisata, pajak hotel dan restoran serta sumber-sumber penerimaan lain yang terkait merupakan ukuran lain. Perkembangan sektor-sektor ikutan seperti jumlah hotel, restoran, hiburan, *travel agent*, sampai dengan perkembangan UKM (penghasil handicraft, souvenir, makanan) merupakan indikator yang juga patut dipertimbangkan.

Untuk mencapai visi di atas tentunya dibutuhkan dukungan **sumber daya manusia yang handal**. Guna pengembangan sektor agrikultur dan bahari di Bangka Belitung tentunya diperlukan aktor pelaksana pembangunan yang memiliki kompetensi, kapabilitas serta produktivitas yang tinggi. Untuk itu visi pengembangan SDM menjadi pelengkap/*komplementary* dari visi-visi yang lain.

Ukuran tercapainya visi ini dapat dilihat dari perkembangan dunia pendidikan seperti meningkatnya jumlah sekolah, meningkatnya sarana-prasarana pendidikan, meningkatnya tingkat partisipasi anak bersekolah, menurunnya tingkat buta huruf, menurunnya angka putus sekolah, tercapainya wajib belajar 12 tahun, membaiknya komposisi penduduk menurut pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya diindikasikan oleh pendidikan saja melainkan juga bagaimana tingkat kesehatan. Dengan demikian ukuran tentang angka harapan hidup, tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat kematian bayi menjadi indikator yang baik untuk menilai pencapaian visi pengembangan SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat diukur dengan meningkatnya peringkat indeks pembangunan manusia (HDI) Provinsi Bangka Belitung. Secara umum kualitas SDM akan tercermin dari produktivitasnya yang semakin tinggi.

Pemerintah yang amanah merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk terwujudnya visi ini. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator, dinamisator, dan *entrepreneur* dalam pembangunan serta abdi masyarakat.

Pencapaian visi pemerintahan yang amanah dapat dilihat dari indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, jumlah perda yang berorientasi pada kepentingan publik, tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, akses masyarakat terhadap informasi publik, dan sebagainya.

3.4. MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2005–2025)

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut di atas akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan berikut ini:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang

dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan lmtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (*good local governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

3.4.1. Indikator Misi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Indikator pencapaian misi pengembangan potensi ekonomi lokal adalah sebagai berikut:

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
1. Rata-rata Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas ADH Konstan (Persen)	4,5 (2005)	4,98	5,34	5,45	4,85
2. Rata-rata kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	22,94	23,79	23,86	23,96	24,45
3. Rata-rata kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30
4. Rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	22,03	22,24	22,66	22,69	23,27
5. Rata-rata kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (%)	13,81	13,29	13,39	13,60	14,29
6. Rata-rata kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi (%)	3,29	3,01	2,88	2,74	2,56
7. Rata-rata kontribusi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB	6,14	5,83	5,63	5,41	5,21
8. Peningkatan Peran UKM Jumlah Unit Usaha kecil	1.042	1.100	1.150	1.200	1.300

Sumber : Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.4.2. Indikator Misi Peningkatan Kualitas SDM

Indikator pencapaian misi peningkatan kualitas SDM adalah sebagai berikut:

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
Pendidikan					
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah					
a. SD	98,60	98,33	98,56	98,79	99,0
b. SMP/MTs	85,98	85,73	89,82	93,91	98,00
c. SMA/SMK/MA	50,13	57,97	70,31	82,65	95,00
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah					
a. Usia 7-12	98,10	100	100	100	100
b. Usia 13 - 15	81,64	98,00	100	100	100
c. Usia 16 - 18	45,63	80,00	100	100	100
3. Angka Putus Sekolah					
a. SD	0,91	0,60	0,40	0,20	0,11
b. SMP	2,33	2,30	2,10	1,80	1,44

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
c. SMU/SMK	2,22	1,50	1,30	1,10	0,90
4. Angka Mengulang Kelas					
a. SD	8,96	7,96	6,71	5,21	3,46
b. SMP	0,80	0,65	0,50	0,35	0,20
c. SMU/SMK	0,36	0,32	0,26	0,18	0,10
5. Standar Pendidikan Guru setara S1					
a. SD	2,98	48,51	80,85	100,00	100,00
b. SMP	46,79	73,39	100,00	100,00	100,00
c. SMU/SMK)	70,48	85,24	100,00	100,00	100,00
6. Angka Indeks Melek Huruf	91,7	92	94	96	97
7. Angka Partisipasi Kasar untuk SD / Mi	114,83	129,00	130,00	130,00	130,00
8. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP dan yang sederajat	91,35	95,36	102,42	107,84	113,26
9. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA dan yang sederajat	67,97	76,74	87,83	98,92	110,00
10. Angka Kelulusan Siswa dalam Ujian Akhir Nasional (UAN)					
a. SD/MI	6,46	6,27	6,98	7,24	7,50
b. SMP/MTs	5,70	6,09	6,48	6,87	7,25
c. SMA/SMK/MA	5,98	6,24	6,47	6,73	7,00

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
Kesehatan					
1. Usia Harapan Hidup	68,0	72,4	73,0	74,0	75,0
2. Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup	32	23	20	15	10
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran	138	98	80	70	60
4. Persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan	88,6	90	92	95	100
5. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	19,5	24	30	35	40
6. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	4,1	6	8	10	12
7. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	4,7	11	13	15	17
8. Rasio perawat (D3) per 100.000 penduduk	23,4	117,5	125	137	150
9. Rasio bidan per 100.000 penduduk	36	100	105	110	120
10. Rasio sanitarian per 100.000 penduduk	7	40	45	50	55
11. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	7,9	2,1	1,5	1,0	0,5
12. Persentase Posyandu Mandiri	17	30	40	50	55
13. Persentase cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	40,43	65	70	75	80
14. Angka Kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk	55,5	30	25	20	15

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
Kependudukan					
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,2	2,1	2,0	1,8	1,7
2. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)	2,4	2,2	2,1	2,0	1,8
3. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)	1,45	2	4	6	10

Sumber : Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.4.3. Indikator Misi Pemerintahan yang Amanah

Indikator pencapaian misi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah adalah sebagai berikut:

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
Good Governance					
1. Indeks Korupsi (<i>Corruption Index</i>)	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10
2. Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan	5	10	15	25	50

Sumber : Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.4.4. Indikator Misi Indikator Pemerataan Pembangunan

Indikator pencapaian misi pemerataan pembangunan adalah sebagai berikut:

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian Misi Pemerataan			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
1. Indeks Pembangunan Perempuan (<i>Gender Development Indeks</i>)	47,7 (2002)	50	52	55	58
2. Indeks Pemberdayaan Perempuan (<i>Gender Empowerment Measurement</i>)	38,9 (2002)	40	42	45	48
3. Prosentase masyarakat pra sejahtera	11,80 (2004)	10	9	8	7.5
4. Rasio pekerja perempuan	31 (2002)	33	35	37	40
5. Rasio Perempuan dalam Parlemen (DPRD)	4,4	7	10	15	25
6. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses terhadap fasilitas air bersih	48,9 (2002)	45	40	37,5	35

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian Misi Pemerataan			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
7. Prosentase penduduk yang tidak memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan	35,3 (2002)	30	27,5	25	22,5

Sumber : Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.4.5. Indikator Misi Pelestarian Lingkungan Hidup

Indikator pencapaian misi pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Indikator Pencapaian Misi Daerah	Kondisi Sekarang	Indikator Capaian Misi Pelestarian Lingkungan Hidup			
		2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
Lingkungan Hidup					
1. Angka <i>Illegal Fishing</i> per tahun	12	8	6	4	0

Sumber : Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.5. PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2005–2025)

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini serta prediksi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dalam 20 tahun mendatang, prioritas pembangunan akan dibagi menjadi 4 tahap pembangunan lima tahunan. Penentuan prioritas dalam konteks ini, tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan hal-hal lain yang tidak menjadi prioritas pada periode terkait. Prioritas dalam konteks ini memberikan perhatian utama, tapi tidak berarti seluruh sumber daya hanya dialokasikan untuk hal yang dianggap prioritas.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pentahapan prioritas pembangunan lima tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

BIDANG PEMBANGUNAN	PRIORITAS LIMA TAHUNAN			
	2005–2012	2012–2017	2017–2022	2022–2025
a. Lingkungan Hidup	II	II	V	VI
b. SDM & Kependudukan	IV	IV	II	II
c. Ekonomi dan SDA	III	I	I	I
d. Sosial, Budaya dan Politik	V	VI	V	IV
e. Prasarana dan sarana	I	III	III	V
f. Pemerintahan	VI	V	IV	III

Sumber: Data olahan dari hasil survei dan *expert judgement*, 2006.

3.5.1. Tahun 2005–2012 (Tahap Pembangunan Lima Tahun Pertama)

(Fokus: Penyiapan sarana dan prasarana serta penanganan lingkungan hidup)

Salah satu faktor penting berkembangnya investasi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Infrastruktur di sini termasuk di dalamnya adalah infrastruktur fisik dan nonfisik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya.

Hal kedua yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah berkaitan dengan penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Penurunan kualitas fisik lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung sudah sangat memprihatinkan dan jika tidak ada kebijakan serta upaya konkrit yang serius dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kondisi ini akan sangat

mengganggu kehidupan masyarakat saat ini dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Lima tahun pertama pada intinya adalah masa persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan tahap berikutnya serta penataan kembali lingkungan hidup pasca pertambangan.

3.5.2. Tahun 2012–2017 (Tahap Pembangunan Lima Tahun Kedua)

(Fokus: Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup)

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama

dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

3.5.3. Tahun 2017–2022 (Tahap Pembangunan Lima Tahun Ketiga)

(Fokus: Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM)

Pada lima tahun ketiga, perhatian perlu diberikan pada bagaimana memberi nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi ini. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang dapat menjadi tumpuan utama dalam tahap yang ketiga ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dalam semua aspek menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk menciptakan ketatapemerintahan yang baik dan amanah. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki provinsi ini.

3.5.4. Tahun 2022–2025 (Tahap Pembangunan Lima Tahun Ke empat)

(Fokus: Ekonomi, SDM dan Penguatan Birokrasi)

Tahap keempat adalah tahap penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan melakukan hal berikut:

- o Memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional.
- o Promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung.
- o Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah. Sebagai contoh: pengembangan sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan kekayaan alam.

Pada tahap ini, berbagai aspek yang terkait dengan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi pada khususnya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang semakin pesat. Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Berbagai dampak negatif atau eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan, kesempatan berusaha dan sebagainya harus dijadikan perhatian untuk dituntaskan dan ditangani. Dengan demikian, pada akhir 20 tahun pembangunan, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan terwujud.

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan serta Masyarakat Babel yang Sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi makro, yaitu pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

4.1. Arah Pembangunan Umum

4.1.1. Arah Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal

Arah pembangunan ekonomi lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PDRB per kapita masyarakat. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA yang berpotensi merusak lingkungan menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya ini dilakukan secara simultan dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. Fokus pembangunan dan investasi dititikberatkan pada sektor-sektor pertanian, perikanan (laut dan darat), industri pengolahan dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha dan bekerja serta mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi; komitmen terhadap perjanjian ekonomi internasional dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah; serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat; mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; serta meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal.
4. Mendorong percepatan pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
5. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah pedesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan

adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

6. Pembangunan perkampungan/pedesaan didorong melalui pengembangan agri-bahari terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas SDM di perkampungan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perkampungan dan kota-kota kecamatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja dan intervensi; serta kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian dan kelautan.
7. Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor perkebunan dan kelautan dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat menggantikan sektor pertambangan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. Peningkatan efisiensi, modernisasi, serta nilai tambah perkebunan dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agri-bahari yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
8. Pembangunan perikanan terutama perikanan laut diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang wilayahnya dibatasi oleh laut. Di samping akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan

kapasitas petani ikan dan nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat maka pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi sehingga mampu untuk diekspor dan meningkatkan penerimaan daerah. Pembangunan sektor perikanan ini melalui peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di zona ekonomi eksklusif terus diintensifkan untuk menjamin pendapatan optimal petani ikan dan nelayan serta meningkatkan pendapatan.

9. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra provinsi ini sebagai wilayah agri bahari. terbentuknya citra daerah wisata tentu akan memperluas kesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan kepariwisataan dilakukan secara arif dan berkelanjutan terutama memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah bahari yang dikelilingi oleh pantai nan indah. Penitikberatan pada sektor wisata bahari tidak meninggalkan potensi wisata di provinsi ini yang juga layak digarap yaitu sebagai wisata sejarah dan wisata budaya.
10. Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan dengan terlebih dahulu membangun fondasi kegiatannya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Fondasi tersebut dibangun dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi,

serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing, and Quality/MSTQ*); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

11. Pengembangan transportasi laut terus ditingkatkan dan diutamakan pada pembangunan pelabuhan sesuai dengan tatanannya dan pengoptimalan fungsi pelabuhan. Pembangunan sektor ini akan bermanfaat untuk mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain. Sedangkan untuk transportasi darat terus ditata dan dikembangkan termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan. Perluasan ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
12. Pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada upaya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
13. Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari. Pembangunan koperasi dan UKM dikembangkan dengan stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen. Pembinaan koperasi dan UKM pada akhirnya diarahkan pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

14. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi lokal dan memperlancar distribusi dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sistem distribusi yang efisien dan efektif akan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah/negara, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau. Optimalisasi jalur perdagangan internasional dengan dibukanya Alur Kapal Internasional 1 dan 2 (AKI 1 dan AKI 2) yang melewati Selat Gaspar dan Selat Karimata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung upaya memperlancar arus barang dan jasa serta membuka peluang menjadikan pelabuhan-pelabuhan baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung sebagai pelabuhan transit internasional.
15. Penanaman modal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak diciptakan. Infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan jasa telekomunikasi adalah prasarana yang sangat menentukan keberhasilan menggandeng investor-investor dari luar. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut serta segala isi yang ada di dalamnya ditingkatkan dan diselenggarakan secara optimal, disertai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi sesuai dengan daya dukungnya secara arif dan bijaksana.
16. Jasa-jasa, termasuk jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan informasi serta jasa keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global. Infrastruktur terutama perlistrikan adalah modal utama bagi industri, pembenahan sektor perlistrikan diarahkan agar mampu menjaga ketersediaan daya listrik yang sesuai dengan prediksi permintaan listrik dalam jangka panjang. Jasa telekomunikasi dan informasi pada masa sekarang dan yang akan datang sudah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat baik untuk

keperluan konsumsi maupun bisnis. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi ini diarahkan untuk memperlancar arus informasi dan perkembangan IPTEK sehingga masyarakat mampu mengakses informasi terkini.

4.1.2. Arah Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam upaya untuk menciptakan SDM yang berbasis IPTEK, handal, profesional, beriman, dan bertakwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka arah pembangunan jangka panjang pengembangan kualitas SDM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan melalui: peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan akses informasi, pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat, serta peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
2. Pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, harkat dan martabat sehingga mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dan bersaing di era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berkembang di masyarakat dan tanpa diskriminasi, melalui fasilitasi peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; serta perbaikan manajemen pelayanan pendidikan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK. Keberpihakan pemerintah perlu diberikan kepada kelompok masyarakat miskin melalui pemberian pendidikan dasar sembilan tahun

gratis dan mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal maupun informal.

3. Pembangunan IPTEK diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan; pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat; ketahanan pangan dan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal; serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui dorongan bagi perguruan tinggi lokal dan sekolah untuk pengembangan SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEK lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana IPTEK, dan pengembangan mekanisme intermediasi IPTEK. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu perlu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mempertahankan Babel Sehat; pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui fasilitasi peningkatan upaya kesehatan masyarakat; pembiayaan kesehatan; pengembangan kualitas dan pendistribusian SDM kesehatan, pengadaan, pendistribusian dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan; promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan gizi masyarakat; pengembangan lingkungan sehat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan pengembangan

manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif.

6. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan jumlah jaringan serta kualitas puskesmas hingga ke daerah/pulau terpencil dan terisolir melalui peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; upaya pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan ibu/anak/keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; upaya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; upaya penemuan dan tatalaksana penderita; upaya peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit; upaya penanggulangan kurang energi protein (KEP); upaya penanggulangan gangguan akibat kurang yodium (GAKY)/kurang vitamin A /kekurangan zat gizi mikro lainnya; upaya penanggulangan gizi lebih; upaya peningkatan surveilens gizi; serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
7. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup yang sehat serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini. Hal ini dimulai dengan memberdayakan lingkungan yang sehat serta memberdayakan manusianya untuk berperilaku atau berpola hidup yang sehat. Sosialisasi kesehatan lingkungan ditunjang dengan pendidikan pola hidup sehat yang dimulai sejak lahir. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; upaya pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; upaya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; upaya pengembangan wilayah yang sehat; upaya pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi

- (KIE); serta upaya kesehatan bersumber pada masyarakat, misalnya pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.
8. Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan serta pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin diarahkan pada upaya menyelenggarakan penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan yang menyeluruh, non diskriminasi dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan, upaya pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, upaya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, upaya mewujudkan sistem kesehatan daerah, upaya pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan, serta upaya penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian, dan pengembangan kesehatan.
 9. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Pembenahan sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
 10. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan fasilitasi pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; pembinaan organisasi kepemudaan; dan peningkatan kualitas SDM pemuda melalui pelatihan, seminar dan penyuluhan. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga

dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.3. Arah Reformasi Birokrasi Menuju Ketatapemerintahan yang Baik

Arah pembangunan jangka panjang reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan didukung dengan: peningkatan kapabilitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil dan susah dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada semua lapisan birokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dan penerapan hukum secara adil; penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih dan responsif serta profesional. Pemberdayaan birokrasi ini akan dilakukan secara terus menerus melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah dan pendelegasian jenis pelayanan tertentu kepada kecamatan dan kampung akan dilakukan dalam upaya mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya.
2. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan penguatan lembaga legislatif.
3. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan instensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja; serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

4. Kerja sama antardaerah yang berbatasan perlu ditingkatkan guna meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik. Sedangkan kerja sama antar daerah yang tidak berbatasan langsung perlu ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah guna mendorong peningkatan daya saing dan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.
5. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokrasi, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal melalui pengetatan terhadap pinjaman daerah dan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi; dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
6. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa secara mandiri dalam proses pembangunan. Upaya ini akan dilakukan melalui fasilitasi peningkatan upaya keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara swakarsa/mandiri, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.
7. Pembangunan bidang hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) diarahkan pada upaya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan terciptanya kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui penetapan peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah yang mampu mengakomodir kepentingan investasi dan dunia usaha, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan ditingkatkan melalui pemberian akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.

8. Pembangunan bidang statistik dan kearsipan diarahkan pada upaya penyediaan data/informasi secara akurat, cepat dan terkini. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan data/informasi/statistik daerah, perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi.
9. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang modern melalui pemanfaatan *e-commerce* dalam konteks *paperless document* di lingkungan birokrasi dan proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan melalui kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis, pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen, penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas, penciptaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu

menghubungkan seluruh jaringan (*link*) informasi yang ada di institusi pemerintahan sebagai suatu kesatuan yang mampu menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat, serta pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih luas dan komprehensif bagi pihak terkait dan berkepentingan dengan peluang investasi dan pariwisata.

10. Peningkatan ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat diarahkan pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui fasilitasi peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal, pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (*pekat*), pendidikan politik masyarakat, serta pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
11. Pembangunan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama akan terus dipelihara secara berkelanjutan serta semakin berkembangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Wawasan Kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di samping itu perlunya wawasan kebangsaan yang utuh dalam rangka merekatkan tali kesatuan dan kebersamaan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan politik yang dapat menyerasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi dan konsultasi yang dapat lebih merekatkan berbagai kelompok suku/ras/agama dalam satu persepsi wawasan kebangsaan, melalui upaya pemahaman berbagai kelompok masyarakat, serta upaya penguatan kelembagaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang ada.
12. Pengembangan budaya politik diarahkan pada upaya penanaman nilai-nilai demokratis bagi masyarakat yang diupayakan melalui: penciptaan

kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media dan upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Di samping itu, proses pendewasaan politik masyarakat akan dikembangkan melalui peningkatan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik dan dukungan bagi terciptanya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

4.1.4. Arah Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Berkelanjutan

Arah pembangunan jangka panjang pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada upaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup yang sehat serta peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini. Hal ini dimulai dengan memberdayakan lingkungan yang sehat serta memberdayakan manusianya untuk berperilaku atau berpola hidup yang sehat. Ditunjang dengan pendidikan pola hidup sehat yang dimulai sejak lahir. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; upaya pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; upaya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; upaya pengembangan wilayah yang sehat;

upaya pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); serta upaya kesehatan bersumber pada masyarakat, misalnya pos pelayanan terpadu/pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.

3. Pengembangan pemukiman penduduk dan penataan ruang kota dilakukan melalui penataan pemukiman yang sudah ada dan pengembangan kota serta desa-desa yang menjadi pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan prasarana, sarana utama dan penunjang. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada upaya fasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secara mandiri, memadai, layak huni dan terjangkau daya beli masyarakat; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal; serta dalam upaya menciptakan pemerataan dan penyebaran pembangunan dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
4. Kebijakan pengelolaan SDA yang terbarukan seperti hutan dan kelautan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
5. Pengelolaan SDA tak terbarukan seperti bahan tambang dilaksanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Peningkatan partisipasi masyarakat

akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

6. Pengelolaan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk: (1) menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; (2) mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; dan (3) memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
7. Pengelolaan pertanahan diarahkan pada penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah.

4.1.5. Arah Peningkatan Pembangunan yang Adil dan Merata

Arah pembangunan jangka panjang dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. Keberpihakan pemerintah pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian *block grant* ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik dan

keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'.

2. Pembangunan perkampungan/pedesaan didorong melalui pengembangan agri-bahari terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas SDM di perkampungan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perkampungan dan kota-kota kecamatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, serta intervensi dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian dan kelautan.
3. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah/pulau-pulau terpencil dan tertinggal.
4. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
5. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang

pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

6. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan; kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
7. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
8. Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur yang berkembang di masyarakat —seperti religius, kebersamaan dan persatuan— dan nilai modern yang universal —seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri tersebut dilakukan melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya dan adat istiadat leluhur yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun dan tidak bertentangan dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
9. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur, meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek

material, spiritual dan emosional. Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

4.2. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Kawasan¹

4.2.1. Arah Pembangunan Kewilayahan

Arah pembangunan jangka panjang dalam upaya menciptakan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu menjamin kerbelangsaan dan kesinambungan pembangunan wilayah dilakukan melalui arah kebijakan berikut:

1. Pengembangan wilayah secara umum diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang relatif maju dengan wilayah kurang maju dan antara wilayah daratan dengan wilayah pesisirnya. Pengembangan wilayah dan sekelilingnya dilakukan melalui optimasi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan sistem keterkaitan ruang (*spatial linkages*) yang sesuai dengan tujuan pengembangan tata ruang, serta konsepsi pengembangan tata ruang perlu mempertimbangkan peluang pengembangan eksternal (makro) maupun potensi dan permasalahan internal wilayah. Pertimbangan eksternal perlu diperhatikan mengingat tata ruang wilayah tidak terlepas dari keterkaitan dengan wilayah sekitarnya. Konsepsi ini merupakan titik tolak bagi perumusan strategi pengembangan serta perwujudannya dalam bentuk rencana tata ruang.
2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan umum diarahkan pada upaya peningkatan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan dalam wilayah provinsi dengan wilayah pendukungnya. Mengacu pada karakteristik wilayah provinsi, maka strategi pengembangannya adalah: a).Pemanfaatan pusat pertumbuhan utama, b) Pemantapan pusat pertumbuhan sekunder untuk menciptakan sistem pusat-pusat pertumbuhan yang hirarkis, c) Pembagian wilayah pelayanan yang proporsional untuk setiap pusat-pusat pelayanan (*central – places*), sesuai dengan keterkaitan yang paling optimal.

¹ Diacu dari RUTR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah diarahkan dengan:
 - a) Pengembangan prasarana jalan, energi, telekomunikasi dan pengairan untuk mendukung sistem kegiatan ekonomi wilayah, b) Pengembangan prasarana sosial-ekonomi yang dilakukan untuk memantapkan /membentuk sistem pusat-pusat pemukiman wilayah (sistem kota-kota).
4. Tata ruang makro di wilayah-wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus diarahkan pada prinsip pengembangan tata ruang yang bersifat terbuka, sehingga memacu agar suatu wilayah dapat terus tumbuh dan berkembang pesat, dengan prasyarat wilayah tersebut harus berinteraksi secara ekonomi dengan wilayah eksternal (termasuk kemungkinan interaksi dengan negara-negara lain), dalam bentuk aliran perdagangan barang/komoditi, aliran modal/kapital/investasi, aliran informasi/teknologi, dan tenaga tenaga kerja terampil/ahli/manajerial.
5. Tata ruang mikro diarahkan pada usaha pemerataan perkembangan di 6 kabupaten dan 1 wilayah kota dengan tetap mengedepankan daya dukung lingkungan serta stabilitas internal wilayah. Aspek-aspek dasar yang dipertimbangkan adalah:
 - a) Pengembangan tata ruang mikro wilayah harus mampu menjawab tantangan isu kesenjangan wilayah antara wilayah yang lebih berkembang (koridor jalan utama) dengan wilayah yang relatif kurang berkembang (bagian barat, pesisir selatan dan timur serta wilayah pulau-pulau kecil), b) Perlunya memantapkan fungsi lindung kawasan-kawasan yang memiliki kriteria kawasan lindung, baik kawasan lindung di wilayah darat (hutan lindung, sempadan sungai) maupun kawasan lindung di wilayah laut dan pesisir (sempadan pantai, terumbu karang, dan hutan mangrove), c) Memperhatikan hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya, d) Perlu adanya keseragaman penanganan terhadap kolong-kolong eks pertambangan, e) Pemanfaatan potensi-potensi sumber daya wilayah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus merubah struktur tata ruang wilayah ke arah yang ideal namun tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan dengan
 - a) pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), dengan pemantapan jaringan jalan dan pelabuhan, b)

Pemantapan akseibilitas intra wilayah (internal) dengan pemantapan jaringan jalan lokal maupun pembangunan jalan baru di pesisir selatan maupun di pesisir timur untuk mendukung pengembangan perikanan di pesisir selatan dan pesisir timur serta dan bagian tengah untuk pelayanan pertanian, c) Pemantapan pusat pertumbuhan wilayah dengan pengembangan fungsi pelayanan sosial ekonomi (*central function*) d) Pemantapan pusat-pusat pelayanan dengan jenjang dari pusat provinsi, pusat kabupaten, pusat kecamatan dan seterusnya dengan mempertimbangkan adanya simpul-simpul ekonomi yang terkait dengan pusat transportasi laut (pelabuhan) serta pengembangan pusat-pusat permukiman (kecenderungan pemusatan permukiman) seperti di jalan-jalan Nasional-Provinsi-Kabupaten atau pusat-pusat pelayanan jasa tertentu, e) Pengembangan kawasan potensial yang berkembang di wilayah bagian timur (kawasan pesisir timur) dengan memanfaatkan potensi perikanan dan pariwisata, f) Pengembangan kawasan kurang berkembang di wilayah bagian selatan (pesisir selatan) dan wilayah bagian barat.

7. Pengembangan wilayah pulau-pulau kecil (*Small Island Development Concept*) diarahkan dengan menetapkan kekhususan fungsi setiap pulau kecil. Pengkhususan ini akan meningkatkan keunggulan-keunggulan komparatif setiap pulau-pulau kecil tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka pulau kecil dapat dibedakan ke dalam beberapa fungsi, yaitu: a) Pulau dengan fungsi utamanya pertanian (*agriculture island*) dilakukan dengan pengoptimalan peran teknologi sehingga dimungkinkan dilakukan ekspor ke daerah-daerah lain, b) Pulau dengan fungsi utamanya pariwisata (*tourism island*) dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi fisik alam, kelayakan ekonomis di dalam pengembangannya serta pengembangan pariwisatanya diarahkan untuk tidak merusak ekosistem pulau tersebut dan daerah di sekitarnya, c) Pulau dengan fungsi utamanya industri (*industrial island*) diarahkan untuk pengembangan industri-industri yang sedikit menggunakan air dan tidak polutif, serta tidak ekstratif, d) Pulau dengan fungsi utamanya konservasi (*conservation island*) diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi konservasi pulau serta potensi untuk dapat dijadikan objek wisata, seperti eko wisata yang akan mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut, e) Pulau dengan fungsi

utamanya pusat penelitian (*research centre*) diarahkan dengan memperhatikan keunikan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh pulau tersebut atau potensi yang ada di sekitar pulau tersebut, f) Pulau dengan fungsi utamanya pertahanan (*security island*) diarahkan untuk memanfaatkan fungsi pulau-pulau terluar sebagai wilayah perbatasan sehingga dapat dioptimalkan sebagai fungsi pertahanan tersebut.

4.2.2. Arah Pembangunan Kawasan

Arah pembangunan kawasan diarahkan pada pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan pesisir laut.

1. Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan pemantapan batas dan status kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga keberadaannya menjadi lebih jelas, baik secara fisik maupun hukum, pemanfaatan kawasan lindung sebatas tidak mengurangi fungsi lindungnya, mengikutsertakan masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lindung, pengelolaan kawasan lindung di bawah koordinasi pemerintah provinsi, dan kerjasama antar daerah kabupaten/kota menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu administrasi.
2. Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan untuk kegiatan produksi, yang meliputi pengembangan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata dan kawasan danau/kolong, kawasan pesisir laut dan kepulauan. Penetapan suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu, selain mengacu pada kriteria harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu: a).Lingkungan buatan, sosial, dan interaksi antar wilayah, b) Tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan, c) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan.
3. Konsep dasar pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan kepada pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone*

management and planning), hal ini dilakukan untuk mewujudkan keserasian, kolaborasi harmonis, dan sinergis, antara kepentingan ekonomi (*economic sight*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), serta pemeliharaan lingkungan hidup (*environmental conservation*) dalam suatu kelembagaan yang terpadu (*institution integrated*).

4. Arah pengelolaan kawasan hutan produksi adalah *sustainable yield management*, partisipatif dan tetap memperhatikan aspek lingkungan secara berkesinambungan. Selain itu, kebijaksanaan pengelolaan sumber daya hutan sudah bergeser dari bobot utama *timber management* menjadi konsep yang mengarah pada bobot *multi purpose forest management*.
5. Arah pengelolaan hasil tambang diarahkan pada upaya menciptakan kegiatan industri yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi serta berbasis partisipasi masyarakat agar mampu meningkatkan nilai tambah terhadap penerimaan daerah, serta menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal khususnya. Pendayagunaan sumberdaya mineral dilakukan secara berencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta senantiasa memenuhi persyaratan AMDAL, UPL, dan UKL, sehingga kelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup dapat terus dijaga.
6. Pengelolaan kawasan pertanian diarahkan pada pembangunan kawasan produksi yang dapat memadukan pembangunan pertanian dan pembangunan industri. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menciptakan kawasan ini adalah: identifikasi potensi fisik dan agroklimat yang sesuai untuk mendukung fungsi pembentukan kawasan, ketersediaan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas kawasan untuk mendukung peningkatan produksi kawasan secara berkelanjutan, ketersediaan fasilitas pengadaan air bersih/ air baku untuk menunjang pembangunan kawasan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan jangka waktu tertentu, ketersediaan fasilitas drainase, sistem drainase yang dapat mengelola limbah menjadi bahan yang tidak mengganggu lingkungan, kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai

pelaku pelaksana pembangunan dalam hal ini kesiapan petani dalam penguasaan teknologi pembudidayaan, pengelolaan, dan pemasaran, kondisi serta kepastian berusaha berupa perlindungan bagi pengembangan bisnis dan industri yang terkait dengan fungsi kawasan secara luas, kemudahan dan keterbukaan bagi pengembangan lembaga permodalan dan lembaga ekonomi dalam mendukung kawasan secara mikro maupun makro secara berkelanjutan.

7. Pembangunan kawasan industri diarahkan untuk memperkuat struktur industri, khususnya industri yang terkait dengan sektor pertanian (agroindustri), industri kecil, dan menengah, serta industri kerajinan dan industri rumah tangga yang dilakukan dengan mengembangkan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan kualitas lingkungan hidup.
8. Arahkan pengelolaan kawasan pariwisata adalah upaya pengembangan kawasan terpadu yang bersifat lintas wilayah dan sektor pembangunan dengan mengandalkan objek wisata alam, bahari, budaya dan sejarah, yang memiliki keunikan dan kekhasan dalam lingkup provinsi, nasional, maupun kalau memungkinkan dalam lingkup internasional.

BAB V

KAEDAH IMPLEMENTASI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan berkebangsaan. RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Maksud disusunnya RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 adalah untuk:

- a. Memberikan arah/pedoman yang jelas bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Mendukung terselenggaranya koordinasi antar pelaku pembangunan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan.
- d. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 merupakan pedoman/acuan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta

masyarakat dan dunia usaha, sehingga diharapkan akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah, masyarakat umum dan dunia usaha berkewajiban untuk berpedoman dan melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban mensosialisasikan materi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Setiap lima tahun, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, dalam jajaran organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masyarakat, dan badan usaha berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025 dengan rencana pembangunan lainnya yang disusun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam penyusunan anggaran daerah.
- d. Dalam situasi terjadi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang sangat penting, RPJPD ini dapat dievaluasi dan ditinjau kembali untuk disesuaikan sebagaimana mestinya dengan perubahan lingkungan tersebut.

Untuk dapat melaksanakan RPJPD ini secara konsisten, integratif dan sinergis, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*. Tiga pilar utama terselenggaranya *good governance* meliputi:

- a. Transparansi, yaitu pemerintah daerah harus membuka akses informasi (misalnya peraturan daerah, kebijakan pembangunan dan sebagainya) yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
- b. Akuntabilitas, yaitu adanya mekanisme yang mengatur bagaimana setiap elemen pemerintah daerah dan masyarakat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Partisipasi, yaitu adanya hak dan kewajiban dari seluruh elemen pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.